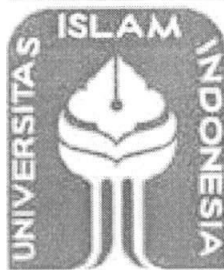


**SINERGI PESANTREN-MADRASAH
DI ERA MODERN SEBAGAI MODEL ALTERNATIF
PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA**



**Oleh:
Amin Maghfuri
NIM : 15913083**

**Pembimbing:
Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd**

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Maghfuri

NIM : 15913083

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Judul : SENERGI PESANTREN-MADRASAH DI ERA MODERN
SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENDIDIKAN ISLAM
INDONESIA

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keanggotaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2019

Yang menyatakan,



Amin Maghfuri



PROGRAM STUDI
MAKULAH UIN AGAMA ISLAM (MI)
FAKULTAS UIN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jl. Demangan Raya No. 24 Lingsi II Yogyakarta
Telp. Fax (0274) 523517 ponsel 085430343121

PENGESAHAN

Nomor: 2007/PS-MIA/Peng-NIL/2019

TESIS berjudul : **SINERGI PESANTREN-MADRASAH DI ERA MODERN
SERAGAI MODEL ALTERNATIF PENDIDIKAN ISLAM
INDONESIA**

Ditulis oleh : **Amin Maghfuri**

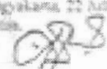
N. I. M. : **15913083**

Konsentrasi : **Pendidikan Islam**

Terlah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Pendidikan.



Yogyakarta, 22 Juli 2019
Ketika


Dr. Dra. Jannah, MEd



PROGRAM STUDI
PASANTREN LAU AGAMA ISLAM (PA)
PANEL PASANTREN LAU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demang Roro No. 24 Lantai 2 Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 223637 email: ms@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Anis Maghfari
Tempat/tgl lahir : Grobogan, 7 Maret 1993
N. I. M. : 15913083
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : SENERGI PESANTREN-MADRASAH DI ERA MODERN
SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENDIDIKAN ISLAM
INDONESIA

Ketua : Dr. Drs. Junardi, MTS
Sekretaris : Dr. Drs. Yudianti, M.Ag
Pembimbing : Dr. Drs. Akmal Darmadji, M.Pd
Penguji : Dr. Hujair Ali Samsky, M.Si
Penguji : Dr. Lantip Dwi Prasjo, M.Pd.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dijadi di Yogyakarta pada Selasa 16 Juli 2019
Pukul : 09.00 - 10.00
Hasil : Lulus



Mengetahui
Dekan Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Drs. Junardi, MTS



PROGRAM STUDI
MAJISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Liris Di Yogyakarta
Telp. (0274) 513637 Fax. 513637

NOTA DINAS

No. : 1845/PS-MIA/ND-VII/2019

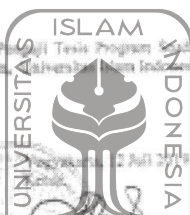
TESIS berjudul : **SINERGI PESANTREN-MADRASAH DI ERA MODERN
SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENDEKATAN ISLAM
INDONESIA**

Ditulis oleh : **Amin Maghfur**

NIM : **11913083**

Konsentrasi : **Pendidikan Islam**

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERSetujuan

Judul : SINERGI PESANTREN-MADRASAH DI ERA MODERN
SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENDIDIKAN ISLAM
INDONESIA

Nama : Amin Maghfur

NIM : 25913083

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Dianjurkan untuk disetujui oleh TIM Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 20 Juni 2019

Pembimbing

Lra. Ahmad Sodartono, M.Pd

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Ibu dan Bapak:
Semoga mereka selalu dalam lindungan ridha Allah
dan senantiasa diberkahi hari-harinya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO



“Pendidikan Islam yang masih membedakan antara ulumuddin dan ulumudunya belum layak disebut sebagai pendidikan Islam yang kaf-fah atau komprehensif”

(Prof. Dr. Abdurrahman Mas'ud, M.A., Ph.D.)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Sesuai dengan SKN Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak disambungkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ظ	ẓ
17	ط	ṭ
18	ي	Y
19	ك	K
20	ق	Q
21	گ	G
22	ف	F
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	هـ	H
27	و	W
28	ز	Z
29	ح	Ḥ

2. Vokal Panjang : ا = ā, ي = ī, و = ū

3. Diftong : و = ai - jī = au

ABSTRAK

Sinergi Pesantren-Madrasah Di Era Modern Sebagai Model Alternatif Pendidikan Islam Indonesia

Amin Maghfuri
NIM. 15913083

Secara historis, madrasah di Indonesia merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir dari rahim pesantren untuk merepresentasikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang lebih modern. Namun dalam perkembangannya, madrasah berkembang ke arah yang justru jauh dari nilai-nilai dan karakter pesantren. Bahkan madrasah tidak lagi merepresentasikan pesantren dan keduanya seolah memiliki “ruh” pendidikan masing-masing. Kenyataan tersebut berdampak pada output lulusan madrasah yang serba tanggung, tidak memadai pengetahuan umumnya dan kurang mendalam penguasaan terhadap pengetahuan agama.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang menekankan pada kajian kepustakaan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi untuk memperoleh sebuah kesimpulan penelitian dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dinamika kelembagaan pendidikan Islam antara pesantren dan madrasah di Indonesia menggambarkan sebuah proses yang tidak berkesudahan dalam mencari format pendidikan yang terbaik mengikuti perkembangan zaman. Modernisasi pesantren yang melahirkan madrasah berimplikasi pada pola pendidikan yang berjalan secara terpisah, parsial serta tidak saling mendukung dan melengkapi antara keduanya. Hal tersebut setidaknya tampak pada pengelolaan lembaga, penerapan kurikulum serta evaluasi dan penilaian yang tidak sinergis pada dua institusi pendidikan tersebut. 2) Konseptualisasi format pendidikan Islam alternatif dalam bentuk kelembagaan yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah mengisyaratkan perlunya evaluasi dan rekonstruksi ulang proses modernisasi yang berjalan di lingkungan pesantren. Upaya untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih efektif dapat dimulai dari mengusahakan sistem yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah, yang secara terbatas dapat dimulai dari aspek manajemen pengelolaan, implementasi kurikulum serta evaluasi dan penilaian yang sinergis-integratif.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Pesantren, Madrasah, Sinergis-Integratif.

ABSTRACT

Synergy of Pesantren-Madrasah in Modern Era as an Alternative Model of Islamic Education in Indonesia

Amin Maghfuri
NIM. 15913083

Madrasah in Indonesia historically is an Islamic Educational institution that has been born from pesantren (Islamic Boarding School) to represent pesantren as a more modern educational institution. However, in its development, madrasah has been farther from the values and characters of pesantren; even it no longer represents the pesantren. Both madrasah and pesantren seem to have their own "spirit" of education. This fact then has brought an impact on the output of the graduates of madrasah that insufficiently have common knowledge and do not master the religious knowledge deeply.

This is a qualitative research focused on the literature study. The data in this research were collected using the documentation method and analyzed using the content analysis method to obtain a research conclusion using the historical-philosophical approach.

The results of the research showed that 1) the dynamic of Islamic educational institution between pesantren and madrasah in Indonesia shows an endless process in seeking the best education format harmonious with the era development. The modernism of pesantren generating Madrasah has brought an implication in the educational patterns that run separately, partially and not supporting and completing to each other. This at least can be seen in the institutional management, implementation of curriculum and evaluation and assessment that are not synergic in those two educational institution. 2) The conceptualization of alternative Islamic educational institution in the form of synergic-integrative institution between pesantren and madrasah indicates the needs for evaluation and reconstruction of modernization process in the pesantren environment. The endeavor to create more effective Islamic educational system can be started by building a synergic-integrative system between pesantren and madrasah from the managerial aspect, curriculum implementation and synergic-integrative assessment.

Keywords: Islamic Education, Pesantren, Madrasah, Sinergic-Integrative.

June 27, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmt dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi semesta alam dan menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya hidup di dunia dan akhirat.

Penulisan tesis ini merupakan sebuah usaha untuk ikut memperkacaya wacana konseptual tentang model-model alternatif pendidikan Islam di indonesia khususnya yang berkaitan dengan pesantren dan madrasah. Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus hati pada kesempatan ini peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Tamyis Mukarom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd., selaku pembimbing tesis yang telah dengan sabar, teliti dan kritis memberikan berbagai masukan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Keluarga tercinta, ayahanda Solekan, ibunda Kanisih, Mbak Suci Nur Aini, Mas Muh. Miftahudin dan Adik Muhlisatul Amaliyah yang selalu memberikan support dan doa restu kepada peneliti.
7. Teman-teman organisasi dan diskusi, Biky Uthbek Mubarak, Alif Kurniawan, Fajar M Nasih, Aziz Asy'ari, Zetty Syarifah, Tini

Nurmilasari, serta Wahyudi yang telah banyak meluangkan waktu bagi peneliti untuk berdiskusi atau sekedar ngopi.

8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti juga mohon maaf karena dalam tesis ini tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif selalu dinantikan demi perbaikan karya-karya lain di masa yang akan datang.

Semoga tesis yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT meridai, *āmīn*.



Yogyakarta, 20 Juni 2019

Peneliti,

Amin Maghfuri

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	19
1. Pendidikan Islam	19
2. Pondok Pesantren dan Madrasah	24
3. Modernisasi Pendidikan Islam	36
4. Sinergi dalam Pendidikan	39
BAB III : METODE PENELITIAN	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Pendekatan penelitian	44
3. Sumber Data	45

4. Metode	46
5. Analisis Data	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pesantren dan Dinamika Modernisasinya	49
B. Madrasah Berbasis Pesantren dan Perkembangannya .	69
C. Dinamika Kesalingterkaitan Pesantren dan Madrasah ..	88
D. Mengapa Harus Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam?	96
E. Konsep Sinergi Pesantren dan Madrasah Sebagai Model Alternatif Pendidikan Islam Indonesia...	103

BAB V : PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA	144
----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	152
----------------------------	-----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang paling asli dan paling tua di Indonesia.¹ Keberadaannya memberi warna berbeda pada sejarah pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang sudah eksis sebelum kemerdekaan diraih, bahkan pesantren dipercaya menjadi tempat lahirnya semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pasca-kemerdekaan, pesantren tetap masih eksis dengan berbagai dinamikanya, dan bahkan pesantren mampu menjawab anggapan-anggapan negatif tentang daya tahannya (resistence) dalam menghadapi dunia modern dengan tetap eksis dan terus berkembang.

Survive-nya pesantren sampai sekarang ini tidak lepas dari kemauan dan kemampuannya menyesuaikan dengan tuntutan zaman, dengan memodernisasi hampir seluruh aspek yang ada dalam pesantren. Namun demikian, dinamika yang terjadi di dalam pesantren selama ini – masih – tidak lepas dari anggapan-anggapan miring serta pro dan kontra terkait keberadaan pesantren. Meski sebagian besar sudah mulai menyadari peran serta pesantren – yang juga inspirator dari lahirnya madrasah – dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, namun anggapan konservatif maupun tradisional masih selalu disematkan kepada pesantren. Barangkali memang pesantren dan juga madrasah belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat ketika disandingkan dengan hal-hal yang berbau modern, meskipun proses modernisasi di pesantren khususnya sudah banyak berjalan dan masih terus berjalan.

Salah satu bentuk nyata dari proses modernisasi dalam

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003),. hlm. 7.

tubuh pesantren yaitu dengan lahirnya madrasah-madrasah di lingkungan pesantren yang selain mengajarkan ilmu agama, juga telah mengakomodasi ilmu-ilmu umum di dalamnya. Meskipun untuk sampai pada taraf setara dengan sekolah umum negeri yang mendapat pengakuan pemerintah perlu waktu yang cukup lama, namun keberadaan madrasah ini tetap merupakan bukti nyata dari sebuah proses modernisasi pesantren. Tahap demi tahap dan dinamika yang dilalui pesantren hingga akhirnya diakui pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menggambarkan betapa proses modernisasi pesantren dengan madrasah sebagai kepanjangan tangannya terus berjalan.

Proses modernisasi pesantren yang pada akhirnya melahirkan madrasah untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman merupakan bukti bahwa pesantren bukanlah lembaga yang anti terhadap perkembangan. Modernisasi tersebut paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sebagai akibat dari pembaharuan-pembaharuan yang terjadi di dunia Islam dan respon terhadap semakin meluasnya pendidikan umum yang dibuat oleh Belanda.² Faktor pertama mengindikasikan adanya kesadaran dalam diri umat muslim sendiri – dalam hal ini pesantren – akan perlunya inovasi-inovasi dalam pendidikan Islam seiring perkembangan zaman. Sedangkan faktor kedua merupakan usaha dari kalangan pesantren untuk meminimalisir merebaknya pendidikan sekuler yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda.

Meskipun demikian, pada dasarnya pengembangan yang dilakukan pesantren ini diawali dengan dilema yang mendalam.³ Pesantren, yang notabene adalah lembaga pendidikan Islam – dalam artian sempit – yang mengajarkan pengetahuan keagamaan an sich diharuskan untuk memasukkan pengetahuan umum yang bahkan pernah dihindarinya. Dilema yang menyelimuti pesantren tersebut antara mempertahankan identitas kesejarahan sebagai lembaga pencetak ulama dan faqih (orang yang menguasai

² Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 81-82.

³ Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 219.

hukum fiqih) atau mengikuti tuntutan modernisasi dengan memasukkan pendidikan non-keagamaan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Pada akhirnya secara gradual dan kontinyu, pesantren menerima “tekanan” modernisasi tersebut dengan mendirikan madrasah yang mewakili lembaga pesantren yang juga mengajarkan pendidikan non-keagamaan. Sampai pada hari ini, hampir semua pesantren tradisional yang dulunya dianggap anti terhadap kemajuan sudah memiliki lembaga yang mengajarkan pendidikan umum untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam bentuk madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA), dan bahkan sudah ada beberapa yang mendirikan Penguruan Tinggi (PT).

Kecenderungan untuk mengikuti mainstream yang sesungguhnya diawali dengan dilema tersebut mulai menampakkan apa yang dulunya dikhawatirkan. Perubahan besar-besaran yang dilakukan pesantren secara tidak langsung mengubah pula orientasi pesantren, juga pandangan masyarakat tentang pesantren. Keberadaan lembaga pendidikan Islam yang juga mengajarkan pengetahuan umum – dalam hal ini madrasah – di satu sisi memang mampu menutupi lubang kelemahan yang dimiliki pesantren serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat tentang lulusan yang siap kerja, meskipun skalanya masih belum maksimal. Namun di sisi lain, kekhawatiran para kyai pesantren akan tercerabutnya akar kesejarahan pendidikan Islam ala pesantren mulai memperlihatkan indikasinya. Ditambah lagi mulai memudarnya pengkajian khasanah keilmuan klasik secara mendalam yang secara sanad dapat dipertanggungjawabkan untuk melahirkan calon-calon yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.

Di samping kekhawatiran akan tercerabutnya akar kesejarahan ilmu-ilmu keislaman atau jejak intelektualisme Islam, munculnya madrasah juga memberi dampak pada kondisi pendidikan nasional. Sejak awal berdirinya, sebagian besar madrasah memang digunakan sebagai penyeimbang – untuk tidak mengatakan melawan – terhadap kebijakan pendidikan

yang diterapkan pemerintah kolonial. Kenyataan tersebut memunculkan stigma negatif bagi dunia pendidikan, yang seolah menghadapkan keduanya pada suatu perbedaan dan pertentangan. Stigma tersebut sepertinya telah menjadi dogma dalam kehidupan masyarakat sejak kemerdekaan belum diraih, bahkan tetap terbawa dan mengakar dalam persepsi masyarakat sampai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Pasca-kemerdekaan Indonesia, dalam upaya pembangunan nasional yang salah satu fokus garapannya adalah pendidikan, pemerintah dihadapkan pada kenyataan adanya stigma negatif pada dunia pendidikan Indonesia. Adanya dua macam lembaga pendidikan yang oleh masyarakat dianggap berbeda dan bertentangan tentu berpotensi menimbulkan masalah. Meskipun sudah ada sekolah umum yang diakui oleh pemerintah, namun tampaknya mengesampingkan madrasah bukanlah merupakan suatu langkah yang tepat mengingat cukup besarnya juga animo masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Untuk meredakan anggapan dikotomik di kalangan masyarakat tersebut, pemerintah mencoba mengatasinya dengan mengeluarkan Kepres No. 34 tahun 1972 tentang penyatuan payung semua lembaga pendidikan dibawah naungan kementerian P&K. Keputusan Presiden (Kepres) tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Inpres No. 15/1974 agar Kepres No. 34 Tahun 1972 segera direalisasikan.⁴ Dari situ, dengan berbagai problematika dan dinamika kemudian lahirlah SKB tiga menteri tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah” pada tahun 1975. SKB tersebut sebagai tindak lanjut dari Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang intinya bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab Menteri Agama dan statusnya setara dengan sekolah-sekolah umum sesuai tingkatannya.⁵

Namun demikian langkah tersebut pada prosesnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Anggapan dikotomik tetap ada dan “penganak tirian” madrasah menjadi kenyataan baru di lapangan. Madrasah sering kali dianggap sebagai sekolah

⁴ Maksum, *Madrasah*, hlm. 146-147.

⁵ *Ibid.*, hlm. 149.

kelas dua dengan berbagai kekurangannya. Di sisi lain, madrasah juga mulai dianggap kurang mampu mewakili pesantren sebagai penerus dan penjaga jejak intelektualisme Islam serta penjaga moral generasi bangsa. Sebagai kepanjangan tangan pesantren, madrasah tidak cukup mampu menggambarkan tradisi pesantren, terlebih setelah adanya SKB tiga Menteri yang menuntut adanya perubahan orientasi kurikulum madrasah dengan pengurangan muatan pelajaran agama.

Dalam SKB tiga menteri itu, madrasah mendapat predikat sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Barangkali itu disematkan karena madrasah tidak lain adalah kepanjangan tangan dari pesantren yang memang dikenal sebagai tempat menimba ilmu-ilmu keislaman pada waktu itu. Namun demikian, penyematan predikat tersebut tidak serta merta diikuti dengan kualitas output dari madrasah. Lulusan yang dilahirkan oleh madrasah cenderung tidak maksimal dan dianggap serba tanggung. Sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, madrasah tidak mampu mencetak generasi yang berpengetahuan keagamaan mendalam, dan sebagai sebuah sekolah yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan umum, madrasah kurang mampu melahirkan generasi ilmuwan yang unggul dalam bidang pengetahuan umum, dalam hal ini pengetahuan yang diajarkan masih cukup rendah dan kurang memadai.⁶

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai macam sebab, mulai dari keprofesionalan guru, kelengkapan sarana dan prasarana belajar di madrasah, serta fasilitas-fasilitas lain yang tidak dapat dipenuhi oleh madrasah. Selain sebab-sebab tersebut, pembagian waktu belajar di madrasah tentu berbeda dengan di sekolah umum karena di dalam madrasah materi keagamaan lebih banyak, sedangkan umumnya waktu belajar di sekolah antara sekolah umum dan madrasah hampir sama. Hal yang mungkin lebih parah terjadi pada madrasah yang berada dalam lingkup pesantren, dimana pembelajaran agama dilakukan pada

⁶ Raharjo, *Madrasah Sebagai The Centre of Excellence*, dalam Ismail, Dkk. (ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 227-228.

keduanya (pesantren dan madrasah), dimana biasanya materi agama di madrasah lebih dasar atau lebih ringan dari pada materi agama di pesantren. Ini tentu menjadikan waktu belajar peserta didik atau santri kurang efektif karena bisa jadi ada pengulangan pembahasan antara pembahasan materi agama di pesantren dan di madrasah.

Beberapa problematika tersebut tentu membuat gusar kalangan yang memperhatikan dan peduli terhadap dunia pendidikan dan pesantren serta juga khasanah keilmuan klasik – dalam arti positif –. Belum lagi persoalan moral generasi muda yang nantinya menjadi penerus keberlangsungan Islam dan Kebhinekaan NKRI yang mulai terlihat mengkhawatirkan. Sistem pesantren yang dulunya berfungsi memfilter pengaruh negatif dari luar kini mulai melemah fungsinya, salah satunya akibat fokus sistem yang beralih ke madrasah, yang secara formal memang lebih mampu untuk memberi jaminan material di masa yang akan datang bagi para peserta didiknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa perlu adanya kajian tentang lembaga-lembaga pendidikan, terutama pada sistem pesantren dan madrasah. Lebih spesifik lagi dengan kajian dalam bingkai studi evaluatif terhadap proses modernisasi yang terjadi dalam pesantren, hingga melahirkan lembaga baru bernama madrasah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dan pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Sinergi Pesantren-Madrasah Di Era Modern Sebagai Model Alternatif Pendidikan Islam Indonesia

2. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana konsep sinergi pesantren dan madrasah sebagai model alternatif pendidikan Islam Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan menjajaki gambaran model alternatif pendidikan Islam di era modern ini dalam sebuah bingkai sinergi antara pesantren dan madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam.

2. Manfaat Penelitian

1. Bersifat teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi para penyelenggara Pendidikan Islam di Indonesia, terkhusus juga untuk peneliti sendiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan tentang konsep Pendidikan Islam, khususnya untuk merevitalisasi sistem pendidikan pesantren.

2. Bersifat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi terhadap berjalannya proses Pendidikan Islam di Indonesia saat ini.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menciptakan dunia Pendidikan Islam Indonesia yang lebih baik, dengan tetap berpijak pada sejarah yang telah berjalan di Indonesia.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, dan untuk mendapatkan hasil yang utuh, terarah, serta penyajian yang konsisten maka diperlukan sistematika pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola pikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Oleh karena itu deskripsi

penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang di dalamnya terangkum alasan pemilihan soal dan masalah-masalah yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian agar lebih memperjelas arah dan tujuan penelitian ini maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat dari penelitian ini, baik secara praktis maupun secara teoritis. Dengan demikian pada bab pertama ini memuat tentang penggambaran isi penelitian secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, memuat telaah pustaka dan kerangka teori. Telaah pustaka merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Ini bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi penelitian-penelitian tersebut dari berbagai aspek, termasuk judul penelitian, permasalahan yang dihadapi, teori yang digunakan, prosedur penelitian yang dipakai, dan hasil penelitian yang telah dicapai. Tahap ini perlu dilakukan sebagai sebuah tatakrama atau etika dalam penelitian. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain. Sedangkan kerangka teori merupakan teori-teori yang sesuai dengan judul dan masalah penelitian. Kerangka teori ini digunakan untuk menyusun suatu kerangka berfikir untuk menemukan sebuah hasil penelitian. Kerangka teori ini perlu dikemukakan sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian, sehingga acuan dalam pembahasan penelitian tampak jelas dan tidak melebar kemana-mana.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat segala sesuatu tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Metode penelitian memuat tentang jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian, sumber data dalam penelitian, informan atau tokoh sebagai penunjang data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, memuat pembahasan dalam penelitian serta hasil dari pembahasan tersebut. Di sini akan dikemukakan

secara singkat tentang sejarah lahirnya pesantren, dinamika yang dilalui oleh pesantren sejak lahirnya sampai dengan era sekarang ini, serta segala sesuatu yang melingkupi pesantren. Eksistensi yang cukup kuat dalam berbagai kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang selalu berubah juga menjadi bagian pembahasan sebagai pengantar pada bab ini. Selanjutnya, pada bab ini akan dikemukakan pembahasan yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Secara sederhana dalam bab ini akan dikemukakan bagaimana sinergi yang terjalin antara pesantren dan madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan islam yang saling terkait, dimana madrasah pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam. Selain itu juga akan dikemukakan seperti apa model alternatif pendidikan Islam dalam sistem sinergi pesantren dan madrasah sebagai sebuah alternatif konsep pendidikan Islam yang menyangkut pesantren. Konsep tersebut tentunya merupakan hasil dari pembahasan-pembahasan penelitian dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, serta saran yang dianggap penting dan relevan sesuai dengan hasil penelitian ini. Kesimpulan merupakan temuan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, sangat dimungkinkan terjadi kesamaan tema ataupun fokus pembahasan antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Kesamaan tersebut sangat berpeluang menghasilkan sebuah pengulangan penelitian atau bahkan plagiasi penelitian. Oleh karenanya, sebelum seorang peneliti melakukan penelitiannya tentang sebuah tema, diharuskan baginya untuk melakukan kajian atau telaah pustaka terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian ataupun pengulangan penelitian. Selain itu, kajian atau telaah pustaka tersebut berfungsi sebagai penjelas posisi seorang peneliti terhadap penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian yang telah peneliti kaji sebelum melakukan penelitian terkait dengan judul yang peneliti pilih adalah sebagai berikut:

1. Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Kholil dalam jurnal Media Akademika, Vol. 26, No. 3. Dalam artikel ini, ia memaparkan bahwa gagasan menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban muslim di Indonesia merupakan suatu yang sangat beralasan. Hal ini didasarkan pada tinjauan historis yang menempatkan pesantren pada posisi dimana lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia, serta tinjauan filosofis yang menampakkan bahwa pesantren dibangun di atas landasan dan konsep dasar pendidikan yang bersifat holistik dan terpadu, dengan menempatkan aspek moralitas, ketuhanan, dan martabat kemanusiaan secara utuh sebagai sebuah nilai yang substansial. Untuk merealisasikan gagasan

tersebut, ada empat unsur pokok yang perlu digarap yaitu, rekonstruksi pendidikan pesantren, pembenahan sistem dan manajemen pesantren, penguatan kultur pesantren, dan dukungan kebijakan pemerintah.⁷

2. Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Indonesia (Telaah Kurikulum Pondok Pesantren, Menuju Arah Baru Pendidikan Islam di Era Globalisasi), yang ditulis oleh Ali Mu'tafi dalam jurnal *Al-Qalam* Vol.XIII menguraikan bahwa pesantren harus melakukan transformasi ke arah posisi dan peran yang lebih progresif dan dinamis dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan terutama dalam aspek kurikulum pembelajaran dan metode pembelajaran agar lebih modern. Dalam rangka menghadapi era globalisasi, perlu adanya rekonstruksi sistem pesantren yang mengarah pada konsistensi pesantren sebagai lembaga pengkader ulama, konsistensi pesantren sebagai lembaga khusus pengkajian Islam, dan keterbukaan pesantren dalam menerima dan menerapkan pengetahuan umum serta keterampilan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.⁸
3. Rekonstruksi Pendidikan Pesantren Sebagai Character Building Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern, yang ditulis oleh Mohammad Muchlis Solichin dalam jurnal *Karsa*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2012. Dalam artikel ini Muchlis menguraikan bahwa pesantren, yang pada perkembangannya melahirkan lembaga sekolah atau madrasah akan di uji konsistensinya sebagai lembaga yang dapat menanamkan dan menjaga moral para santrinya. Adanya madrasah atau sekolah dalam lingkungan pesantren serta kecenderungan dalam kehidupan modern berupa materialisme, oportunistis, individualisme dan hedonis mengharuskan pesantren menemukan formulasi

⁷ Muhammad Kholil, "Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia", *Jurnal Media Akademika*, Vol. 26 No. 3, Tahun 2011.

⁸ Ali Mu'tafi, "Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Indonesia; Telaah Kurikulum Pondok Pesantren, Menuju Arah Baru Pendidikan Islam di Era Globalisasi", *jurnal Al-Qalam* Vol.XIII, 2014.

baru untuk tetap menjadi lembaga character building bagi masyarakat. oleh karena itu, pesantren harus mampu merumuskan pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai keislaman yang berdasarkan pada fitrah (potensi dasar) peserta didik. Pendidikan dalam pesantren harus mulai diarahkan pada pembelajaran yang lebih menampilkan aspek-aspek esoterisme dengan memberikan ruang pada pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hikmah dan rahasia mendalam di balik semua ketentuan, aturan melebihi apa yang tampak (eksoterisme).⁹

4. Pembaharuan Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang ditulis oleh Sahidin sebagai Tesis di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat dua jenis pembaharuan pendidikan di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, yakni pembaharuan pendidikan intelektual dan pembaharuan pendidikan sosio-kemasyarakatan. Implementasi pembaharuan pendidikan intelektual tersebut berupa Madrasah Diniyah (Madin) dan Ma'had Aly dengan berbagai macam metode pembelajaran. Sedangkan implementasi pembaharuan pendidikan sosio-kemasyarakatan terwujud dalam berbagai lembaga yang ada di pondok pesantren wahid hasyim Yogyakarta. Kedua model pembaharuan ini berkontribusi pada pemahaman santri terhadap kitab kuning dan cara mengaktualisasikan dalam kehidupan yang serba kompleks dan pembelajaran kepada santri untuk menjadi warga negara yang baik, yang peka

⁹ Mohammad Muchlis Solichin, "Rekonstruksi Pendidikan Pesantren Sebagai Character Building Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern", *Jurnal Karsa*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2012.

terhadap masalah, pegabdian diri kepada masyarakat dan lain-lain.¹⁰

5. Inovasi Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Islam Bersistem Boarding School di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, yang ditulis oleh Mohammad Jakfar sebagai Tesis di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa inovasi pendidikan agama islam di SMP IT Abu Bakar dengan sistem boarding school-nya, yaitu inovasi dalam aspek tujuan pendidikan, inovasi dalam aspek materi atau konten kurikulum dan pengajaran, inovasi dalam aspek pendidikan dan proses, serta inivasi dalam aspek sarana dan prasarana. Dengan sistem boarding school ini, terdapat tiga waktu pembelajaran yang harus diikuti siswa, yaitu sekolah formal sebagai intra pagi, intra sore, dan intra malam yang mengajarkan khusus ilmu-ilmu keagamaan.¹¹
6. Imam Zarkasyi dan Pembaharuan Pesantren: Rekonstruksi Aspek Kurikulum, Manajajemen, dan Etika Pendidikan, yang ditulis oleh Moh. Nurhakim dalam Jurnal Progresiva Vol. 5, No. 1 yang terbit pada Desember 2011. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana Imam Zarkasyi melakukan pembaharuan dalam sistem pondok pesantren. Pesantren modern, sebagaimana yang tergambarkan dalam pondok pesantren Darussalam Gontor merupakan bentuk pondok pesantren di ero modern seperti sekarang ini. Agar pesantren tidak tertinggal dengan pendidikan lainnya, pesantren menurutnya harus mau melakukan pembaharuan dalam aspek kurikulum, manajemen, dan tetap mempertahankan etika pesantren dalam bingkai

10 Sahidin, "Pembaharuan Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

11 Mohammad Jakfar, "Inovasi Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Islam Bersistem Boarding School di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

kemodernan. Kurikulum pesantren dengan standar 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum menjadi prinsip pengembangan pesantren. Dalam hal manajemen, kepemimpinan pesantren diarahkan agar lebih terbuka dan bercorak kolektif sehingga kepemimpinan itu tidak mengacu hanya pada satu orang.¹²

7. Pembaharuan Pendidikan Pesantren dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional, yang ditulis oleh Amrizal dalam Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No.02 yang terbit pada periode Juli-Desember 2011. Dalam artikel ini, ia memaparkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia mempunyai kontribusi yang besar terhadap masyarakat. Namun demikian, tujuan dan kurikulum pesantren yang masih berorientasi pada nilai ukhrowi semata menjadikan lembaga pesantren terpinggirkan oleh lembaga-lembaga pendidikan modern. Agar tetap survive dalam arena percaturan dunia global, maka menurutnya pesantren harus mau mengadopsi kurikulum baru. Rekonstruksi kurikulum pesantren menurutnya menjadi suatu hal yang mutlak agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan global. Selain itu, pesantren juga harus melakukan reorientasi tujuan, dengan juga mengarahkan tujuan pendidikannya pada aspek duniawiyah, tidak hanya ukhrowiyah.¹³
8. Manajemen Integrasi Kurikulum (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri), yang ditulis oleh Iman Alimansyah sebagai tesis pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen integrasi kurikulum di pondok pesantren Ibnul Qoyyim putri meliputi aktifitas manajemen pada umumnya yaitu perencanaan (planning),

¹² Moh. Nurhakim, Imam Zarkasyi dan Pembaharuan Pesantren: Rekonstruksi Aspek Kurikulum, Manajemen, dan Etika Pendidikan, *Jurnal Progresiva* Vol. 5, No. 1, 2011.

¹³ Amrizal, Pembaharuan Pendidikan Pesantren dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Sosial Budaya*, Volume. 8 No.02, 2011.

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengontrolan (controlling). Aktivitas manajemen tersebut meliputi seluruh unsur atau komponen yang ada di pondok pesantren Ibnul Qoyyim putri tersebut. Sedangkan kurikulum pondok pesantren yang diajarkan merupakan hasil integrasi kurikulum yang terdiri dari kurikulum Kemendikbud, Kemenag, pondok modern Darrussalam Gontor dan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki. Pengimplementasian kurikulum integrasi di pondok pesantren Ibnul Qoyyim putri tersebut memiliki faktor pendukung dan juga faktor penghambat, diantaranya sarana dan prasarana, wali murid, masyarakat, tenaga pendidik serta berbagai tuntutan sistem pendidikan pemerintah seperti UN dan UAMBN.¹⁴

9. Dinamisasi Pendidikan Pesantren; Studi Pemikiran Modernisasi Pondok Pesantren KH. Abdurrahman Wahid, yang ditulis oleh Rohani yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Qalam Volume XIII edisi Desember 2014. Penulis mengatakan bahwa dunia pendidikan Islam yang sekrang berada dalam posisi yang problematik perlu untuk dicarikan jalan keluar. Keterkurungan pendidikan Islam dalam idealisme kejayaan masa lalu Islam (Determinisme Historis) dan keseimbangan dalam menghadapi kenyataan dunia modern (Realisme Praktis) mengharuskan adanya dinamisasi dalam dunia pendidikan Islam, terutama pesantren. Dinamisasi ini dimaksudkan untuk menggalakkan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada dan pergantian nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai baaru yang lebih sempurna. Namun demikian, dinamisasi dan transformasi ini harus dijalankan dengan pertimbangan dan kesiapan yang matang, tidak serampangan terutama dalam menerapkan konsep-konsep kemodernan yang berkiblat pada kebudayaan barat. Langkah-langkah

¹⁴ Iman Alimansyah, "Manajemen Integrasi Kurikulum (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

dinamisasi pendidikan Islam (Pesantren) ini adalah pembaharuan substansi atau isi kurikulum pendidikan Islam, pembaharuan manajemen dan metodologi, pembaharuan kelembagaan termasuk kepemimpinan dan diverifikasi lembaga, serta pembaharuan dan pengembangan fungsi pesantren dari sekedar tafaqquh fi ad-din menjadi lembaga untuk transformasi masyarakat.¹⁵

10. Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren, yang ditulis oleh Siswanto yang diterbitkan dalam Jurnal Studi Keislaman Ulumuna, Volume 10 Nomor 1 periode Juni 2014. Dalam artikel ini penulis menghendaki adanya keterbukaan dan akomodasi madrasah terhadap aspirasi dari masyarakat sebagai bentuk sikap dan respon terhadap perkembangan zaman. Hal itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai pokok dari pesanten, khususnya di Indonesia yang merupakan rahim kelahiran madrasah. Keberadaan madrasah sekarang ini semacam memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama madrasah yang masih berada dalam lingkup pesantren. Keberadaannya diharapkan oleh banyak kalangan dapat menelurkan generasi-generasi yang selain unggul dalam bidang ilmu dan teknologi, juga memiliki jiwa religiusitas yang kuat. Konsep ini diarahkan untuk menciptakan suatu madrasah unggulan yang berlandaskan tradisi pesantren dengan memadukan keunggulan dalam bidang intelektual dan keterampilan dengan keunggulan dalam bidang pengetahuan keagamaan dan karakter religiusitasnya. Untuk merealisasikan konsep tersebut, madrasah dan pesantren perlu berbenah diri dan memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah komitmen madrasah untuk mejadi lembaga yang unggul dengan menerapkan dasar-dasar profesionalisme dalam sistem

¹⁵ Rohani, Dinamisasi Pendidikan Pesantren; Studi Pemikiran Modernisasi Pondok Pesantren KH. Abdurrahman Wahid, *Jurnal Al-Qalam*, volume XIII, 2014.

yang dijalankan dalam madrasah. Perlu ada reorientasi juga terhadap pola kepemimpinan dalam pesantren yang melingkupi madrasah, selain itu juga madrasah juga perlu membangun image agar semakin dilirik oleh masyarakat. Jika performance yang ditampilkan madrasah mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau stakeholders, maka saat itulah madrasah tersebut dapat dikatakan unggul.¹⁶

Dari beberapa literature review yang telah disajikan di atas, hampir semuanya membicarakan tentang pembaharuan pesantren, baik itu pada aspek sistem, tujuan, kurikulum, manajemen atau metode pengajaran dalam pesantren. Pembaharuan pada aspek-aspek tertentu atau secara keseluruhan dalam pandangan umum merupakan keharusan bagi pesantren agar selain tetap eksis, pesantren juga mampu mengimbangi tuntutan dunia global. Bentuk pembaharuan yang dibahas secara umum juga mengarah pada pengadopsian pengetahuan umum dalam sistem pendidikan pesantren. Pembaharuan tersebut muncul dengan berbagai corak, namun yang paling umum diharapkan adalah adanya sekolah umum atau paling tidak pengajaran pengetahuan umum dalam sistem pesantren, serta memperbaharui hampir semua aspek dalam pesantren.

Kesemuanya literatur yang disajikan di atas menghendaki adanya pembaharuan dalam sistem pendidikan pesantren. Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul di atas. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk melihat seberapa jauh pembaharuan yang dilakukan oleh pesantren secara umum dan apa dampak yang diakibatkan dari proses tersebut. Dengan kata lain, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah memberikan evaluasi terhadap proses pembaharuan yang digembor-gemborkan oleh banyak kalangan. Dari situ peneliti berharap dapat menemukan aspek-aspek apa saja yang seharusnya tetap dikembangkan, aspek mana yang perlu diperkuat, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam sistem baru pendidikan pesantren tersebut.

16 Siswanto, Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren, *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna* Volume 18 No.1 Tahun 2014.

B. Kerangka Teori

1. Pendidikan Islam

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.¹⁷ Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan menciptakan pola tingkah laku tertentu pada peserta didik, yang mana proses tersebut diusahakan oleh seorang pendidik.¹⁸

Dalam diskursus Pendidikan Islam, terdapat cukup banyak istilah yang dapat merujuk pada pengertian pendidikan, tiga diantaranya menempati urutan teratas sebagai istilah yang paling diamini dan paling sering dipakai untuk menunjukkan sebuah proses pendidikan. Tiga istilah tersebut adalah tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib.¹⁹ Jika dilihat sekilas, ketiga istilah tersebut sama-sama relevan untuk dipakai untuk menunjukkan suatu proses pendidikan, namun bila diperinci lebih dalam ketiganya memiliki cakupan-cakupan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Tarbiyah, secara etimologi memiliki cukup banyak arti, karena kata ini mempunyai akar kata yang cukup banyak. Beberapa diantaranya adalah pendidikan, pengembangan, pengajaran, perintah, pembinaan kepribadian, memberi makan, atau mengasuh anak.²⁰ Kata tarbiyah jika dimaksud untuk menunjukkan pendidikan Islam menurut beberapa pendapat menunjukkan suatu proses yang utamanya terjadi

¹⁷ UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003.

¹⁸ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Husna, 1986), hlm. 32.

¹⁹ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm. 70.

²⁰ Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 33.

pada fase pertama pertumbuhan manusia, atau ketika seorang anak masih berada pada fase bayi atau anak-anak. Pendidikan Islam dengan menggunakan istilah tarbiyah memiliki fokus penekanan pada bimbingan anak supaya berdaya dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara sempurna, baik ilmu maupun akhlakunya.²¹

Sedangkan kata ta'lim secara etimologi berasal dari kata allama yang berarti mengajar, atau dapat diartikan sebagai proses transfer ilmu.²² Menurut pendapat Abdul Fattah Jalal, istilah ta'lim mempunyai jangkauan yang lebih luas dan memiliki cakupan yang lebih umum dari pada istilah tarbiyah.²³ Ia mendefinisikan ta'lim sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, penanaman amanah, sehingga menjadikan diri manusia berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ta'lim menunjukkan suatu proses yang lebih universal dari pada tarbiyah, karena di dalam ta'lim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan serta pedoman perilaku baik yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupannya.²⁴

Istilah selanjutnya yang dipakai untuk menunjukkan suatu proses pendidikan adalah ta'dib. Secara bahasa, ta'dib berasal dari kata addaba yang berarti melatih dengan akhlak yang baik, sopan santun, tata cara melaksanakan sesuatu dengan baik serta mendidik, sedangkan ta'dib berarti pendidikan.²⁵ Kata ta'dib juga dapat dilihat dari kata adab yang berarti moral, etika dan adab, atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Peradaban dalam bahasa Inonesia juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu adab, sehingga aktifitas pendidikan – dengan menggunakan terminologi ta'dib – merupakan upaya membangun peradaban

21 M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

22 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto.....*, hlm. 34.

23 M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi*, hlm. 44.

24 *Ibid.*, hlm. 47

25 *Ibid.*, hlm. 44-51.

atau perilaku beradab (civilization) yang berkualitas di masa depan.²⁶

Menurut Naquib al-Attas, ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan tuhan dalam tatanan wujud dan keberadaannya.²⁷ Istilah ta'dib menurutnya merupakan terminologi yang paling cocok dan paling relevan untuk menunjukkan konsep dan aktivitas pendidikan Islam, karena istilah ta'dib tidak hanya mengisyaratkan suatu proses transfer ilmu atau pengajaran, istilah ini juga hanya meliputi manusia sebagai objeknya.²⁸ Adab adalah disiplin tubuh, jiwa, dan ruh; disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual dan ruhaniah.²⁹ Penekanan adab mencakup amal dan ilmu sehingga mengkombinasikan ilmu dan amal serta adab secara harmonis. Titik tekan yang diutamakan dalam terminologi ta'dib adalah pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemandirian amal dan tingkah laku yang baik.³⁰

Merujuk pada tiga istilah yang telah dijabarkan definisinya secara sederhana di atas, dalam tulisan ini penulis lebih condong untuk menggunakan istilah ta'dib sebagai terminologi yang dimaksudkan untuk menunjukkan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu tahapan atau proses yang di dalamnya terdapat tiga unsur pokok, yaitu penerima, kandungan dan proses.³¹ Penerima dalam hal ini

26 Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 13.

27 Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Haidar Bagir, (Bandung : Penerbit Mizan, 1992) hlm. 61-62. lihat juga dalam M. Ridwan Nashir, *Mencari Tipologi* , hlm. 51.

28 Hasan Langgulung, *Asas-Asas*....., hlm. 3.

29 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto*....., hlm. 34.

30 M. Ridwan Nashir, *Mencari Tipologi* , hlm. 53.

31 Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan*....., hlm.

yang dimaksud adalah manusia sebagai objek yang menerima pendidikan, dan bukan hewan. Pendidikan Islam dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu proses dan tahapan untuk seorang manusia saja, bukan yang lainnya. Oleh karenanya istilah ta'dib merupakan istilah yang paling tepat untuk menunjukkan makna pendidikan di sini, bukan tarbiyah yang juga dapat dipakai untuk menunjukkan selain manusia.³²

Unsur dasar yang kedua dalam pendidikan adalah kandungan dari pendidikan itu sendiri. Dalam pendidikan Islam, kandungan isi dari apa yang diajarkan atau ditanamkan kepada seorang sebagai subjeknya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan. Kandungan isi dalam pendidikan Islam harus mempunyai kekhasan dari pada sekedar pendidikan pada umumnya. Menurut al-Attas, harus ada sesuatu di dalam pendidikan yang jika tidak di tanamkan, tidak akan membuat pengajaran serta proses belajar dan asimilasinya sebagai proses pendidikan. Pengajaran dan proses mempelajari keterampilan saja betapapun ilmiahnya proses tersebut belum berarti pendidikan jika kandungan "sesuatu"nya belum terjamah.³³

Hal tersebut didasarkan bahwa dalam pandangan Islam, manusia selain mempunyai dimensi fisik dan akal juga mempunyai dimensi ruhaniah yang merupakan substansi dari seorang manusia itu sendiri.³⁴ Oleh karenanya, "sesuatu" yang dimaksud sebagai kandungan pendidikan tersebut adalah suatu hal yang dapat mengisi dimensi ruhaniah manusia tersebut. Al-Attas menyebutkan "sesuatu" itu merupakan pengetahuan tentang tujuan dari pencariannya. Lebih dari itu, kandungan dalam pendidikan juga harus mampu menggerakkan manusia sebagai objek pendidikan untuk melakukan tindakan dan tingkah laku yang sesuai dengan pengenalan dan pengakuannya.³⁵ Pengenalan berarti menemukan tempat yang tepat sehubungan dengan apa yang

³² *Ibid.*, hlm. 65-66.

³³ *Ibid.*, hlm. 41.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

dikenalnya, dan pengakuan berarti tindakan yang bertalian dengan pengenalan tersebut yang ditampilkan dalam bentuk amal atau perilaku sehari-hari, yang lahir sebab menemukan tempat yang tepat dari apa yang dikenalnya.³⁶

Unsur dasar ketiga yang terdapat dalam pendidikan adalah proses. Umumnya unsur inilah yang selalu ditonjolkan ketika berbicara tentang pendidikan, namun menurut al-Attas ada yang lebih penting dari proses, yaitu kandungan.³⁷ Namun demikian, proses tetap merupakan satu unsur yang penting dalam pendidikan. Berkenaan dengan itu, penting kiranya menemukan konsep yang tepat untuk menggambarkan proses pendidikan yang sesuai dengan Islam, dan dari situlah al-Attas lebih memilih terminologi ta'dib dari pada tarbiyah.

Ta'dib yang mempunyai akar kata *adab* merupakan disiplin tubuh, jiwa dan ruh. Terminologi ini mencakup dimensi-dimensi manusia dalam kaitannya dengan proses pengembangan, yaitu kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual serta dimensi ruhaniyah.³⁸ Perbedaan konsep tarbiyah sebagai terminologi pendidikan Islam dengan konsep ta'dib adalah bahwa dalam konsep tarbiyah lebih ditonjolkan kualitas kasih sayang (rahmah) dan bukan pada pengetahuan ('ilm). Sedangkan pada terminologi ta'dib, pengetahuan lebih ditonjolkan dari pada kasih sayang. Dalam struktur konseptual, ta'dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan ('ilm), pengajaran (ta'lim) dan pengasuhan yang baik (tarbiyah).³⁹ Oleh karena itu sudah cukup kiranya menggunakan terminologi ta'dib untuk menunjukkan konsep pendidikan Islam, karena di dalamnya sudah mencakup terminologi tarbiyah dan ta'lim. Dengan konsep ta'dib ini diharapkan mampu melahirkan dan memberikan tuntunan adab bagi manusia sebagai objek pendidikan, dan dengannya akan lahir suatu peradaban Islami yang unggul.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 74-75.

2. Pondok Pesantren dan Madrasah

a. Pondok Pesantren

Secara umum, pondok pesantren dikenal sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang khusus memberikan pendidikan dan pengajaran tentang ilmu agama Islam. Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia lahir bersamaan dengan datangnya Islam di Indonesia. Tidak dapat dipastikan kapan pesantren mulai didirikan pertama kali dan dimana tempat pertama kali berdirinya pesantren. Cukup banyak pendapat yang menyebutkan kapan pesantren mulai didirikan dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI sebagaimana dikutip oleh Mastuhu menyebutkan bahwa pesantren tertua yang pertama kali didirikan adalah pesantren Jan Tampes II pada tahun 1062 M. Akan tetapi pendapat ini diragukan karena tentunya terdapat pesantren Jan Tampes I sebelum ada pesantren Jan Tampes II.⁴⁰ Pendapat lain menyebutkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan dan dakwah yang pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M. Lembaga ini digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Raden Rahmat atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel.⁴¹

Terlepas dari kapan pondok pesantren pertama kali didirikan, namun lembaga ini diakui sebagai lembaga pendidikan Islam indigenous, yaitu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling asli di Indonesia. Selain identik dengan makna keislaman – karena memang pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan ilmu agama –, keberadaan pesantren juga identik dengan

⁴⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 19.

⁴¹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Global: Resistensi Tradisional Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 106.

makna keaslian Indonesia.⁴² Pesantren memiliki peran yang strategis dalam rangka penyebaran Islam pada awal masuknya Islam di Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai tempat pendalaman ilmu-ilmu agama sekaligus tempat pengkaderan ulama atau mubaligh sebagai penyebar agama Islam di Indonesia.

Istilah pondok pesantren terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pondok diartikan sebagai bangunan untuk tempat sementara; bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang berdinding bilik dan beratap rumbia (untuk tempat tinggal beberapa keluarga).⁴³ Zamakhsari Dhofier mengidentifikasi kata pondok tersebut berasal dari kata arab, funduq, yang memiliki arti hotel atau asrama. Ia menyimpulkan bahwa pondok merupakan asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang di buat dari bambu.⁴⁴

Sedangkan kata pesantren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁵ diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji.⁴⁵ Jika ditinjau dari segi bahasa, kata pesantren oleh para ilmuwan diidentifikasi memiliki beberapa asal kata. Kata pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan pe dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Prof. John berpendapat bahwa kata pesantren berasal dari kata santri yang merupakan bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sementara itu, C.C. Berg berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa India shastri yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama

42 Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), hlm. 3.

43 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1093.

44 Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 41.

45 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa.....*, hlm. 1064.

atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.⁴⁶

Berdasarkan asal kata yang berkaitan dengan pesantren, juga berdasarkan sistem dan bentuknya, sebagian ilmuwan menyebut pesantren berasal dari India. Lembaga yang mirip dengan pesantren digunakan sebelum ada proses penyebaran Islam di Indonesia, dimana lembaga yang demikian tersebut digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa.⁴⁷ Ada juga yang berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan di nusantara pada masa Hindu-Budha yang bernama “mandala”. Lembaga tersebut kemudian diadopsi menjadi lembaga pendidikan Islam ketika Islam mulai masuk di Indonesia dengan beberapa penyesuaian pada bagai-bagian tertentu yang dilakukan oleh para pemuka agama Islam waktu itu.⁴⁸ Meski begitu, anggapan-anggapan bahwa dari segi bahasa, bentuk dan sistem pendidikan pesantren bukan berasal dari Islam tersebut dapat dibantah. Baik bentuk maupun sistemnya, juga hal-hal yang melingkupi pesantren lainnya merupakan bentuk yang sudah ada dalam dunia Islam.⁴⁹ Jadi, menganggap sepenuhnya bahwa pesantren merupakan warisan dari kebudayaan Hindu-Budha tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karna pada kenyataannya dalam dunia Islam bentuk dan sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren juga sudah ada.

Pondok pesantren dapat dimaknai sebagai lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Pondok pesantren merupakan suatu sistem atau lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang lahir jauh sebelum

46 Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*....., hlm. 41.

47 Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 20.

48 Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*....., hlm. 41.

49 Karel A. Steenbrink, *Pesantren*....., hlm. 22-23.

adanya sistem pendidikan lain di Indonesia.⁵⁰ Metode pengajaran yang lazim digunakan dalam sistem pesantren adalah metode *sorogan*⁵¹ atau *bandongan*.⁵² Selain itu, masih ada juga metode dalam bentuk diskusi yang disebut dengan “kelas musyawarah” yang biasanya hanya diikuti oleh santri senior.⁵³ Dalam “kelas musyawarah” tersebut dibahas beberapa aspek dalam sebuah kitab yang telah dibacakan oleh seorang guru atau kyai, diantaranya gramatika bahasa dan kandungan isi yang termuat dalam kitab yang bersangkutan.

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain seperti sekolah. Dalam pesantren terdapat unsur-unsur yang tidak akan ditemukan dalam sekolah atau lembaga pendidikan lain. Keberadaan unsur-unsur tersebut merupakan elemen penting terhadap berjalannya sistem pembelajaran di pondok pesantren. Umumnya suatu pondok pesantren pasti memiliki unsur-unsur tersebut, namun tentu antara satu pesantren dengan yang lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan besar-kecilnya pesantren yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut antara lain⁵⁴

1. Masjid, sebagai tempat kegiatan santri mulai dari shalat jama'ah lima waktu, pengajian kitab dan kegiatan-kegiatan lain. Masjid merupakan elemen yang tidak

50 Departemen Agama Republik Indonesia, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 9.

51 Metode sorogan adalah metode pengajaran secara individual yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya secara bergantian. Dalam metode ini, seorang murid mendatangi guru untuk membacakan beberapa baris Qur'an atau kitab-kitab tertentu yang sebelumnya telah dibacakan oleh guru yang bersangkutan. Metode ini biasanya diberikan kepada santri atau murid baru yang masih memerlukan bimbingan secara individual. Lihat Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*..., hlm. 53-54.

52 Metode bandongan seringkali disebut juga dengan metode weton. Dalam metode ini sekelompok santri atau murid bertugas memperhatikan, mendengarkan dan bila perlu mencatat apa yang dibaca, diterjemahkan dan dijelaskan oleh seorang guru atau kyai pada kitab tertentu. Lihat Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*..., hlm. 54.

53 Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*..., hlm. 57-58.

54 *Ibid.*, hlm. 79-99.

dapat dipisahkan dari pesantren.

2. Pondok atau asrama, sebagai tempat tinggal santri yang berada dalam lingkungan komplek pesantren.
3. Pengajaran kitab Islam klasik, yang merupakan kegiatan inti pendidikan pesantren. Biasanya terdiri dari pengajaran al-Qur'an dan kitab-kitab berbahasa arab yang disesuaikan dengan tingkatan tertentu atau jenis cabang ilmu yang dikuasai oleh kyai. Selain itu diajarkan pula tata cara berwudhu, shalat dan ibadah-ibadah lain serta beberapa amalan.
4. Santri, yang merupakan sekumpulan orang yang berasal dari berbagai daerah yang berkumpul menyatu disuatu pondok tertentu. Berdasarkan tradisi pesantren, santri terbagi menjadi dua jenis yaitu santri mukim atau santri yang menetap di pondok karena berasal dari daerah yang jauh dari lokasi pondok, dan santri kalong yang merupakan murid-murid yang bersal dari sekitar pondok pesantren yang tidak perlu menginap di pondok pesantren tempat ia mengaji.
5. Kyai, yang merupakan unsur paling penting dari suatu pondok pesantren. Biasanya ia merupakan pendiri pesantren atau putra dari pendiri pesantren yang menjadi sosok sentral-pemimpin arah pesantren.

Pola yang ada antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya secara umum hampir sama, hal itu didasarkan pada keberadaan unsur-unsur pesantren di atas. Pola tersebut tetap bertahan hingga sampai akhir abad XIX, dimana pesantren mulai berkembang karena persinggungannya dengan sistem sekolah atau madrasah.⁵⁵ Persinggungan ini dan ditambah dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam dunia pesantren melahirkan pola atau tipe-tipe baru pondok pesantren. Pondok pesantren yang dahulu cukup dikenal dengan hanya satu jenis, kini memiliki beberapa tipe yang berbeda. Pondok

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pondok Pesantren...*, hlm. 14.

pesantren diklasifikasikan menjadi beberapa tipe atau jenis berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan bentuk dan jenis pendidikannya, umumnya pesantren dikenal ke dalam dua kategori, yaitu pesantren salaf/klasik/tradisional dan pesantren khalaf/modern. Dua jenis pesantren itulah yang sekarang ini masyhur dikenal dan sering dijadikan perbandingan antara keduanya. Secara lebih spesifik, Ridlwan Nashir mengklasifikasikan pesantren ke dalam lima jenis, yaitu:⁵⁶

1. Pondok pesantren salaf/klasik, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf dengan metode sorogan dan bandongan, serta terdapat pula sistem klasikal (madrasah) salaf.
2. Pondok pesantren semi berkembang, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan pesantren salaf dan sistem klasikal madrasah swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum.
3. Pondok pesantren berkembang, yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih bervariasi dalam bidang kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum. Di samping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan diniyah.
4. Pondok pesantren khalaf/modern, yaitu seperti bentuk pondok pesantren berkembang, hanya saja lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, anatara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek membaca kitab salaf), perguruan tinggi baik umum maupun agama, bentuk koperasi dan dilengkapi dengan takhasus bahasa Aeab dan Inggris.
5. Pondok pesantren Ideal, yaitu sebagaimana bentuk pondok pesantren modern hanya saja lembaga pendidikan yang ada lebih lengkap, terutama pada

⁵⁶ M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi.....*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

bidang keterampilan. Keberadaan jenis pendidikan tersebut disyaratkan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Selain itu, pengklasifikasian pesantren juga dapat dilihat dari persentuhannya dengan sistem sekolah. Berdasarkan persentuhan sistem pesantren dengan sistem sekolah, pesantren dapat dikategorikan ke dalam empat tipe, yaitu 1) pesantren yang sepenuhnya dilaksanakan secara tradisional; 2) pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal; 3) pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar pesantren; dan 4) pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren sekaligus menyelenggarakan sistem sekolah atau madrasah.

Berdasarkan pengklasifikasian di atas, banyak sekali tipe atau pola dalam melihat pesantren. Tipe atau pola tersebut juga merupakan generalisasi dari bentuk-bentuk pesantren yang ada secara umum, bisa jadi masih terdapat tipe atau pola pesantren selain yang telah disebutkan di atas. Generalisasi semacam ini merupakan hal yang lumrah, mengingat begitu banyaknya pesantren dengan spesifikasi dan bentuk yang berbeda, mulai dari segi fisik maupun isinya. Dari pemaparan sederhana tentang pondok pesantren tersebut, maka perlu kiranya dalam penelitian ini dijelaskan pondok pesantren seperti apa yang akan menjadi objek penelitian, utama terkait dengan pengklasifikasian pesantren di atas.

Mengingat begitu banyaknya jenis pesantren yang ada sekarang ini, tentu menjadi hal yang cukup sulit jika harus melihat semua jenis pesantren tersebut. Terlebih lagi, dalam penelitian ini tidak semua unsur pesantren menjadi objek penelitian. Penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada sinergitas antara pesantren dan madrasah. Maka dalam penelitian ini tipe atau pola pesantren yang akan menjadi objek penelitian adalah pesantren yang

masih menggunakan sistem salaf, dimana di dalamnya masih kental dengan nuansa asli pesantren yaitu pengajian kitab kuning sebagai bentuk tafaquh fi ad-dien seorang santri. Selain itu, dalam sistem pesantren tersebut terdapat madrasah swasta atau negeri yang mengajarkan pendidikan umum yang mengikuti pola SKB Tiga Menteri, yaitu madrasah yang prosentase kurikulumnya 70% umum dan 30% agama.

b. Madrasah

Dalam diskursus pendidikan Islam, istilah madrasah merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan. Keberadaannya sudah mengakar dan menjadi istilah khas Islam yang menunjukkan suatu lembaga pendidikan sejak sekian lama. Istilah tersebut ikut tersebar seiring meluasnya pengaruh Islam di belahan dunia, termasuk sampai di Indonesia. Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia juga tidak lepas dari penggunaan istilah madrasah untuk menunjukkan sebuah lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan maksud dalam penyebutan istilah madrasah di Indonesia jika dibandingkan dengan penyebutan istilah tersebut di tempat lain.

Jika kita mengupas akar kesejarahan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, maka kita harus kembali melihat sejarah masa lalu dimana kata madrasah pertama kali dipakai untuk menunjukkan suatu lembaga pendidikan, begitu juga perkembangannya. Memang benar bahwa pendidikan Islam sudah dimulai sejak lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun sistem yang digunakan masih sangat sederhana. Pada awal masa Islam tersebut, masjid merupakan tempat sentral untuk melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan. Sistem yang sangat sederhana tersebut terus berkembang mengikuti dinamika yang ada, sampai muncullah istilah madrasah untuk menunjukkan lembaga atau sistem pendidikan Islam yang dipelopori pada masa Bani Saljuk.

Pada abad pertengahan, Nizam al-Mulk yang merupakan Wazir Bani Saljuk mendirikan madrasah Nidzamiyah di Baghdad. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syi'ah serta untuk menyediakan pengajar-pengajar di kalangan Sunni. Pada masa itu, bentuk dan sistem yang kemudian disebut dengan madrasah ini menjadi trend yang hampir seluruh wilayah Islam menggunakannya. Bentuk madrasah ini merupakan hasil dari berbagai dinamika yang dilalui oleh sistem pendidikan Islam yang dimulai dari masjid, masjid khan, hingga kemudian muncul madrasah.⁵⁷ Bentuk dan sistem madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ini kemudian juga sampai di Indonesia, sehingga istilah tersebut juga berlaku di Indonesia, meskipun terdapat sedikit perbedaan.

Dalam sejarah dunia pendidikan Islam, madrasah menjadi istilah untuk menunjukkan suatu lembaga pendidikan secara umum, dimana di dalamnya terdapat proses pendidikan dan pengajaran yang cukup luas tanpa ada pengkhususan. Hal ini cukup berbeda dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, dimana madrasah pada awal berdirinya dikhususkan hanya sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama. Di dalam madrasah pada waktu itu tidak diajarkan pengetahuan selain pengetahuan agama, bahkan madrasah dianggap sebagai lawan atau bentuk penolakan terhadap pendidikan umum. Hal inilah yang membedakan antara madrasah dalam dunia pendidikan Islam secara umum dan madrasah yang ada di Indonesia. Madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah seecara umum, sedangkan di Indonesia hanya ditujukan untuk sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama, dan pada perkembangannya pada sekolah yang pengetahuan agama menjadi dasar atau ciri khasnya.⁵⁸

57 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), hlm. 31.

58 Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001), hlm. 59.

Madrasah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sekolah atau perguruan yang berdasarkan agama Islam.⁵⁹ Istilah madrasah pada dasarnya berasal dari kata Arab yang memiliki arti sekolah atau tempat belajar.⁶⁰ Di Indonesia, madrasah dikenal sebagai sekolah yang mempunyai ciri khas pendidikan agama Islam, karena di dalam madrasah pendidikan agama menjadi tuntutan utama pendidikannya. Di Indonesia, madrasah tidak begitu saja lahir, ia merupakan hasil dari dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, terutama kaitannya dengan pesantren.

Sejarah kelahiran dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Madrasah diyakini merupakan kelanjutan dari sistem pesantren yang telah dimodifikasi dan dikembangkan berdasarkan penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan menggunakan sistem klasikal.⁶¹ Jika tidak demikian, ia merupakan hasil dari interaksi seorang terhadap dunia luar dan ketidakpuasan terhadap pola pengajaran yang berlangsung dalam sistem pesantren. Upaya yang dilakukan oleh kaum muslim Indonesia yang telah mendapatkan pengalaman di luar Indonesia untuk melakukan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk lembaga madrasah. Semangat pembaharuan ini sedikit banyak disebabkan oleh terjadinya pembaharuan di dunia Islam di timur tengah pada waktu itu. Selain itu, umumnya madrasah juga lahir sebagai respon terhadap kebijakan dan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda.⁶²

Pemakaian istilah madrasah di Indonesia pertama kali digunakan oleh Abdullah Ahmad yang mendirikan

59 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa.....*, hlm. 853.

60 Haidar Putra Daulay, *Historisitas....* hal. 59. Lihat juga dalam M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi...* hlm. 90.

61 M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi...* hlm. 90.

62 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah....*, hlm. 34.

Madrasah Adabiyah. Madrasah ini merupakan madrasah pertama yang menggunakan sistem klasikal yang ada di Indonesia. Perjuangan pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Abdullah Ahmad kemudian diikuti oleh beberapa organisasi Islam seperti PERTI, Al Irsyad, Muhammadiyah, Jami'atul Washilah dan yang lainnya. Masing-masing organisasi keagamaan dengan tokohnya masing-masing mengembangkan madrasah dengan corak yang tidak jauh berbeda di beberapa daerah.⁶³ Bermunculannya madrasah di beberapa daerah tersebut juga menginspirasi KH. Hasyim Asy'ari yang diikuti putranya KH. Wahid Hasyim dan KH. Ilyas untuk memperbaharui pola pendidikan di pesantren. Maka kemudian dibukalah madrasah di pondok pesantren Tebuireng dengan penambahan materi umum berhitung dan ilmu bumi. Pembaharuan yang dilakukan di pondok pesantren tersebut kemudian banyak diikuti oleh banyak pondok pesantren di daerah-daerah lain.

Pada awalnya, istilah madrasah memang identik dengan pendidikan agama tanpa pendidikan umum. Namun pada perkembangannya, madrasah cukup fleksibel untuk memasukkan pendidikan umum ke dalam sistem madrasah. Hal itu berakar pada kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk mengarungi kehidupan di dunia, selain pentingnya pendidikan agama untuk penghayatan beribadah. Sampai saat ini, secara umum dikenal dua jenis madrasah yang ada di Indonesia, yaitu madrasah diniyah yang hanya mengajarkan pendidikan agama dan madrasah dalam artian umum yang selain mengajarkan pengetahuan agama juga mengajarkan pengetahuan umum. Pasca-kemerdekaan Indonesia, madrasah jenis kedua ini mendapat banyak perhatian dari pemerintah, terutama dalam aspek kurikulum. Hal ini dilakukan utamanya untuk memberikan pengakuan kesetaraan pada madrasah dengan sekolah umum, sehingga lulusan madrasah memiliki hak

63 Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren....*, hlm. 26-83.

yang sama seperti lulusan sekolah umum.

Bagi pesantren, lahirnya madrasah merupakan bukti bahwa pesantren bukanlah merupakan lembaga pendidikan yang anti terhadap perubahan dan perkembangan. Madrasah menjadi bukti bahwa pesantren memiliki fleksibilitas dalam menanggapi perkembangan zaman. Pembaharuan pesantren dengan melahirkan madrasah semakin menjadi daya tarik bagi pesantren-pesantren yang belum memiliki madrasah. Kecenderungan ini terus meluas hingga hampir sebagian besar pesantren memiliki madrasah, atau setidaknya satu madrasah untuk gabungan dari beberapa pesantren. Meskipun demikian, pada perkembangan selanjutnya madrasah tidak hanya lahir dari pesantren. Madrasah juga lahir dari tokoh masyarakat yang menganggap penting berdirinya madrasah bagi pendidikan masyarakat. Bahkan pemerintah juga ikut ambil bagian dalam hal pendirian madrasah dengan memberikan status negeri pada madrasah yang sudah ada ataupun mendirikan madrasah negeri baru. Hal ini menyebabkan munculnya banyak corak madrasah, seperti madrasah umum yang dikelola masyarakat, madrasah yang dikelola pemerintah ataupun madrasah dalam lingkup pesantren.

Munculnya corak-corak madrasah tersebut di atas tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika yang terjadi pada setiap masanya. Madrasah dalam hal ini selalu menyesuaikan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi waktu tertentu. Mulai dari masuknya sedikit demi sedikit pengetahuan umum dalam madrasah, sampai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang peningkatan kualitas madrasah sebagai dasar penyetaraan madrasah dengan sekolah umum.

Banyaknya corak madrasah tersebut tentu akan memberi sedikit hambatan pada proses penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Men-generalisir bentuk dan corak madrasah yang berbeda-beda ke dalam satu jenis akan membuat kekayaan dan ciri khas yang ada

dalam madrasah banyak yang terabaikan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini pembahasan yang berkaitan dengan madrasah secara umum dibatasi pada madrasah yang berada dalam lingkup pondok pesantren atau berkait-paut dengan pesantren. Selain karena posisinya yang berbeda dengan madrasah-madrasah lainnya, madrasah dalam lingkup pesantren ini memiliki dinamika tersendiri yang unik bila dibandingkan dengan madrasah di luar lingkup pesantren. Keberadaan pesantren dengan berbagai unsur dan kulturnya tentu menjadi hal lain yang tidak dimiliki oleh madrasah yang tidak berhubungan dengan pesantren. Oleh karenanya, pemilihan jenis atau corak madrasah ini dirasa memiliki nilai lebih dibandingkan dengan madrasah-madrasah lainnya.

3. Modernisasi Pendidikan Islam

Berbicara tentang modernisasi maka sesungguhnya kita sedang merenungkan sebuah penyesuaian agar kehidupan ini berada pada posisi yang semestinya. Kata modernisasi menunjukkan adanya sebuah proses yang sedang dijalani. Akar kata dari modernisasi adalah *modern* yang berarti terbaru atau mutakhir.⁶⁴ Dengan begitu, modernisasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu proses pencarian tentang apa saja yang sesuai dengan sebuah masa yang sedang dijalani.

Modernisasi juga dapat dipahami sebagai sebuah sikap dan cara berfikir yang sesuai dengan tuntutan zaman,⁶⁵ atau pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup dengan tuntutan masa kini.⁶⁶ Jadi, proses memasakinikan kehidupan tersebut tidak hanya meliputi sikap atau bahkan sekedar gaya hidup, melainkan juga meliputi pola pikir dan mentalitas untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamisnya kehidupan.

Nurcholish Madjid memberikan sudut pandang lain

64 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 924.

65 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto*, hlm. 16.

66 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar.....*, hlm. 924.

tentang modernisasi. Ia mensinonimkan makna modernisasi dengan makna rasionalisasi, yaitu proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang rasional. Proses perombakan tersebut dilakukan dengan menggunakan penemuan-penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan.⁶⁷ Berdasarkan pemahaman ini, penggunaan rasio atau akal merupakan suatu yang mutlak dalam sebuah proses menuju kehidupan modern.

Melihat sedikit definisi yang telah dipaparkan di atas, modernisasi menghendaki adanya kemajuan berpikir dan tata kerja baru dalam memandang dan melalui kehidupan ini. Pola berpikir dan tata kerja baru tersebut akan berdampak positif pada berbagai segi kehidupan yang dijalani oleh manusia. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam beberapa definisi tentang modernisasi di atas, tidak ada yang mengikutsertakan gaya hidup dalam ruang lingkup modernisasi. Modernisasi menekankan pada pembaharuan pola berfikir dan tata kerja, bukan pada gaya hidup dan sejenisnya.

Di kalangan masyarakat, terjadi kerancuan istilah dan pemaknaan antara modernisasi dan westernisasi. Substansi dari westernisasi seringkali dipakai untuk memberi makna pada modernisasi. Akibatnya, masyarakat menganggap bahwa westernisasi itulah yang merupakan suatu proses menuju kemodernan, dengan meniru cara hidup dan gaya hidup, tetapi melupakan pembaharuan terhadap pola berfikir dan tata kerja.

Secara esensial antara modernisasi dan westernisasi jelas berbeda. Dalam modernisasi tidak mencakup cara hidup dan gaya hidup barat, sedangkan westernisasi bermakna demikian. Westernisasi adalah suatu proses meniru, mengadaptasi, bahkan mengambil alih gaya hidup barat

⁶⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung : Mizan , 1997), hlm. 172.

secara radikal, tanpa ada filterisasi terlebih dahulu.⁶⁸ Hal mendasar inilah yang seharusnya diperhatikan oleh setiap orang ketika berbicara tentang memasakinikan kehidupan. Karena pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang mengatasnamakan tindakannya sebagai bentuk modernisasi, namun sejatinya yang dilakukan adalah westernisasi atau proses meniru dan menerapkan gaya kehidupan Barat.

Modernisasi tidak mesti menghilangkan identitas kultural yang dimiliki. Berkaca pada modernisasi yang dilakukan oleh Turki, yang secara radikal dan ekstrim memaknai modernisasi dengan westernisasi mulai dari hal-hal kecil sampai dengan agenda besar dan serius yang mengakibatkan Turki tercerabut dari masa lalunya.⁶⁹ Modernisasi tetap dapat dilakukan dengan berakar pada budaya bangsa masa lalu, yang merupakan kekayaan intelektual dan kekayaan budaya suatu bangsa. Ketidakmampuan suatu bangsa menafsirkan dan memahami masa lalunya akan menjadikan bangsa tersebut berada dalam kemiskinan intelektual.

Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses memasakinikan pendidikan Islam tidak mengharuskan kita untuk meninggalkan khazanah keilmuan Islam masa lalu. Modernisasi pendidikan Islam justru harus didasarkan pada khazanah masa lalu yang dimiliki oleh pendidikan Islam itu sendiri, dan kemudian diikuti dengan proses rasionalisasi terhadap apa saja yang dirasa relevan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Paradigma seperti inilah yang harus ditanamkan dan dikuatkan dalam diri insan Indonesia, terlebih lagi bagi insan pendidikan Islam Indonesia. Hal ini tentu saja dapat dilakukan jika suatu bangsa memiliki optimisme dan meyakini bahwa setiap bangsa mempunyai kemungkinan untuk melakukan modernisasi sendiri tanpa harus meniru

68 Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 198.

69 Yasmadi, *Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hlm. 127-129.

atau mengikuti pola yang sudah ada dari bangsa lain. Karena pada dasarnya, modernisasi dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, tanpa ada batasan ruang dan waktu.⁷⁰

4. Sinergi Dalam Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi diartikan sebagai sebuah kegiatan atau operasi gabungan.⁷¹ Menurut Hampden-Turner sebagaimana dikutip oleh Sulasmi, sinergi berasal dari kata syn-ergo, suatu kata Yunani yang berarti kerjasama.⁷² Kata sinergi sering digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan kerjasama atau kolaborasi antara dua unsur atau lebih untuk menciptakan suatu pola yang baru. Umumnya suatu proses kerjasama atau sinergi ini ditujukan untuk menciptakan suatu aktivitas baru dalam rangka memperoleh keunggulan dalam bersaing.

Stephen R. Covey menyatakan bahwa makna dari sinergi lebih dari sekedar kerjasama. Menurutnya, bersinergi adalah menciptakan suatu solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama. Proses atau kegiatan tersebut olehnya disebut dengan istilah “creative cooperation”, dimana dari sebuah proses kerjasama tersebut akan melahirkan suatu hal yang kreatif sebagai hasil dari perkumpulan ide-ide kreatif dari masing-masing anggota. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam sebuah kerjasama bukan hanya kebersamaan yang menjadi tujuannya, tetapi juga untuk membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing anggota hingga membentuk suatu kreativitas kolektif.⁷³

Secara sederhana Covey mengartikan sinergi dengan “keseluruhannya lebih besar dari pada jumlah

70 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto*, hlm. 32.

71 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar....*, hlm. 1312.

72 Siti Sulasmi, “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi” *Jurnal Ekuitas*, Volume 13, Nomor 2, Periode Juni 2009, hlm. 219.

73 *Ibid.*, hlm. 220.

bagian-bagiannya".⁷⁴ Pernyataan tersebut menggambarkan sebuah interaksi, kerjasama, dan saling ketergantungan dari beberapa anggota dimana hasil yang didapat akan lebih besar dari pada jumlah hasil individu yang digabungkan menjadi satu. Covey menggambarkan yang demikian tersebut dengan $1+1$ tidak sama dengan 2, tetapi $1+1=3$, 8, 100, dan bahkan bisa lebih besar dari angka tersebut. Sejalan dengan Covey, Husaini Usman memberikan gambaran tentang sinergi dengan istilah "hasil bekerja bersama-sama lebih besar dari pada bekerja sendiri-sendiri". Ia memaparkan juga bahwa sinergi hakikatnya hampir sama dengan koordinasi, yaitu proses mengintegrasikan, memadukan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁷⁵

Sinergi adalah tingkatan paling tinggi dari sebuah komunikasi atau kerjasama antara dua unsur atau lebih yang masing-masing berbeda. Intisari dari sinergi sebagaimana diungkapkan oleh Covey adalah menghargai perbedaan, membangun kekuatan, serta mengimbangi kelemahan. Untuk mencapai pada tingkatan tersebut, maka dalam proses sinergi tersebut mensyaratkan adanya rasa saling percaya, rasa aman dari semua anggota, serta keterbukaan yang tulus.⁷⁶ Tanpa adanya rasa saling percaya, rasa aman dan keterbukaan tersebut maka akan sulit terjalin sinergi yang kreatif yang menghasilkan energi membangun dan mengimbangi. Ketiga syarat tersebut menjadi hal yang vital dalam sebuah hubungan sinergi, karena dalam prosesnya sinergi merupakan suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.⁷⁷

⁷⁴ Stephen R. Covey, *The 7 Habits Of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif)*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), hlm. 298.

⁷⁵ Husaini Usman, *Manajemen: TeoriPraktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 488-491.

⁷⁶ Stephen R. Covey, *The 7 Habits....*, hlm. 299.

⁷⁷ Siti Sulasmi, "Peran Variabel.....", hlm. 224.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sinergi merupakan sebuah kegiatan gabungan, kolaborasi, atau kerjasama yang dilakukan oleh dua unsur atau lebih yang berbeda yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal atau tujuan bersama yang bernilai tinggi. Sinergi mengisyaratkan sebuah hasil yang jumlahnya lebih besar, lebih tinggi, atau lebih berkualitas karena dikerjakan dalam lingkup yang kolektif dan kreatif, dibandingkan dengan jumlah yang dihasilkan dari masing-masing yang dikerjakan secara individual.

Dalam lingkup dunia pendidikan, sinergi ini dapat dilakukan setidaknya dalam dua bentuk, yaitu sinergi keilmuan dan sinergi kelembagaan. Hal ini bukan berarti membenarkan adanya dikotomi dalam dunia pendidikan, namun justru sebagai usaha mengintegrasikan agar saling memahami dan menyeimbangi satu dengan yang lainnya. Karena diakui atau tidak persepsi yang demikian itu telah tertanam matang dalam pandangan masyarakat. Terdapat istilah pengetahuan agama dan pengetahuan umum sebagai bukti adanya persepsi yang tampak dikotomik tersebut. Dalam lingkup kelembagaan juga demikian, ada anggapan tersendiri bagi pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mewakili pendidikan Islam, dan sekolah umum bagi lembaga pendidikan selain madrasah dan pesantren. Hal ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja seolah hal tersebut tidak ada.

Sinergi keilmuan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dan men-salingterkait-kan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Hal ini sudah mulai diinisiasi oleh salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam dengan menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi. Paradigma ini pada hakikatnya ingin menunjukkan bahwa antara berbagai bidang keilmuan sebenarnya saling memiliki

keterkaitan dan saling melengkapi.⁷⁸ Paradigma yang demikian ini berusaha mengakomodasi “kesenjangan” yang nampak terjadi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan paradigma yang demikian ini, diharapkan pendidikan dapat dilakukan secara komprehensif yang mengakomodasi dan dan mengintegrasikan dua cabang keilmuan tersebut.

Sedangkan sinergi kelembagaan merupakan suatu usaha mengintegrasikan dua atau lebih lembaga pendidikan yang masing-masing dianggap memiliki kelebihan. Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki masing-masing lembaga, kemudian dikolaborasikan menjadi satu untuk dicarikan alternatif yang lebih baik untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. Kolaborasi atau kerjasama tersebut diupayakan tidak untuk saling menjatuhkan atau mencari kelemahan satu dengan yang lainnya, tetapi untuk memaksimalkan potensi masing-masing dalam lingkup sinergitas sehingga mampu mencetak generasi yang memiliki keunggulan secara komprehensif.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷⁸ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga; Sebuah Interpretasi dan Aplikasi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. VIII-IX.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana pengertian metode pada umumnya, metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi kegiatan berfikir dan berbuat untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Dalam metode penelitian pada umumnya menggambarkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek penelitian / sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data. Adapaun penjelasan dari masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena merupakan penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁷⁹ Selain dari buku, penelitian kepustakaan (*Library Research*) juga dapat menggunakan literatur-literatur lain seperti jurnal, artikel dan tulisan-tulisan lain sebagai sumber datanya.⁸⁰ Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan ilmiah yang tertuang dalam bentuk tulisan dalam dokumen-dokumen tertentu.

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) digunakan untuk memecahkan problem yang bersifat konseptual-teoretis, baik tentang tokoh pendidikan atau konsep pendidikan tertentu seperti tujuan, metode, dan lingkungan pendidikan. Penelitian kepustakaan seringkali juga disebut dengan penelitian literatur, dimana penghimpunan data penelitiannya diambilkan dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.⁸¹ Setelah proses penghimpunan data selesai, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan analisis

⁷⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁸⁰ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-rijal Institut, 2007), hlm. 25.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 20.

untuk menginterpretasikan pemikiran-pemikiran tokoh yang bersangkutan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-filosofis. Pendekatan historis atau sejarah digunakan karena dalam penelitian ini aspek-aspek sejarah digunakan sebagai dasar acuan untuk membuat alternatif konsep pendidikan Islam Indonesia, atau dengan kata lain menggunakan perspektif historis / sejarah sebagai acuan pemecahan sebuah masalah.⁸²

Dalam penelitian ini, pendekatan historis dilakukan dengan cara melihat konteks sejarah yang berkaitan dengan sejarah dan dinamika yang dialami pondok pesantren sejak lahir, berkembang dan tetap eksis sampai sekarang ini. Dalam konteks ini utamanya juga akan membahas sejarah lahirnya madrasah sebagai kepanjangan tangan dari pesantren, dan berbagai dinamika pesantren-madrasah yang terjadi. Studi aspek kesejarahan tersebut diharapkan dapat menemukan benang merah yang berguna untuk menemukan titik-titik celah kelemahan sehingga dapat memberikan saran atau masukan konstruktif terhadap dinamika pesantren ataupun dinamika pesantren-madrasah di era yang akan datang.

Sedangkan pendekatan filosofis digunakan karena dalam penelitian ini memerlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam untuk menemukan konsep tertentu. Pendekatan filosofis digunakan untuk merumuskan secara jelas hakekat yang mendasari konsep-konsep pemikiran.⁸³ Dalam penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan setelah dilakukan pendekatan historis. Hasil analisis atau studi komparasi sebagai bagian dari pendekatan historis yang telah dilakukan sebelumnya menjadi bahan yang kemudian dianalisis kembali untuk menemukan sebuah konsep baru berkaitan dengan situasi sekarang ini. Hasil dari pemikiran yang mendalam atau pendekatan filosofis tersebut

⁸² Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintas Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 35.

⁸³ Anton Baker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 92.

diharapkan mampu menemukan dan menjadi alternatif jawaban atas berbagai kesenjangan dan persoalan yang lahir dari dunia pesantren dan madrasah, termasuk juga persoalan-persoalan yang meliputi dinamika pesantren-madrasah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pesantren, utama terkait kritik terhadap pesantren, modernisasi pesantren, dan konsep-konsep tentang pesantren menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Adapun buku-buku yang dijadikan sebagai sumber data primer diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern. Ditulis oleh Karel A. Steenbrink dan diterbitkan oleh PT. Pustaka LP3ES di Jakarta pada tahun 1994.
 - b. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Ditulis oleh Mastuhu pada tahun 1994 dan diterbitkan di Jakarta oleh INIS.
 - c. Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren. Ditulis oleh Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin dan diterbitkan oleh penerbit Listia Fariska Putra pada tahun 2004 di Jakarta.
 - d. Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Protret Perjalanan. Ditulis oleh Nurcholish Madjid dan diterbitkan di Jakarta Oleh Dian Rakyat.
 - e. Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional. Ditulis oleh Yasmadi pada tahun 2002 dan diterbitkan di Jakarta oleh Ciputat Press.
 - f. Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren. Ditulis oleh Ahmad Mutohar dan Nurul Anam di Jember pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
 - g. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan. Ditulis oleh M. Ridlwan Nasir

pada tahun 2005 dan diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Pustaka Pelajar.

2. Data sekunder, adalah data pendukung sumber utama penelitian, atau data pendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh dari literatur-literatur yang terabadikan dalam sebuah buku yang relevan dan mendukung literatur sumber primer. Selain itu, data sekunder ini juga diperoleh dari hasil interview dengan beberapa tokoh yang kompeten dalam bidang yang berkaitan, utamanya tentang modernisasi pesantren. Hasil interview ini digunakan sebagai penguat terhadap data-data yang diperoleh dari literatur. Adapun data sekunder yang diperoleh dari literatur di antaranya sebagai berikut:

- a. Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun Dari Bawah. Dieditori oleh M. Dawam Rahardjo dan diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di Jakarta pada tahun 1985.
- b. Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah. Ditulis oleh Haider Putra Daulay dan diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Tiara Wacana pada tahun 2001.
- c. Islam Indonesia Menatap Masa Depan. Disunting oleh Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, diterbitkan di Jakarta oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) pada tahun 1989.
- d. Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren; Memperteguh Nilai-nilai Pesantren bagi Transformasi dan Kosmopolitanisme Islam Nusantara . Ditulis oleh Rohani Shidiq dan diterbitkan oleh Istana Publishing di Yogyakarta pada tahun 2015.
- e. Menggerakkan Tradisi. Ditulis oleh KH. Abdurrahman Wahid dengan editor Hairus Salim H.S., diterbitkan oleh penerbit LKiS Yogyakarta pada tahun 2010 dan merupakan cetakan yang ketiga.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi

merupakan metode pengumpulan data dengan jalan menganalisis data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.⁸⁴ Selain itu untuk lebih memperkaya wawasan penelitian, peneliti bermaksud menopang data-data literatur tersebut dengan interview terstruktur maupun tidak terstruktur dengan beberapa tokoh – utamanya tokoh pesantren – untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan lebih kuat.

5. Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah menganalisis data-data tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu suatu upaya yang dilakukan dalam rangka melihat dan menganalisis sejarah dan perkembangan pesantren dengan berbagai dinamikanya sampai pada masa sekarang. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan melihat dan mengidentifikasi tuntutan-tuntutan pendidikan masa kini, kemudian dianalisis dengan berdasarkan dan mengacu pada nilai-nilai luhur yang telah tumbuh dan mengakar dalam tradisi pesantren. Metode analisis isi (content analysis) merupakan analisis ilmiah yang menekankan pada isi atau pesan yang dibangun secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini diharapkan proses analisis akan menghasilkan pemahaman yang mendalam serta objektif utamanya tentang konsep pendidikan ideal yang mampu mengakomodasi kemodernan dan status seorang muslim sebagai hamba yang mempercayai dimensi rohani dalam kehidupannya.

Adapun pola berfikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pola berfikir deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.⁸⁵ Hal-hal yang bersifat umum berupa gagasan, pemikiran, dan teori-teori yang sudah ada berkaitan dengan dunia kepesantrenan dan kemadrasahan, sedangkan

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

⁸⁵ Moh. Ali, *Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Bumi Aksara, 1987), hlm. 16.

hal-hal yang bersifat khusus adalah hasil analisis yang sudah mengarah pada konsep ideal pendidikan Islam di era modern. Gagasan dan pemikiran tentang modernisasi pesantren yang didengungkan oleh berbagai kalangan pada era orde baru menjadi landasan dan titik awal analisis, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi secara mendalam kebutuhan dan tuntutan serta kondisi pendidikan Islam masa kini. Dari situlah kemudian akan berusaha dicari format ideal pendidikan Islam di era modern yang komprehensif, bukan pendidikan Islam yang parsial, pendidikan Islam yang mampu dengan sesungguhnya untuk mengembangkan dua dimensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pesantren dan Dinamika Modernisasinya

Sejarah Islam Indonesia telah dimulai sejak Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke 7M/1H,⁸⁶ meskipun diyakini bahwa Islam secara massif berkembang di Indonesia baru dimulai pada abad ke 12-13 M. Perkembangan Islam yang pesat tersebut terutama setelah adanya peran Walisongo dalam penyebaran agama Islam, khususnya di tanah Jawa. Perkembangan Islam tersebut ditandai dengan semakin menyebar-luasnya pengaruh Islam di daerah-daerah di wilayah Indonesia. Dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dengan cara yang relatif santun –bukan melalui penaklukan wilayah– Islam mampu menyebar secara luas dan sekaligus menggantikan agama yang telah ada sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pesatnya penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia tersebut, salah satunya adalah penyampaian isi agama yang dilakukan dengan cara yang santun, tanpa merusak tata budaya yang ada.⁸⁷

Menyebarnya Islam di bumi Indonesia secara tidak langsung merupakan penanda dimulainya pendidikan Islam di Indonesia. Para pembawa agama Islam yang umumnya merupakan pedagang pertama-tama memperlihatkan perilaku yang dapat dijadikan teladan sehingga masyarakat tertarik untuk meniru dan kemudian keluar rasa ingin tahu dalam diri mereka. Proses ini berlanjut pada tahap pengajaran yang sangat terbatas secara personal atau kelompok, yang dilakukan kapan saja dan dimana saja selama ada kesempatan untuk menyampaikan isi ajaran agama Islam. Tahap ini berdampak positif pada kepercayaan dan hubungan yang semakin erat antara para penganjur agama

⁸⁶ Zuhairini, Dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. IX, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 133.

⁸⁷ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. IV, (Mutiarasumberwidya, 1995), hlm. 14-16.

dan masyarakat setempat. Pada gilirannya, masyarakat yang sudah menaruh kepercayaan pada kapasitas keilmuan penganjur agama tersebut merasa perlu untuk memberikan pengetahuan agama kepada anak-anaknya dan mempercayakannya pada para penganjur agama tersebut.⁸⁸

Sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik dengan Islam, semakin banyak pula orang-orang yang mempercayakan anak-anaknya untuk mendapat bimbingan dan pengajaran pengetahuan agama kepada para penganjur agama yang terpercaya tersebut. Di satu sisi, berjalannya proses pengajaran ini juga merupakan cara tersendiri bagi penyebaran agama Islam yang cukup efektif. Banyaknya masyarakat yang mempercayakan anaknya untuk mendapatkan pengetahuan agama pada penganjur agama membuat rumah-rumah para penganjur agama tersebut menjadi tempat untuk belajar. Selain rumah para penganjur agama, masjid atau langgar juga menjadi pusat belajar agama pada masa itu. Pada perkembangannya, dikarenakan banyaknya anak yang hendak belajar yang bahkan berasal dari luar daerah serta kapasitas langgar atau masjid yang sudah tidak mencukupi, maka dibuatlah pondokan sebagai tempat tinggal santri yang belajar disitu. Sistem pendidikan Islam yang demikian inilah yang merupakan embrio lahirnya lembaga pendidikan Islam yang kemudian disebut dengan istilah pondok pesantren.⁸⁹

Secara sistem dan bentuk fisik, pesantren pada masa awal pertumbuhannya ini sangat sederhana. Berjalannya pesantren pada waktu itu hampir tanpa perencanaan yang matang, mengalir begitu saja dengan sedikit improvisasi sekenanya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang berjalan di pesantren, yang salah satunya tercermin dalam pemahaman tentang waktu. Penggunaan pengertian waktu yang dipakai dalam lingkungan pesantren berbeda dengan pengertian waktu masyarakat secara umum. Umumnya pesantren menggunakan dimensi waktunya berdasarkan pada jadwal shalat fardlu. Hampir pada setiap

⁸⁸ Zuhairini, Dkk., *Sejarah.....*, hlm. 209-211.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 212.

kegiatan pesantren, dimensi waktu yang digunakan adalah berdasarkan jadwal shalat. Ini menjadi keunikan tersendiri dalam dunia pesantren, yang oleh KH. Abdurrahman Wahid diklasifikasikan sebagai salah satu prasyarat sebagai sebuah subkultur.⁹⁰

Secara fisik, pesantren juga dapat dikatakan tidak memiliki perencanaan yang matang. Bahkan santri-santri yang ingin menetap untuk belajarliah yang membangun sendiri pondokan sebagai tempat tinggal selama mereka belajar. Biasanya, pondokan ini letaknya berdekatan dengan masjid sebagai sentral kegiatan santri, terutama untuk shalat jamaah. Antara pondokan dan masjid diberi batu-batu sebagai penghubung antara dua bangunan tersebut, agar santri-santri yang hendak ke masjid dari pondokan tidak perlu lagi mencuci kaki.⁹¹

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan tempat pengajaran al-Qur'an dan pengetahuan agama. Selain itu, pesantren merupakan tempat mencetak kader-kader pendakwah atau muballigh yang selanjutnya mempunyai tugas menyebarkan Islam ke daerah tertentu. Keberadaan lembaga pendidikan yang sekarang disebut dengan pesantren ini sangat penting dalam rangka memperluas pengaruh Islam di Indonesia. Keberadaannya dianggap sebagai ujung tombak penyebaran Islam di wilayah Indonesia pada periode antara tahun 1200 dan 1600.⁹² Pada periode tersebut pula lah Islam secara massif menyebar luas di Indonesia.

Embrio lembaga pendidikan pesantren diyakini sudah ada sejak Islam menyebar cukup luas di wilayah Indonesia. Akan tetapi, kapan lembaga pendidikan Islam ini secara resmi berdiri belum dapat dipastikan dan masih debatable. Terdapat beberapa pendapat yang menyebutkan tentang awal mula sejarah

⁹⁰ Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur", dalam Abdurrahman Wahid, Dkk., *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 48.

⁹¹ Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hlm. 29.

⁹² Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 62.

lahirnya lembaga pendidikan ini. Masing-masing mempunyai argumentasi yang menguatkan, sehingga untuk memastikannya masih butuh penelitian lebih lanjut lagi, tentunya bila hal tersebut masih memungkinkan.

Secara umum, pendapat yang paling sering digunakan untuk menunjukkan awal mula berdirinya pesantren adalah pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren pertama kali berdiri pada masa Walisongo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang merupakan wali tertua dalam jajaran Walisongo dianggap sebagai peletak dasar sendi-sendi pesantren. Sedangkan wali yang bertindak sebagai pembina pesantren pertama adalah Sunan Ampel atau Ali Rahmatullah.⁹³

Tujuan didirikannya pesantren pada waktu itu tidak lain adalah sebagai tempat penggemblengan calon-calon muballigh penyebar Islam. Setelah calon-calon muballigh tersebut dirasa siap dan memiliki keilmuan yang cukup, maka mereka akan ditugaskan menyebarkan Islam ke daerah tertentu. Jika melihat pada tujuan didirikannya pesantren pada awal pertumbuhannya dan bukti bahwa Islam mulai massif menyebar di Indonesia pada masa Walisongo, maka pendapat yang menyebutkan pesantren pertama kali berdiri pada masa walisongo tersebut dapat dibenarkan. Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi antara tujuan didirikannya pesantren dengan menyebarnya Islam secara massif di Indonesia. Sebagai bukti, pada periode antara tahun 1570-1630 sebagaimana digambarkan oleh Anthony Reid, merupakan periode islamisasi paling kuat di Nusantara.⁹⁴ Hal tersebut bisa jadi merupakan buah dari lembaga pesantren yang didirikan walisongo sebagai ujung tombak penyebaran agama Islam.

Penyebaran Islam dan perkembangan pesantren semakin pesat setelah para penyebar agama Islam mendapat dukungan dari penguasa. Dukungan oleh raja yang berkuasa

93 Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 9.

94 Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), hlm. 51.

ini memudahkan langkah para penyebar agama Islam untuk menarik masyarakat memeluk Islam, dan secara tidak langsung menjadikan pesantren semakin ramai dan bertambah jumlahnya. Dukungan dari raja yang sedang berkuasa tersebut salah satunya dapat dilihat dari diberikannya tanah perdikan kepada para penyebar agama Islam untuk kepentingan dakwah Islam. Tanah perdikan tersebut pada umumnya dijadikan tempat didirikannya pesantren sebagai tempat pengajaran dan pendalaman agama Islam. Oleh karenanya, perkembangan pesantren menjadi cukup pesat dan Islam semakin menyebar luas. Bahkan pada periode kekuasaan kerajaan Mataram, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung, dapat dikatakan sebagai zaman keemasan bagi perkembangan pesantren dan pengajaran Islam berkat adanya dukungan dari penguasa.⁹⁵

Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Pendidikan Islam mendapatkan momentum emasnya. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan kelembagaan pesantren yang sangat pesat dengan penambahan lembaga yang mencapai 300 pesantren. Jumlah tersebut tentu saja tidak bisa dianggap sebagai angka yang kecil mengingat masa-masa tersebut masih termasuk dalam periode-periode awal Islam. Selain dari jumlah kelembagaan yang bertambah begitu signifikan, masa keemasan pesantren pada masa Sultan Agung ini juga dapat dilihat dari sikap pemerintah pada waktu itu yang sangat menghargai dan memperhitungkan orang-orang pesantren. Sikap tersebut tampak dari kebijakan pemerintah yang mengambil kyai-kyai pesantren sebagai penasihat serta perlakuan terhadap kyai-kyai tersebut dengan sangat baik.⁹⁶

Dinamika yang dialami pesantren pada masa ini lebih cenderung pada proses penguatan eksistensi dan penguatan perannya sebagai ujung tombak dakwah Islam. Pesantren mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama berkat dukungan yang diperoleh dari para penguasa. Pesantren pada masa

⁹⁵ Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok.....*, hlm. 39-40.

⁹⁶ Abdurrahman Mas'ud, "Sejarah dan Budaya Pesantren", dalam Ismail, Dkk. (ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 12.

ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang banyak diminati oleh masyarakat dan kebanyakan berada di pusat-pusat kota. Keadaan yang demikian ini berubah drastis ketika penjajah mulai masuk di wilayah Nusantara. Pesantren yang semula menjadi lembaga pendidikan yang paling dikenal dan diminati masyarakat serta berada di pusat-pusat kota menjadi lembaga pendidikan yang terpinggirkan dan berada di desa-desa pedalaman. Perannya yang dahulu sebagai ujung tombak dakwah Islam perlahan berkembang dan berubah menjadi tombak perjuangan masyarakat.

Perkembangan pesantren yang pesat terutama pada masa kerajaan Mataram tersebut membuat Belanda merasa khawatir. Berkembang pesatnya pesantren dirasa oleh Belanda sebagai suatu sebab yang akan mengancam kedudukannya di masa yang akan datang, sehingga perlu dibatasi agar tidak dapat berkembang lagi. Tekanan-tekanan mulai diberikan Belanda untuk membatasi perkembangan pesantren, dan organisasi-organisasi pendidikan Islam yang ada di zaman pemerintahan Sultan Agung mulai dibinasakan.⁹⁷ Barangkali, hal tersebut pula yang membuat pesantren yang dulunya berkembang di pusat-pusat kota atau kabupaten akhirnya memilih untuk mengisolasi diri di daerah-daerah pedalaman. Hal ini dilakukan agar pesantren-pesantren ini jauh dari jangkauan dan pengawasan Belanda, dan dengan demikian dapat melakukan aktivitas pada umumnya dengan normal.

Dari sisi perkembangan kelembagaannya, perpindahan kekuasaan dari Mataram kepada kolonial Belanda berdampak cukup besar. Perkembangan pesantren yang dulunya sangat pesat perlahan mulai menurun dan terhambat ketika kolonial Belanda masuk ke Indonesia untuk menjajah. Pemerintah kolonial mencurigai dan khawatir terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang dianggap menjadi institusi dan pusat untuk melatih para militan yang dipersiapkan untuk melawan penjajah.⁹⁸ Namun demikian, meski secara kelembagaan datangnya kolonial

⁹⁷ Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok.....*, hlm. 41.

⁹⁸ Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 89.

Belanda ke Indonesia menghambat perkembangan pesantren, dari sisi minat masyarakat justru pesantren semakin digandrungi. Hal tersebut tidak lain karena pada era kolonial, hanya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu diakses oleh masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan pendidikan buatan kolonial umumnya hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat pribumi, terutama yang berasal dari kaum bangsawan.

Di zaman kolonial ini, eksistensi dan kondisi pesantren berbanding terbalik dengan kondisinya di periode sebelumnya, baik pada periode Wali maupun pada periode kejayaan kerajaan Islam (Sultan Agung). Jika pada periode Wali atau periode kerajaan Islam pesantren memiliki posisi yang tinggi sebagai institusi yang penting dan diperhatikan oleh pemerintah, pada masa kolonial posisi pesantren berubah karena menjadi oposisi terhadap pemerintah kolonial. Posisi yang diambil oleh kalangan pesantren untuk enggan bersikap kooperatif ini barangkali menjadi alasan bagi mereka untuk mengisolasi diri ke tempat-tempat terpencil. Pilihan tersebut pada gilirannya memunculkan stigma negatif terhadap lembaga pesantren sebagai lembaga yang asing dan terbelakang karena kebanyakan berada di daerah-daerah yang terpencil.

Dinamika yang terjadi dalam kelembagaan pesantren pada masa kolonial tidak berhenti sampai disitu saja. Pemerintah kolonial pada waktu itu sempat mengusahakan satu jenis pendidikan yang berdasarkan masyarakat pribumi murni secara teratur dan disesuaikan dengan masyarakat desa. Usaha tersebut tentu memiliki hubungan dengan pendidikan Islam pesantren yang memang pada waktu itu ada di masyarakat pribumi. Usaha pemerintah kolonial tersebut didasarkan pada kebijakan politik pendidikan Belanda yang harus menghormati pribumi dalam masyarakat dan keagamaan. Namun pada akhirnya, usaha untuk menyediakan jenis pendidikan berdasarkan masyarakat pribumi tersebut urung terlaksana. J.A. Van Der Chijs yang diangkat sebagai Inspektur Pendidikan Belanda dengan keras menolak penyesuaian pendidikan Islam yang ada meskipun ia

setuju dengan tetap mempertimbangkan masyarakat pribumi. Penolakan tersebut didasarkan pada alasan teknis dimana ia menganggap terdapat kebiasaan yang jelek dalam sistem pendidikan masyarakat pribumi (pesantren).⁹⁹ Kebiasaan jelek tersebut terutama dalam hal metode membaca teks Arab yang hanya dihafal tanpa pengertian. Tradisi didaktis pendidikan yang ada pada masyarakat pribumi tersebut dirasa tidak dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum.¹⁰⁰

Selain karena alasan teknis, pada dasarnya penolakan terhadap pelibatan institusi pendidikan masyarakat pribumi (pesantren) dalam sistem kolonial Belanda tersebut juga sangat besar dipengaruhi oleh alasan keagamaan. Pemerintah kolonial Belanda enggan berurusan dan tidak mau ikut campur tangan dalam persoalan Islam meski menyadari pelibatan tersebut tidak akan mempengaruhi keuangan pemerintah kolonial, mengingat pendidikan Islam umumnya dibiayai oleh rakyat sendiri. Pemerintah kolonial pada akhirnya mendirikan sekolah desa (gubernemen) dan pesantren tetap pada jalan dan tradisinya sendiri untuk mengembangkan pendidikan Islam. Kenyataan tersebut, menurut Saridjo, merupakan asal muasal yang pertama kali menyebabkan terjadinya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia.¹⁰¹

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada masa-masa berikutnya secara umum cenderung membatasi ruang gerak lembaga pendidikan Islam (pesantren) sehingga perkembangannya pada masa ini hampir tidak terlihat, baik dari segi kelembagaan maupun segi didaktis pendidikannya. Diantara kebijakan pendidikan pemerintah kolonial tersebut adalah adanya ordonansi untuk membatasi proses pendidikan agama. Melalui ordonansi tersebut, pemerintah kolonial mewajibkan bagi siapa saja yang hendak memberikan pelajaran

99 Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bogor: Al Manar Press, 2011), hlm. 48-49.

100 Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 3.

101 Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam...*, hlm. 52.

agama harus memiliki izin dari pemerintah kolonial.¹⁰²

Meski dari sisi eksistensi pesantren tidak mengalami perkembangan yang pesat, namun secara substansional pesantren terus mengalami dinamika-dinamika modernisasi di dalam sistem pendidikannya. Pesantren yang pada mulanya merupakan lembaga pendidikan Islam yang hanya mengajarkan pengetahuan agama dengan metode tradisional (umunya sorogan dan wetonan) serta dengan kelengkapan pembelajaran yang serba terbatas secara perlahan terpengaruhi dan merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Dalam bahasa Steenbrink, sikap yang ditampilkan oleh kalangan pesantren tersebut digambarkan dengan kalimat “menolak dan mencontoh”.¹⁰³ Sikap tersebut menunjukkan bahwa meski kalangan pesantren mengambil posisi sebagai oposisi yang enggan untuk kompromi dan kooperatif dengan pemerintah kolonial, terutama dalam urusan pendidikan, namun pada saat yang sama kalangan pesantren mengambil model pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial sebagai contoh bagi pengembangan pendidikan di pesantren.

Umumnya, langkah yang diambil kalangan pesantren tersebut dianggap sebagai upaya untuk menyaingi atau mengimbangi perkembangan pendidikan dengan model yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Langkah tersebut ditandai dengan lahirnya model pendidikan atau pembelajaran baru dalam lingkungan pesantren, yaitu dengan menggunakan sistem klasikal serta dimasukkannya beberapa materi pembelajaran baru yang tidak lazim dalam sistem pendidikan pesantren sebelumnya seperti membaca, menulis huruf latin, ilmu bumi dan yang lainnya.

Keputusan untuk menirumodel pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial ini dalam diskursus sejarah pendidikan Islam dianggap sebagai sebuah pembaharuan terhadap sistem pendidikan pesantren. Dengan adanya pendidikan sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, maka pesantren dari segi didaktis pengajaran telah mengalami perkembangan. Meski

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren...*, hlm. 65.

demikian, pembaharuan yang terjadi dalam sistem pendidikan pesantren ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah kolonial, melainkan juga didukung dan dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan pendidikan sebagai hasil dari kontak dengan gerakan pembaharuan di timur tengah.¹⁰⁴

Sementara dinamika dan perkembangan pesantren dari sisi kelembagaan dan kuantitas terbatas karena kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, perkembangan dan pembaharuan dari sisi didaktis pengajaran terus menyesuaikan dengan keadaan yang melingkupi. Hal tersebut juga tetap terjadi meski terjadi pergantian tampuk kekuasaan dari kolonial Belanda ke tangan Jepang. Kebijakan pemerintah Jepang secara umum juga tidak dapat memberikan dampak yang positif bagi dinamika perkembangan pesantren dan pendidikan Islam pada umumnya. Meski demikian, secara lebih khusus pemerintah Jepang menunjukkan sikap yang berbeda dalam hal perlakuan terhadap komunitas muslim yang ada di Indonesia. Ini dapat dilihat terutama dari usaha pemerintah Jepang mendirikan Shumubu sebagai kantor urusan Agama, meski terdapat motif politis dalam usahanya tersebut. Shumubu inilah yang di kemudian hari setelah kemerdekaan menjadi cikal bakal dibentuknya Departemen Agama (Depag) yang salah satu tanggung jawabnya adalah mengelola pendidikan Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya pesantren.

Pasca-kemerdekaan Indonesia, posisi dan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak serta merta mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Dari berbagai literatur yang ada menyebutkan bahwa secara umum fokus pemerintah dalam bidang pendidikan pada waktu itu bukanlah pada pesantren, melainkan lebih umum pada penataan sistem pendidikan secara nasional. Tidak diperhatikannya pesantren pada waktu itu juga dapat dibuktikan dari peraturan-peraturan yang terbit pada masa itu. Bahkan, pembahasan mengenai pendidikan agama di sekolah hanya merupakan pembahasan kecil yang tidak terlalu menjadi topik utama. Pembahasan dengan topik pendidikan

¹⁰⁴ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82.

agama menunjukkan dengan agak jelas bahwa pendidikan agama, meskipun tidak ada niatan untuk meninggalkan, namun dalam prakteknya prosentase pembahasannya terlalu sedikit.¹⁰⁵

Perhatian terhadap pendidikan agama pasca-kemerdekaan sebenarnya telah ada walaupun tidak begitu terlihat dan hanya menarget pada pendidikan agama di sekolah yang umumnya adalah model warisan Belanda. Perhatian tersebut dapat dilihat dari amanat penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah Negeri dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954. Sayangnya meski telah diamanatkan dalam Undang-Undang, implementasi pengajaran agama di sekolah tersebut masih berupa opsional dengan memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengikuti pelajaran agama atau tidak. Serta jika dilihat dari jumlah jam belajarnya, alokasi waktu untuk pengajaran agama tersebut sangatlah minim. Pelajaran agama tersebut baru ditetapkan sebagai pelajaran yang wajib di ajarkan di sekolah-sekolah di berbagai jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi melalui ketetapan MPRS No. II Tahun 1960.¹⁰⁶

Tidak dibahas dan diperhatikannya pesantren dan madrasah sebagai institusi pendidikan Islam pasca-kemerdekaan dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada waktu itu. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 yang dianggap sebagai undang-undang sistem pendidikan nasional yang pertama yang sama sekali tidak menyebutkan pesantren dan madrasah di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesantren dan madrasah dianggap berada di luar sistem pendidikan nasional, sehingga sejak saat itu pula muncullah sikap diskriminatif terhadap dua lembaga tersebut. Sebagian menganggap bahwa terma yang dipakai dalam undang-undang tersebut memang tidak secara eksplisit menunjukkan pesantren atau madrasah karena dianggap akan cukup dengan menggunakan terma sekolah agama saja.¹⁰⁷ Apapun itu, sudah pasti konsiderasi yang melingkupi pada masa itu sangat mempengaruhi kebijakan-

¹⁰⁵ Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam...*, hlm. 64.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 71-72.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

kebijakan yang diambil. Mengingat juga bahwa dalam kurun waktu tersebut, pemerintahan Indonesia masih baru beberapa tahun terbentuk dan sangat mungkin masih dalam pencarian format terbaiknya.

Jika dicermati dengan teliti, fokus pembahasan tentang pesantren dari pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan terjadi kontradiksi dan cenderung menguap pembahasannya. Hal ini terjadi disinyalir karena adanya beberapa kemungkinan, yaitu 1) pemerintah lebih fokus terhadap keberlanjutan program sekolah warisan Belanda untuk mengakomodir lebih banyak warga negara sehingga pembahasan tentang pesantren cenderung meredup; 2) pesantren telah terlanjur terisolasi atau mengisolasi diri sejak masa penjajahan sehingga terlupakan, atau setidaknya tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia saat itu; dan 3) pesantren dianggap sudah direpresentasikan oleh lembaga yang lain, yaitu madrasah yang secara kelembagaan mirip dengan sekolah.

Pasca-kemerdekaan, terutama menjelang akhir orde lama dan awal orde baru, lembaga pendidikan Islam yang mengemuka dan menjadi perhatian adalah madrasah, termasuk yang menjadi objek kebijakan yang menyangkut pendidikan Islam. Sedangkan pembicaraan tentang pesantren pada masa-masa tersebut di tingkat kebijakan hampir tidak dapat dilihat hasilnya. Terabaikannya pembahasan pesantren di tingkat kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia justru mengalami perkembangan baik secara kelembagaan maupun dalam hal sistem pembelajarannya. Pesantren-pesantren melakukan berbagai penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan yang ada, termasuk gelombang besar lahirnya madrasah dari pesantren-pesantren demi mendapatkan pengakuan resmi dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.¹⁰⁸

Dorongan yang besar bagi pesantren untuk membuka model pendidikan baru serta tuntutan realitas perkembangan masyarakat menjadikan pesantren secara dilematis harus

¹⁰⁸ Karel A. Steenbrink, *Pesantren...*, hlm. 76.

menerima kedatangan madrasah. Dilema yang dihadapi tersebut secara umum antara mempertahankan identitas kultural pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang concern pada proses tafaqquh fi al-din dan kekhawatiran akan terabaikan oleh masyarakat jika tidak membuka model pendidikan baru yang menyediakan ijazah. Karenanya, pada tahun 70-an gelombang besar kelahiran madrasah dari dalam sistem pesantren menjadi tidak terelakan. Usaha untuk mendirikan madrasah dalam suatu pesantren menjadi trend yang umum di kalangan pesantren.

Atas dasar tersebut, pembahasan dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pesantren oleh pemerintah waktu itu hampir-hampir tidak dapat dijumpai sama sekali. Perhatian dan pembuatan kebijakan tentang madrasah umumnya telah dianggap mewakili atau merepresentasikan perhatian dan kepedulian terhadap lembaga pesantren. Pembahasan serta pembuatan kebijakan-kebijakan terkait dengan madrasah pada waktu itu cukup ramai. Hal tersebut barangkali juga merupakan upaya untuk menyaingi atau sekurang-kurangnya menyamai kualitas pendidikan umum, mengingat keadaan madrasah pada waktu itu masih memprihatinkan. Selain di tingkat pembuat kebijakan, pembicaraan tentang madrasah juga ramai di kalangan masyarakat, terutama mereka yang juga merupakan “pendukung” sistem pendidikan pesantren, terutama dalam upaya memperjuangkan kesetaraan madrasah. Hal itu tampak dari gelombang protes yang dilayangkan oleh kelompok ini ketika dikeluarkan Kepres No. 34 Tahun 1972 tentang upaya penyelenggaraan pendidikan di bawah satu atap kementerian.¹⁰⁹

Minimnya perhatian dan pembahasan tentang pesantren pada periode ini (orde baru) bahkan juga tampak dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 1989. Beberapa ahli menyebutkan bahwa undang-undang tersebut secara umum belum dapat dikatakan mengakomodir pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Bahkan madrasah pun belum terakomodir atau setidaknya-tidaknya belum disebutkan secara jelas dan spesifik di dalamnya, meski eksistensi madrasah

109 Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam...*, hlm. 90-91.

sebelumnya telah diakui melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada tahun 1975.¹¹⁰

Meski demikian, pesantren pada kurun waktu orde baru ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Gelombang besar lahirnya madrasah dari rahim pesantren disatu sisi dianggap sebagai transformasi besar pembaharuan dalam sistem pendidikan pesantren. Transformasi tersebut, meski dilakukan dalam skala yang cukup besar, namun tidak mematikan eksistensi pesantren itu sendiri. Berkaitan dengan keunikan tersebut, pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang meski tidak diperhatikan dalam tataran kebijakan, namun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas dan juga akademisi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penelitian-penelitian terkait dengan pesantren yang pada masa itu frekuensinya termasuk yang paling banyak dilakukan.

Memasuki awal era reformasi, eksistensi dan posisi pesantren dalam diskursus pendidikan di Indonesia masih belum berubah. Keberadaannya masih belum mendapat pengakuan yang selayaknya meski dari sisi kuantitas kelembagaan jumlahnya terus menanjak. Upaya pemerintah untuk memperhatikan pendidikan terutama yang berkaitan dengan pesantren mulai dilakukan. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada produk kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹¹¹

Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tertanggal 30 Maret 2000 dengan Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah yang berkaitan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun ini merupakan “keuntungan” bagi pesantren. SKB tersebut mengatur dan memberikan kesempatan kepada pesantren-pesantren salafiyah

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

¹¹¹ Supriadin, “Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah”, *Jurnal El-HiKMAH*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 37.

untuk menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program wajib belajar dengan syarat adanya tambahan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dalam kurikulumnya. Adanya kebijakan ini merupakan jawaban atas problem pesantren yang saat itu dihadapi, yaitu berkaitan dengan lulusan pesantren yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lain atau memasuki dunia kompetisi yang mensyaratkan sertifikat atau ijazah. Oleh karenanya, kebijakan ini selain sebagai penyetaraan pesantren salaf juga merupakan kebijakan yang berimplikasi bagi eksistensi pesantren salaf.¹¹²

Meski demikian, upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi pesantren salaf pada masa ini tidak begitu saja diterima. Tidak semua pesantren salaf mau mengikuti ketentuan kebijakan tersebut dan memilih tetap mempertahankan tradisinya dengan pendidikan tradisionalnya. Selain itu, sikap tidak mau mengikuti yang dirasa akan menguntungkan peserta didik pada pesantren salaf ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren atau karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas salaf yang dikarenakan masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.¹¹³

Pengakuan terhadap lembaga pendidikan pesantren dan juga pendidikan Islam secara umum baru mulai dirasakan ketika Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terbit sebagai penyempurnaan terhadap UU Sisdiknas 1989. Dari sisi konten, UU ini dianggap yang paling lengkap mewakili amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Dibandingkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya, Undang-Undang ini dirasa telah memenuhi amanat yang terkandung dalam UUD 1945, yang meliputi semua aspek dalam pendidikan. Dalam UU Sisdiknas ini pula diatur tentang peran negara dalam pendidikan, yang harus mengalokasikan setidaknya 20% dari keseluruhan APBN. Di era reformasi sampai hari ini, Undang-Undang ini juga selalu

112 M. Sulthon Masyhud, Dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm. 7.

113 Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 50-53.

menjadi landasan lahirnya peraturan atau kebijakan baru dalam bidang pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini dianggap yang paling bisa mengakomodir pendidikan Islam dan pendidikan pesantren khususnya. Hal tersebut dapat dilihat di dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang nemuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan Islam. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.¹¹⁴ Ini merupakan pertama kali Pendidikan Islam dipertimbangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-Undang sebelumnya, pendidikan Islam dianggap masih belum diperhitungkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan ini menjadikan eksistensi lembaga pendidikan Islam ataupun pendidikan Islam sebagai mata pelajaran mendapat pengakuan. Dalam perspektif pendidikan Islam, UU Sisdiknas tahun 2003 ini menjadi landasan pengembangan pendidikan Islam yang ada di Indoneisa sehingga dapat lahir pendidikan yang berkeadilan dan tidak lagi dipandang sebagai pendidikan kelas dua. Sebagai contoh, turunan dari kebijakan dalam UU ini adalah kebijakan yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan yang lahir pada tahun 2007.

Berlandaskan pada UU Sisdiknas Tahun 2003 tersebut, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan utamanya pendidikan pesantren secara perlahan terus menerus diterbitkan. Eksistensi dan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mulai diperhitungkan dengan berbagai dinamika perkembangan yang terjadi. Berbagai kebijakan baru yang berpihak pad eksistensi pesantren terus diusahakan, terutama melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebagai

¹¹⁴ Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 7.

Kementerian yang bertanggung jawab mengelola pendidikan pesantren. Beberapa diantara kebijakan tersebut adalah adanya atau pengakuan terhadap pesantren mu'adalah, pengakuan dan penguatan terhadap eksistensi Ma'had 'Aly, rekognisi pesantren dan lain sebagainya. Terakhir, hari ini sedang diusahakan perancangan dan pengesahan undang-undang yang terutama mengatur tentang pendidikan agama, khususnya pesantren, yang prosesnya masih terus berlanjut sampai sekarang.

Pesantren secara umum berkembang mengikuti dinamika perkembangan zamannya. Perkembangan dan modernisasi terjadi dalam lembaga pesantren meliputi berbagai aspeknya seperti aspek kelembagaan, didaktis pendidikan maupun dari aspek fisiknya. Kemampuan pesantren dalam menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman ini menjadi salah satu kunci tetap bertahan dan eksistensinya pesantren dalam percaturan dunia pendidikan di Indonesia. Kemampuannya yang sudah teruji dalam melewati berbagai keadaan tergambar dengan jelas dalam sejarah perkembangannya sejak kemunculannya hingga sampai saat ini.

Dari segi fisik, pesantren selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Pada awal pertumbuhannya, pesantren hanya berupa tempat untuk menginap santri, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai titik sebagaimana diklasifikasikan oleh Zamakhsari Dhoher dengan lima elemen pokoknya, yaitu masjid, kyai, pondok, santri dan pengajian kitab kuning. Perkembangan secara fisik dalam pesantren terus berlanjut hingga saat ini, sehingga jika diamati secara fisik pesantren hari ini memiliki lebih dari pada lima elemen yang diklasifikasikan Zamkhsari tersebut.

Dari segi kuantitas, pondok pesantren juga terus mengalami peningkatan yang signifikan terutama pasca-kemerdekaan Indonesia. Survey yang dilakukan oleh kantor urusan agama yang dibentuk oleh pemerintah Jepang (Shumubu) pada tahun 1942 mencatat jumlah pesantren dan madrasah sebanyak 1.871. Jumlah tersebut lebih sedikit dari pada jumlahnya pada era kolonial Belanda yang diperkirakan mengalami penurunan sebab

pembatasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda.¹¹⁵ Jumlah tersebut naik cukup signifikan ketika pada tahun 1977 telah mencapai angka 4.176 dan sepuluh tahun berikutnya menjadi 6.579. Dari tahun ke tahun jumlah pesantren terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 1997 jumlahnya telah mencapai 8.342, tahun 2000 sebanyak 12.012 dan pada tahun 2003 jumlahnya telah mencapai 14.666 pondok pesantren.¹¹⁶

Secara lebih terperinci, jika dilihat dari tipologi pesantren yang menggolongkan pesantren ke dalam jenis salafiyah, kholafiyah dan kombinasi, secara keseluruhan jumlah pesantren pada tahun 2012 telah mencapai angka 27.230 buah. Pembagiannya terdiri dari pesantren salafiyah sebanyak 14.459 buah, pesantren kholafiyah sebanyak 7.727 buah dan pesantren kombinasi (terpadu) sebanyak 5.044 buah dengan total keseluruhan santrinya sebanyak 3.759.198 orang.¹¹⁷ Jumlah yang cukup fantastis dan mengesankan tentunya jika dilihat dari dinamika yang berkembang dalam diskursus pendidikan di Indonesia. Mengingat pesantren selama ini tidak begitu mendapat perhatian dari pemerintah dan cenderung bertahan atas dasar kemandiriannya. Kekuatan watak kemandirian yang dimiliki menjadikan jumlah pesantren terus bertambah. Hingga sampai tahun ini, jumlah pesantren secara keseluruhan telah mencapai 28.194 buah.¹¹⁸

Berkat perkembangannya yang pesat tersebut, pesantren tumbuh dengan berbagai macam jenis dan bentuk pendidikan yang dikelolanya. Pada prosesnya, perkembangan yang pesat tersebut melahirkan pengklasifikasian jenis-jenis pesantren. Secara umum, jika dilihat dari caranya dalam menyikapi tradisi, pesantren dibagi ke dalam tiga tipologi, yaitu salaf, kholaf dan modern.¹¹⁹ Secara lebih khusus, perkembangan pesantren jika

115 Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, hlm. 62.

116 *Ibid.*, hlm. 66.

117 Husein Muhammad, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak; Dinamika NU, Pesantren, Tradisi dan Realitas Zamannya*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 20019), hlm. 53.

118 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, www.ditdpontren.kemenag.go.id

119 Zainal Arifin, "Perkembangan Pesantren di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. IX No. 1, Juni 2012, hlm. 51-52.

dilihat dari segi kelembagaan pada prosesnya melahirkan model pesantren yang beraneka ragam. Pertama, pesantren salaf murni atau pesantren yang “tradisional-ketat. Dalam hal pengajaran, pesantren model ini hanya mengajarkan kitab kuning dengan penjenjangan dilakukan berdasarkan jenis kitab yang diajarkan. Kedua, pesantren tradisional terbuka-terbatas. Pesantren tipe ini sepenuhnya mengajarkan ilmu-ilmu agama, namun dengan jenis yang berbeda, termasuk penjenjangan dan kurikulum yang lebih teratur. Ketiga, pesantren tradisional terbuka. Pesantren ini juga menekankan penguasaan ilmu-ilmu agama namun lebih terbuka terhadap kurikulum umum meskipun masih sangat terbatas. Keempat, pesantren modern. Pesantren model ini adalah pesantren yang pengajaran kurikulum umumnya lebih banyak dan pengajaran ilmu-ilmu agama relatif sedikit. Kelima, pesantren yang hanya merupakan asrama atau tempat tinggal bagi santri.¹²⁰

Selain itu, pesantren dengan perkembangan dan pembaharuan kelembagaan yang terjadi juga memiliki gambaran yang bermacam-macam jika dilihat dari muatan kurikulum yang diajarkan. Secara lebih spesifik, pembagian tipologi pesantren berdasarkan kurikulum dan materi yang diajarkannya tersebut terbagi menjadi empat, yaitu: 1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan penerapan kurikulum nasional; 2) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk satuan pendidikan keagamaan dengan kurikulum sebagian besar pengetahuan agama; 3) pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan non-formal dalam bentuk Madin; serta 4) pesantren yang hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran.¹²¹

Klasifikasi terhadap pesantren terutama terjadi karena adanya diversifikasi kelembagaan, dimana berawal dari pesantren kemudian lahirlah berbagai macam lembaga atau institusi yang secara relasi masih mempunyai hubungan dengan pesantren. Diversifikasi pesantren muncul dalam berbagai macam bentuk dan telah terjadi sejak tahun 1920-an. Bentuk-bentuk diversifikasi

¹²⁰ Husein Muhammad, *Islam Tradisional...*, hlm. 46-48.

¹²¹ Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, *Direktori Pesantren*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 7.

tersebut dapat dilihat dalam bentuk madrasah, sekolah umum, sekolah vokasional, ma'had 'aly dan bahkan perguruan tinggi yang ada dalam lingkungan pesantren.¹²² Diversifikasi atau penganeekaragaman jenis-jenis pendidikan yang berada dalam lingkup pesantren ini merupakan bukti nyata dinamika dan proses modernisasi dalam pesantren yang tidak mengenal kata berakhir.

Selain dari segi fisik, kelembagaan maupun kurikulum, perkembangan yang dinamis juga terjadi dalam orientasi perjuangan pesantren. Karena sebagaimana diketahui, selain pendidikan sebagai bidang garapannya, pesantren juga mengambil peran-peran sosial dalam masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab dan keterikatannya dengan masyarakat. Jika dilihat peran-peran yang diambil pesantren sejak awal mula berdiri sampai pada era sekarang ini, orientasi perjuangan pesantren selalu mengalami perubahan. Pada awal perkembangannya, pesantren berfungsi sebagai ujung tombak dakwah dan penyebaran Islam. Orientasi perjuangan pesantren kemudian berkembang setelah penjajah datang dengan menjadi pusat-pusat perjuangan melawan penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan, pesantren dipercaya memainkan peran yang vital dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dengan semangat jihad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pesantren juga ikut ambil bagian dalam rangka pembangunan nasional yang digalakkan oleh pemerintah pada kurun waktu orde baru. Sedangkan hari ini, kita melihat pesantren concern dalam upaya menumbuhkan karakter islami yang moderat serta terus berusaha mendesimenasikan moderatisme dalam beragama.

Terlepas dari semua itu, pesantren sampai hari ini masih dipercaya dan memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Persepsi masyarakat tentang pesantren masih sangat kental dan tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran dan pendalaman ilmu agama. Semakin besar penekanan institusi tersebut terhadap penguasaan ilmu-ilmu

¹²² Abdul Basyit, "Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas", *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI No. 2, Oktober 2017, hlm. 312.

agama, semakin kuat pula anggapan masyarakat bahwa institusi itu benar-benar pesantren. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit penekanan yang dilakukan oleh sebuah institusi terhadap penguasaan ilmu-ilmu agama maka semakin kuat pula anggapan masyarakat bahwa institusi tersebut bukanlah pesantren dalam artian yang sesungguhnya.¹²³ Oleh karenanya, meski pesantren memiliki peran dan fungsi yang dinamis serta tidak tunggal yang disesuaikan dengan keadaan zaman, pesantren dipercaya konsisten dengan nilai dasar kelembagaannya yaitu sebagai lembaga transfer dan transmisi ilmu-ilmu keagamaan, lembaga pengkaderan kyai, ulama' dan dai serta penjaga tradisi umat Islam terutama Islam sunni.¹²⁴

B. Madrasah Berbasis Pesantren dan Perkembangannya

Dalam diskursus pendidikan Islam, kata madrasah sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh untuk menyebut suatu lembaga pendidikan. Kata madrasah merupakan bentuk bahasa Arab yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sekolah. Dalam dunia Islam, menyebut madrasah untuk menunjuk suatu lembaga pendidikan layaknya sekolah – di Indonesia – sama halnya seperti menyebut lembaga pendidikan dengan bahasa Inggris, *school*. Secara sekilas, tidak ada perbedaan berarti ketika menyebut sekolah baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Baik madrasah (dalam bahasa Arab) maupun *school* (dalam bahasa Inggris) bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu sekolah.

Istilah madrasah merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang pendidikan Islam. Keberadaannya sudah mengakar dan menjadi istilah khas Islam yang menunjukkan suatu lembaga pendidikan sejak sekian lama. Istilah tersebut ikut tersebar seiring meluasnya pengaruh Islam di belahan dunia, termasuk sampai di Indonesia. Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia juga tidak lepas dari penggunaan

¹²³ Ronald Lukens-Bull, *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*, (New York: Palgrave MacMillan, 2005), hlm. 66.

¹²⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 102.

istilah madrasah untuk menunjukkan sebuah lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan maksud dalam penyebutan istilah madrasah di Indonesia jika dibandingkan dengan penyebutan istilah tersebut di tempat lain. Meskipun secara bahasa madrasah berarti sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak serta merta dipahami selayaknya sekolah pada umumnya melainkan dipahami sebagai sekolah agama untuk pembelajaran seputar hal-hal atau seluk beluk agama dan keagamaan.¹²⁵

Jika kita mengupas akar kesejarahan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, maka kita harus kembali melihat sejarah masa lalu dimana kata madrasah pertama kali dipakai untuk menunjukkan suatu lembaga pendidikan, begitu juga perkembangannya. Memang benar bahwa pendidikan Islam sudah dimulai sejak lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun sistem yang digunakan masih sangat sederhana. Pada awal masa Islam tersebut, masjid merupakan tempat sentral untuk melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan. Sistem yang sangat sederhana tersebut terus berkembang mengikuti dinamika yang ada, sampai muncullah istilah madrasah untuk menunjukkan lembaga atau sistem pendidikan Islam yang dipelopori pada masa Bani Saljuk.

Pada abad pertengahan, Nizam al-Mulk yang merupakan Wazir Bani Saljuk mendirikan madrasah Nidzamiyah di Baghdad. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syi'ah serta untuk menyediakan pengajar-pengajar di kalangan Sunni. Pada masa itu, bentuk dan sistem yang kemudian disebut dengan madrasah ini menjadi trend yang hampir seluruh wilayah Islam menggunakannya. Bentuk madrasah ini merupakan hasil dari berbagai dinamika yang dilalui oleh sistem pendidikan Islam yang dimulai dari masjid, masjid khan, hingga kemudian muncul madrasah.¹²⁶ Bentuk dan sistem madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ini kemudian

¹²⁵ Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94.

¹²⁶ Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), hlm. 31.

juga sampai di Indonesia, sehingga istilah tersebut juga berlaku di Indonesia, meskipun terdapat sedikit perbedaan.

Dalam sejarah dunia pendidikan Islam, madrasah menjadi istilah untuk menunjukkan suatu lembaga pendidikan secara umum, dimana di dalamnya terdapat proses pendidikan dan pengajaran yang cukup luas tanpa ada pengkhususan. Hal ini cukup berbeda dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, dimana madrasah pada awal berdirinya dikhususkan hanya sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama. Di dalam madrasah pada waktu itu tidak diajarkan pengetahuan selain pengetahuan agama, bahkan madrasah dianggap sebagai lawan atau bentuk penolakan terhadap pendidikan umum. Hal inilah yang membedakan antara madrasah dalam dunia pendidikan Islam secara umum dan madrasah yang ada di Indonesia. Madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, sedangkan di Indonesia hanya ditujukan untuk sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama, dan pada perkembangannya pada sekolah yang pengetahuan agama menjadi dasar atau ciri khasnya.¹²⁷

Sejarah kelahiran dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pesantren pada awal abad ke-20. Meskipun sebelumnya pendidikan dengan format atau model madrasah ini telah ada seperti Madrasah Abadiyah serta madrasah-madrasah yang dipelopori oleh organisasi keagamaan, namun hubungannya dengan sistem pesantren secara historis hampir tidak dapat dihilangkan. Madrasah diyakini merupakan kelanjutan dari sistem pesantren yang telah dimodifikasi dan dikembangkan berdasarkan penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan menggunakan sistem klasikal.¹²⁸ Jika tidak demikian, ia merupakan hasil dari interaksi seorang terhadap dunia luar dan ketidakpuasan terhadap pola pengajaran yang berlangsung dalam sistem pesantren. Upaya yang dilakukan oleh

¹²⁷ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001), hlm. 59.

¹²⁸ M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 90.

kaum muslim Indonesia yang telah mendapatkan pengalaman di luar Indonesia untuk melakukan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk lembaga madrasah. Semangat pembaharuan ini sedikit banyak disebabkan oleh terjadinya pembaharuan di dunia Islam di timur tengah pada waktu itu. Selain itu, umumnya madrasah juga lahir sebagai respon terhadap kebijakan dan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda.¹²⁹

Pemakaian istilah madrasah di Indonesia pertama kali digunakan oleh Abdullah Ahmad yang mendirikan Madrasah Adabiyah. Madrasah ini merupakan madrasah pertama yang menggunakan sistem klasikal yang ada di Indonesia. Perjuangan pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Abdullah Ahmad kemudian diikuti oleh beberapa organisasi Islam seperti PERTI, Al Irsyad, Muhammadiyah, Jami'atul Washilah dan yang lainnya. Masing-masing organisasi keagamaan dengan tokohnya masing-masing mengembangkan madrasah dengan corak yang tidak jauh berbeda di beberapa daerah.¹³⁰ Bermunculannya madrasah di beberapa daerah tersebut juga menginspirasi KH. Hasyim Asy'ari yang diikuti KH. Wahid Hasyim dan KH. Ilyas untuk memperbaharui pola pendidikan di pesantren. Maka kemudian dibukalah madrasah di pondok pesantren Tebuireng dengan penambahan materi umum berhitung dan ilmu bumi. Pembaharuan yang dilakukan di pondok pesantren tersebut kemudian banyak diikuti oleh banyak pondok pesantren di daerah-daerah lain.

Madrasah di Indonesia diyakini mulai muncul pada awal abad ke 20 yang dilatarbelakangi oleh usaha pembaharuan pendidikan Islam serta ketidakpuasan dengan sistem pendidikan Islam yang ada. Selain itu, madrasah juga merupakan bentuk respon masyarakat muslim di Indonesia terhadap politik pendidikan Belanda.¹³¹ Meskipun lahir dalam kondisi sosial-politik yang terbatas, madrasah tetap mampu berpartisipasi aktif

129 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah...*, hlm. 34.

130 Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...* hlm. 26-83.

131 Maksum, *Madrasah ...*, hlm. 82.

dalam dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Kenyataan tersebut tidak muncul begitu saja, madrasah selalu berusaha menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang ada.

Sebelum mencapai bentuknya seperti sekarang, madrasah di Indonesia mengalami cukup banyak perubahan dan gejolak. Madrasah sendiri sebetulnya lahir atas dasar tantangan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan bentuk pendidikan yang lebih sesuai dengan keadaan pada masa itu. Dalam kaitannya dengan pesantren, tantangan dan tuntutan yang ada tersebut direspon dengan mengadakan pendidikan yang lebih terstruktur dan kemudian lahirlah madrasah dalam sistem pendidikan pesantren. Meskipun pada tahap paling awal madrasah dalam lingkungan pesantren ini masih hanya mengajarkan pengetahuan agama, akan tetapi pengelolaan pendidikan dengan sistem madrasah memungkinkan pembelajaran secara klasikal dari yang sebelumnya hanya dengan sistem halaqah, sorogan atau wetonan yang umumnya tidak terstruktur. Pengelolaan pendidikan dengan sistem madrasah juga memungkinkan adanya pengelompokan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Islam yang penyampaianannya diberikan secara bertingkat-tingkat.¹³²

Dikarenakan tuntutan masyarakat sebab meluasnya pengaruh pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial, pesantren kemudian merespon dengan memasukkan beberapa pengetahuan umum dalam sistem pesantren. Nuansa pendidikan atau format madrasah mengalami pergeseran dalam hal kurikulum atau materi pembelajarannya sejalan dengan hegemoni politik beanda yang menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk memenuhi tuntutan akan sumber daya manusia yang bisa menopang roda pemerintahan.¹³³ Meskipun di satu sisi reformasi sistem pendidikan pesantren dengan menggunakan sistem madrasah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi, namun di satu sisi reformasi tersebut bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan. Reformasi atau modernisasi pendidikan

¹³² A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 22.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 24.

pesantren dengan lahirnya madrasah tersebut memunculkan banyak penolakan dan reaksi yang keras dari berbagai kalangan, terutama kelompok konservatif yang sangat anti dengan apa saja yang menyerupai Barat.¹³⁴

Pada perkembangan selanjutnya, pertumbuhan madrasah berjalan semakin cepat dan bahkan banyak berdiri madrasah yang berada di luar atau tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan sistem pendidikan pesantren. Hal tersebut pada prosesnya memunculkan dua tipologi madrasah, yaitu madrasah yang di dalamnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama tanpa ada tambahan ilmu pengetahuan umum –yang selanjutnya disebut dengan madrasah diniyah (Madin)– dan madrasah yang mengajarkan sebagian besar ilmu-ilmu pengetahuan agama dan sebagian kecil ilmu pengetahuan umum –yang selanjutnya disebut dengan madrasah dalam artian yang sama dengan sekolah–. Madrasah jenis yang kedua ini umumnya memberikan porsi pengajaran pengetahuan agama sebanyak 60% - 70%, sedangkan sisanya digunakan untuk mengajarkan pengetahuan umum. Atas dasar tersebut, meskipun jenis madrasah ini tidak memiliki keterkaitan dengan sistem pesantren, namun umumnya tetap dianggap sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri keagamaan.

Pemahaman terhadap tema madrasah di Indonesia seringkali bercampur-aduk antara dua jenis madrasah di atas. Oleh karenanya, untuk menghindari kekeliruan pemahaman perlu kiranya diberi batasan yang tegas agar pemahaman tentang madrasah dalam pembahasan ini tidak melebar kemana-mana. Penting dipahami bahwa pembahasan tentang madrasah disini lebih kepada madrasah dalam pengertian yang umum, yaitu madrasah yang disamakan atau disejajarkan dengan sistem sekolah.

Perlu dipahami juga bahwa secara umum, pembahasan secara spesifik terkait dengan dinamika dan perkembangan madrasah yang berada dalam sistem atau lingkungan pesantren

¹³⁴ Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah...*, hlm. 15.

sangat minim atau bahkan hampir tidak ada. Hal ini diantaranya disebabkan pada perkembangannya, banyak sekali muncul madrasah-madrasah yang formatnya sama dengan madrasah yang ada dalam lingkungan pesantren. Selain itu, meski tidak berada dalam lingkungan pesantren, madrasah-madrasah yang ada umumnya didirikan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat dengan semangat dan tujuan yang sama. Hal ini menyebabkan pembahasan secara khusus mengenai dinamika dan perkembangan madrasah yang berbasis di pesantren menjadi tidak memungkinkan. Pembahasan mengenai madrasah baik yang memiliki keterkaitan kelembagaan dengan pesantren atau yang berdiri sendiri umumnya digeneralisir dan melebur menjadi satu, terutama karena format dan modelnya yang sama.

Sebagaimana pesantren, madrasah mengalami dinamika yang cukup panjang dan bergejolak dalam usahanya memantapkan eksistensinya dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama upayanya untuk memperoleh pengakuan dari negara. Dalam undang-undang tentang pendidikan yang pertama kali terbit pasca kemerdekaan (UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954), madrasah yang dianggap merepresentasikan pendidikan Islam selayaknya pesantren tidak mendapatkan perhatian yang serius dan cenderung dianggap berada di luar sistem pendidikan nasional.¹³⁵ Akibatnya, eksistensi madrasah pada periode ini masih belum terpolakan secara jelas, khususnya dalam hal kurikulum pembelajaran. Prosentase pengetahuan keagamaan dan pengetahuan umum dalam kurikulum madrasah masih beragam sesuai keinginan pengelolanya dan belum seragam secara nasional.

Dinamika dan perkembangan madrasah pada periode ini umumnya terlihat dari upaya untuk menyamai atau setidaknya menyerupai kriteria sekolah umum karena pengakuan dan perhatian pemerintah yang tercurahkan hampir hanya pada sekolah umum. Upaya-upaya yang dilakukan atas nama madrasah dilakukan dalam rangka mendapat pengakuan yang pada akhirnya mendapat sertifikat ijazah yang sah dan berlaku

¹³⁵ Maksum, *Madrasah ...*, hlm. 132.

untuk kepentingan tertentu serta yang pasti mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah. Hal ini mengingat bahwa hanya madrasah yang mengikuti ketentuan pemerintahlah yang akan mendapat bantuan subsidi.¹³⁶ Pada posisi ini, madrasah sebetulnya dihadapkan pada pilihan untuk mempertahankan karakternya sebagai institusi yang lahir dan merepresentasikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam atau kesempatan mendapat pengakuan dan bantuan dari pemerintah dengan syarat mengikuti ketentuan yang ada.

Pada tahap berikutnya, strukturisasi kelembagaan dan reformasi kurikulum madrasah menjadi agenda penting pemerintah, terutama Departemen Agama. Eksistensi madrasah terus diperjuangkan dalam sistem pendidikan nasional, dan secara legal keberadaannya diakui setara dengan sekolah umum pasca-terbitnya SKB tiga menteri pada tahun 1975. Namun demikian, sebaik apapun kebijakan tersebut pada ujungnya tetap membawa konsekuensi mudahnya karakter madrasah secara kelembagaan sebagai lembaga pendidikan yang merupakan hasil pembaharuan dan representasi pesantren. Bahkan hari ini banyak anggapan yang menyebut madrasah bukan lagi sekolah dengan ciri khas agama, melainkan hanya sekolah yang sedikit memiliki jumlah mata pelajaran yang lebih namun jam belajarnya relatif sama.¹³⁷

Secara umum sejak pertama kali muncul sampai akhir abad ke 20, madrasah di Indonesia mengalami berbagai dinamika. Dinamika tersebutlah yang membawa madrasah menjadi lembaga pendidikan seperti yang kita lihat sekarang ini. Namun secara garis besar, dinamika yang dialami oleh madrasah – terutama yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan kurikulum – dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu periode kemunculan sampai sebelum kemerdekaan, periode pasca-kemerdekaan, dan periode pasca-terbitnya SKB tiga menteri. Periode-periode tersebut menggambarkan madrasah pada masa

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

¹³⁷ Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam...*, hlm. 93.

pertumbuhan, masa perkembangan, serta penguatan eksistensi madrasah dalam dunia pendidikan di Indonesia.

1. Periode Pertumbuhan; Dari Kelahiran Sampai Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Lahirnya madrasah di lingkungan pesantren memang terhitung lebih akhir dari pada madrasah-madrasah yang lainnya seperti Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 ataupun Diniyah School (Madrasah Diniyah) yang didirikan pada tahun 1915 oleh Zainudin Labai al-Yunusi. Di kalangan pesantren, madrasah mulai dikenal dan meluas pertama kali pada tahun 1929 ketika KH. Moh. Ilyas diberi tugas menjadi pengawas umum dan pemimpin pesantren salafiyah setelah ia lulus dari HIS. Dengan persetujuan KH. Hasyim Asy'arie, KH. Moh. Ilyas memasukkan mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah serta bahasa melayu.¹³⁸ Bersama sepupunya yang juga merupakan putra KH. Hasyim Asy'arie, KH. Wahid Hasyim -, KH. Moh. Ilyas melakukan terobosan yang benar-benar baru dalam lingkungan pesantren dengan memasukkan mata pelajaran umum dalam madrasah yang sebelumnya hanya mengajarkan pelajaran agama.¹³⁹

Sebelumnya, madrasah salafiyah yang didirikan pada tahun 1919¹⁴⁰ oleh KH. Hasyim Asy'arie hanya khusus mengajarkan pelajaran agama. Madrasah dalam lingkungan pesantren pada batas-batas tertentu juga telah ada sejak tahun 1915, ketika KH. Wahab Hasbullah bersama dengan KH. Mas Manshur mendirikan madrasah taswirul afkar.¹⁴¹ Dalam madrasah-madrasah ini hanya diajarkan pelajaran agama, khususnya pengajaran al-Qur'an, namun dengan menggunakan sistem klasikal. Pada periode ini, madrasah

¹³⁸ Selain mata pelajaran yang telah disebutkan di atas, di Madrasah Salafiyah juga telah diajarkan ilmu hitung. Lihat Zuhairini, Dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 222.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁴⁰ Dalam versi lain disebutkan madrasah salafiyah didirikan pada tahun 1916. Lihat Karel Steenbrink, *Pesantren.....*, hlm. 70.

¹⁴¹ Haidar Putra Daulay, *Historisitas.....*, hlm. 64.

dalam lingkungan pesantren umumnya masih hanya mengajarkan pelajaran agama, akan tetapi dari segi sistem dan metode sudah ada perubahan dari metode sebelumnya.

Hal ini sedikit berbeda dengan madrasah-madrasah yang berdiri di luar lingkungan pesantren. Madrasah-madrasah tersebut pada umumnya telah memasukkan pelajaran umum, atau bahkan didominasi oleh pelajaran umum. Sebagai contoh, Madrasah Adabiyah di Padang yang didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Dalam madrasah ini, perubahan radikal dilakukan oleh Abdullah Ahmad dari sistem surau. Ia merasa tidak puas dengan pengajaran pada surau dan kemudian mengubahnya dengan sistem madrasah yang mata pelajarannya banyak terdiri dari mata pelajaran umum, sedangkan pelajaran agama hanya diberikan selama 2 jam perminggu. Sistem tersebut cukup diterima di Padang, sedangkan di tempat sebelumnya yang juga pernah ia dirikan madrasah – Padang Panjang –, sistem tersebut di tolak sehingga terpaksa madrasah tersebut ditutup. Perubahan yang dilakukan Abdullah Ahmad ini berbeda dengan perubahan yang dilakukan oleh Zainuddin Labay. Perubahan dilakukan Zainuddin Labay secara halus dari sistem surau, dengan mendirikan Madrasah Diniyah yang di dalam kurikulumnya terdapat pelajaran umum seperti sejarah dan ilmu bumi.¹⁴²

Sampai pada tahun 1930, kurikulum yang digunakan dalam madrasah pada umumnya masih berorientasi pada pelajaran agama, terutama pada madrasah yang berbasis pada pesantren. Keadaan ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kebijakan Belanda yang cukup ketat mengawasi perkembangan pendidikan Islam. Mereka khawatir misi eksploitasi dan kristenisasi yang dilancarkan akan terhalangi sebab perkembangan pendidikan Islam, terutama madrasah.¹⁴³ Keadaan semacam ini berlangsung sampai berakhirnya

¹⁴² Karel Steenbrink, *Pesantren.....*, hlm. 38-44.

¹⁴³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

pendudukan Belanda di bumi Nusantara. Meski demikian madrasah tetap mampu memperahankan keberadaannya, dan sebagian darinya mampu berkembang menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada periode setelah tahun 1930, dimana mulai banyak madrasah yang memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya.¹⁴⁴

Dinamika kurikulum madrasah pada periode ini tidak berjalan seragam. Masuknya mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah terjadi secara tidak merata, dan dalam lingkup madrasah yang berbasis pada pesantren perkembangannya cukup lambat karena masih banyak kalangan yang belum bisa menerima kehadiran sistem yang baru tersebut. Prosentase kurikulum madrasah yang membedakan antara pelajaran umum dan pelajaran agama pada waktu itu sangat beragam, dari 30:70 sampai dengan 70:30. Selain itu, dari sisi penjenjangan dan lamanya belajar, sistem madrasah pada periode ini juga masih sangat beragam.¹⁴⁵ Hal ini terjadi karena pada periode ini belum ada standarisasi yang mengatur tentang madrasah. Perkembangan yang terjadi merupakan hasil dari improvisasi dan kebijakan yang dilakukan oleh pengelola tiap-tiap madrasah yang bersangkutan.

Berbeda dengan Belanda, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Pemerintahan Jepang dapat dikatakan sedikit lebih longgar. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi perkembangan pendidikan Islam, salah satunya dalam diri madrasah. Pada masa tersebut, madrasah dikembangkan secara massif untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dari kebijakan Jepang. Situasi tersebut labih menguntungkan lagi bagi madrasah yang berada dalam lingkungan pesantren yang tidak mendapatkan pengawasan secara langsung dari pemerintah Jepang.¹⁴⁶ Memang tidak terdapat laporan yang pasti terkait perkembangan kurikulum yang terjadi

144 Haidar Putra Daulay, *Historisitas.....*, hlm. 65.

145 *Ibid.*, hlm. 73.

146 Hasbullah, *Sejarah Pendidikan.....*, hlm. 70.

pada masa pemerintahan Jepang ini, namun kemungkinan besar yang terjadi dari aspek kurikulum juga berkembang secara massif. Kemungkinan tersebut dapat dilihat dari keadaan kurikulum sebelum Jepang berkuasa dan setelah kemerdekaan Indonesia, yang menampilkan perbedaan yang cukup jauh.

2. Periode Perkembangan; Madrasah Pasca-Kemerdekaan Indonesia

Tidak jauh setelah kemerdekaan Indonesia diraih, pemerintah Indonesia mendirikan Departemen Agama yang salah satu bidang garapannya adalah pendidikan Islam. Secara politik, Departemen Agama inilah yang mempunyai otoritas untuk memperjuangkan Pendidikan Islam dalam ranah kebijakan pemerintah. Dalam posisi demikian, Departemen Agama merupakan representasi dari umat Islam Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan Islam secara lebih luas.

Kemerdekaan yang diraih Indonesia menjadikan kendali kebijakan tidak lagi dipegang oleh kaum kolonial, tetapi beralih ke tangan bangsa Indonesia sendiri. Keadaan yang demikian tersebut menjadikan pemerintah Indonesia bebas menentukan kebijakan yang dirasa sebagai kebutuhan masyarakat. Pendidikan menjadi bagian penting yang dirasa menjadi kebutuhan masyarakat dan Indonesia pada saat itu, dan ketika itu lembaga pendidikan yang ada umumnya adalah sekolah warisan kolonial dan madrasah yang menjadi basis pendidikan umat Islam. Meskipun secara sosial-politik keadaan belum sepenuhnya stabil, pemerintah Indonesia tetap menguasai proses pendidikan bagi masyarakatnya yang sesuai dengan cita-cita negara. Hal itu dibuktikan dengan didirikannya Departemen P&K dan Departemen Agama yang masing-masing memiliki fokus garapan pada bidang pendidikan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, kedua departemen ini berkolaborasi dalam bidang pendidikan di Indonesia.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Zuhairini, Dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 153-154.

Pada periode ini, pola pendidikan diarahkan pada proses konvergensi dan atau kolaborasi antara sekolah dengan madrasah. Hal ini dapat dilihat dari dimasukkannya pelajaran agama pada sekolah umum dan pelajaran umum di madrasah yang diprakarsai oleh Departemen P&K dan Departemen Agama. Proses tersebut belum ditemukan pada lembaga pendidikan sebelumnya yang secara umum hanya satu bidang saja yang digarap, atau walaupun sudah ada, skalanya sangat terbatas seperti di madrasah.

Perkembangan madrasah pada periode ini awalnya berjalan beriringan dengan sekolah umum sebagai upaya pemerintah memajukan pendidikan di Indonesia. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, khususnya yang mengelola madrasah. Hal ini menjadikan madrasah pada periode ini belum memiliki format yang sama, walaupun secara resmi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai pengakuan formal terhadap madrasah.

Dari sisi jenjang, pemerintah telah menetapkan jenjang pendidikan madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 1952. Ketentuan dalam peraturan tersebut menyebutkan jenjang pendidikan madrasah berupa ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah.¹⁴⁸ Sedangkan dari sisi kurikulum, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan berupa Madrasah Wajib Belajar yang kurikulumnya berupa mata pelajaran agama sebesar yang prosentasenya 25%, serta mata pelajaran umum dan keterampilan yang prosentasenya sebesar 75%. Penguasaan keterampilan difokuskan pada bidang ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi sebagai bekal anak didik setelah ia tamat belajar.¹⁴⁹ Namun kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan, yang salah satu sebabnya adalah tanggapan yang kurang dari masyarakat dan penyelenggara madrasah.¹⁵⁰

148 Haidar Putra Daulay, *Historisitas.....*, hlm. 75.

149 *Ibid.*, hlm. 76.

150 *Ibid.*, hlm. 78

Hal tersebut menandakan masih belum menyatunya masyarakat dan penyelenggara madrasah dengan pemerintah yang memiliki otoritas kebijakan. Keadaan ini menyebabkan tidak seragamnya format madrasah, terutama dari aspek konten kurikulumnya. Berbagai usaha dilakukan oleh Departemen Agama, terutama untuk memancing pesantren mengikuti model madrasah yang dikonsep oleh pemerintah atau mendirikan madrasah dengan model yang ditawarkan pemerintah. Untuk menguatkan daya tarik, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan kepada madrasah yang mau mengikuti kehendak Departemen Agama, yaitu dengan memperhatikan pendidikan umum dalam madrasah.¹⁵¹

Usaha pemerintah tersebut cukup membuahkan hasil, dengan banyaknya madrasah di lingkungan pesantren yang dinegerikan atau sekedar mengikuti pola yang ditawarkan oleh pemerintah. Meskipun belum mampu menjangkau semua pesantren, namun banyaknya pesantren yang mulai membuka diri terhadap pola baru ini sudah merupakan progres yang bagus dari usaha pemerintah.

Secara umum, bila kita melihat lembaga madrasah – khususnya yang berada dalam lingkungan pesantren –, pada tahun 1945-1975 kurikulum pendidikan yang dipakai masih berorientasi pada pelajaran agama.¹⁵² Itulah sebabnya mengapa Departemen Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menaungi dan mengembangkan madrasah melakukan upaya yang keras agar eksistensi madrasah semakin diakui dengan cara memajukan pelajaran umum dalam madrasah. Pada periode tersebut, pendidikan umum di madrasah dianggap tidak akan mampu mencapai tingkat yang sama dengan sekolah umum. Anggapan itulah yang oleh Departemen Agama berusaha dihilangkan dengan membuat rumusan kurikulumnya sepertiga berupa pelajaran

¹⁵¹ Karel Steenbrink, *Pesantren*..., hlm. 97.

¹⁵² Muhammad Nasir, "Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah di Asia" *Jurnal Pendidikan Islam Nadwa*, volume 9, Nomor 2, 2015, hlm 6.

agama dan sisanya berupa pelajaran umum.¹⁵³

Anggapan miring yang dilayangkan kepada madrasah serta sering tidak dianggapnya peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional membawa dampak negatif pada eksistensi madrasah. Meskipun hal tersebut sudah berusaha diredam oleh Departemen Agama, namun pada akhirnya tetap ada upaya untuk menghilangkan peran atau bahkan keberadaan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah dalam hal ini berupaya melimpahkan peran Departemen Agama sebagai penaung madrasah kepada Departemen P & K. Upaya ini dianggap sebagai satu upaya menghilangkan keberadaan madrasah karena Departemen P & K dianggap kurang mampu dalam mengelola pendidikan keagamaan.¹⁵⁴ Pro-Kontra terhadap upaya pemerintah ini cukup panjang, namun pada ujungnya polemik ini menempatkan madrasah pada posisi yang lebih baik pada sistem pendidikan nasional.

3. Periode Penguatan Eksistensi: Pasca-Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri

Pada sekitaran tahun 1970, kondisi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mapan. Pada tahun tersebut, terjadi dikotomi keilmuan yang cukup mempengaruhi kondisi pendidikan di Indonesia. Anggapan masyarakat tentang dikotomi keilmuan tersebut kemudian coba diredam oleh pemerintah saat itu dengan keluarnya Kepres No. 34 tahun 1972 tentang penyatuan payung semua lembaga pendidikan dibawah naungan kementrian P&K. Keputusan Presiden (Kepres) tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Inpres No. 15/1974 agar Kepres No. 34 Tahun 1972 segera direalisasikan.¹⁵⁵ Penegasan dengan Inpres tersebut menandakan adanya polemik yang cukup membuat tidak dijalankannya Kepres yang berkaitan. Situasi ini menggambarkan ketegangan yang cukup keras antara

¹⁵³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, "Sejarah Pendidikan Islam", dalam www.pendis.kemenag.go.id. Diakses pada 25 April 2019 pada pukul 09.00 WIB.

¹⁵⁴ Karel Steenbrink, *Pesantren.....*, hlm. 99.

¹⁵⁵ Maksum, *Madrasah.....*, hlm. 146-147.

madrasah dengan sistem pendidikan nasional.

Sadar akan kebaratan dari masyarakat yang “mendukung” keberadaan madrasah, pemerintah kemudian mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Kepres dan Inpres sebelumnya yang salah satu isinya menyebutkan pembinaan madrasah berada pada tanggung jawab Menteri Agama. Dari situ kemudian lahirlah SKB tiga menteri tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah” pada tahun 1975.¹⁵⁶ Keluarnya SKB tiga menteri tersebut selain sebagai pengakuan terhadap eksistensi madrasah juga menjawab keresahan masyarakat akan dihapuskannya sistem madrasah. Dengan SKB tiga menteri tersebut, peran serta madrasah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa mengarah pada pengakuan dan pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan nasional.

Secara umum, kesejajaran antara madrasah dengan sekolah menjadi isi pokok SKB tiga menteri tersebut. Prasyarat yang harus dipenuhi sebuah madrasah untuk mendapat pengakuan kesejajaran dengan sekolah umum adalah dengan memprosentasekan kurikulum sebesar 30% untuk pelajaran agama dan 70% untuk pelajaran umum. Selain kesejajaran pada tingkatan (MI dengan SD, MTs dengan SMP dan MA dengan SMA), dalam SKB tiga menteri tersebut juga menetapkan hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya.
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum setingkat.
- d. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan menteri agama, sedangkan pengelolaan dan pembinaan mata pelajaran umum pada madrasah

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁵⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Sejarah Pendidikan Islam”, dalam www.pendis.kemenag.go.id.

dilakukan oleh menteri P&K, bersama-sama menteri agama dan menteri dalam negeri.

Demi menunjang keberlangsungan dan mendukung maksud yang tertuang dalam SKB tiga menteri pada tahun 1975, Departemen Agama menyusun kurikulum 1976 yang diberlakukan secara intensif sejak tahun 1978.¹⁵⁸ Selanjutnya, Menteri Agama dan Menteri P&K bekerjasama menyusun kurikulum bagi sekolah dan madrasah. Dari proses tersebut, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri P&K No. 0299/U/1984 untuk Departemen P&K; 045/1984 untuk Departemen Agama tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Bagi Departemen Agama, keputusan tersebut menjadi penyempurnaan kurikulum 1976 yang sebelumnya sudah dirancang. Keputusan ini kemudian dikenal dengan kurikulum 1984, yang di dalamnya memuat kurikulum yang baku terutama bagi madrasah. Mata pelajaran agama mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai dengan 'aliyah mulai diperinci dengan prosentase pada masing-masing tingkatan sebesar 30%.

Pembakuan kurikulum dalam kurikulum 1984 ini menjadi langkah pendukung masuknya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Oleh pemerintah, madrasah yang mendapatkan "keuntungan" dari kebijakan ini hanya madrasah yang mau mengikuti pola yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini selanjutnya banyak menarik madrasah dalam lingkungan pesantren untuk mengikuti dan membuka diri dengan kebijakan pemerintah. Civil effect yang muncul dari kebijakan ini menjadi sebabnya, karena ijazah madrasah yang diakui oleh pemerintah hanya diperuntukkan bagi madrasah yang mengikuti kebijakan tersebut. Di lain pihak, para peserta didik dalam lingkungan pesantren mulai mempertimbangkan keberadaan ijazah, sehingga madrasah yang berada di lingkungan pesantren harus mengikuti pola

¹⁵⁸ Maksum, *Madrasah.....*, hlm. 153.

¹⁵⁹ Zuhairini, Dkk., *Sejarah Pendidikan.....*, hlm. 198.

tersebut untuk tetap menarik minat calon santrinya.

Gelombang peralihan dalam diri madrasah nampak besar pada waktu itu bahkan bagi madrasah yang berada dalam lingkungan pesantren. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan akan kualitas pendidikan agama, terutama untuk mencetak generasi yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang mendalam sebagai calon ulama yang tangguh. Madrasah yang berdasarkan SKB tiga menteri dan mengikuti kurikulum 1984 dikhawatirkan tidak memiliki modal yang cukup untuk menjadi ulama yang tangguh. Oleh karenanya, pemerintah melalui Departemen Agama membuka jalur baru pada tingkat 'alimah yang disebut Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Prosentase kurikulum pada madrasah ini sebesar 70% untuk pelajaran agama dan 30% untuk pelajaran umum. Madrasah ini bertujuan menyiapkan lulusan yang menguasai pengetahuan agama secara mendalam sehingga mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam bidang agama.¹⁶⁰

Perkembangan madrasah selanjutnya terjadi ketika terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang secara sah telah menempatkan madrasah dalam bagian sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut membicarakan pendidikan secara umum, namun ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengatur keberadaan madrasah juga terbut dalam UU tersebut. berdasarkan peraturan tersebut, madrasah dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah memiliki kedudukan yang sama dengan sekolah umum. Perbedaannya terletak pada ciri khas Islam yang melekat dalam diri madrasah sebagai landasan pengakomodasian kepentingan keagamaan.¹⁶¹

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 2 Tahun 1989 ini, pemerintah menyusun kurikulum baru sebagai penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini selanjutnya dikenal dengan kurikulum 1994. Secara

¹⁶⁰ M. Ridhwan Nashir, *Mencari Tipologi.....*, hal. 94-95. Lihat juga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, "Sejarah Pendidikan Islam", dalam www.pendis.kemendik.go.id.

¹⁶¹ A, Malik Fajar, *Madrasah...hlm. 33*.

umum, kurikulum ini tidak mempengaruhi jam pelajaran serta karakter pendidikan keagamaan siswa. Kurikulum ini dirancang hanya untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan tidak terlalu berpengaruh terhadap pendidikan agama baik di sekolah maupun di madrasah.¹⁶²

Secara umum pada periode ini pendidikan madrasah diarahkan pada bentuk yang seragam, baik dari sisi jenjang maupun kurikulum. Pada periode ini pula madrasah mengalami perubahan dari berbagai macam aspek, terutama pada aspek kurikulum yang memberikan madrasah tempat dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan madrasah pada periode ini memiliki kesetaraan dengan sekolah umum, dimana siswa dan lulusannya diakui dan mendapatkan tempat yang sama seperti sekolah umum. Kondisi tersebut berlangsung dan bertahan hingga saat ini dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang diperlukan.

Namun demikian, bukan berarti eksistensi yang ditunjukkan madrasah semenjak SKB tiga menteri tersebut tanpa menimbulkan masalah. Meski secara kelembagaan madrasah telah menempati posisi yang “aman”, namun di sisi lain madrasah seperti kehilangan – atau setidaknya kurang jelas – orientasinya. Posisi yang ditempati madrasah saat ini secara tidak langsung melemahkan atau bahkan mendangkalkan misi madrasah yang mempunyai ciri intrinsik keilmuan agama Islam. Selanjutnya, madrasah dengan kondisi yang sekarang tidak mampu melahirkan generasi yang secara kualitas keagamaan “mumpuni”, dan pada gilirannya tidak akan mampu menyediakan tenaga ahli agama yang menyebabkan kesenjangan antara Islam dan pemeluknya.¹⁶³ Pada kenyataannya sekarang, masalah inilah yang umumnya dihadapi oleh madrasah yang perlu mendapat perhatian secepatnya.

¹⁶² Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Sejarah Pendidikan Islam”, dalam www.pendis.kemendiknas.go.id.

¹⁶³ Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, “Madrasah Dari Masa ke Masa” dalam *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. VII (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 293-294.

C. Dinamika Hubungan Kesalingterkaitan Pesantren dan Madrasah

Secara historis, lembaga pendidikan Islam pesantren sejak pertama kali berdiri memiliki ciri khas yang menempel dalam lembaga tersebut, yaitu kemandirian. Kemandirian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat meliputi berbagai hal, seperti kemandirian dalam hal pembiayaan, kurikulum atau materi yang diajarkan bahkan juga kepemimpinan dan pengelolaannya secara umum. Kemandirian tersebut mencerminkan kekuatan kokoh yang dimiliki pesantren, sehingga tanpa campur tangan dan bantuan dari pemerintah pun pesantren tetap dapat bertahan dan berkembang mengikuti perubahan zaman.

Dinamika panjang yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia di satu sisi hampir selalu menempatkan lembaga tradisional ini pada posisi yang terabaikan, namun di sisi yang lain eksistensinya tidak bisa dihilangkan. Dari sejarahnya, lembaga pendidikan pesantren yang dahulu hanya menyediakan pengajaran untuk mendalami agama dan hanya dengan menggunakan sistem klasik – bandongan dan wethonan –, lambat laun mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Jika kita lihat, cukup banyak penyesuaian yang terjadi dalam pesantren yang diantaranya dimulai pada awal abad ke 19 dengan dimasukkannya materi-materi selain topik keagamaan dalam kurikulum pesantren. Penggunaan sistem klasikal dalam proses pengajaran serta lahirnya madrasah dalam lingkungan pesantren untuk mengimbangi pengaruh pendidikan kolonial di masyarakat juga merupakan dinamika perkembangan dalam pesantren.

Selain itu, pasca-kemerdekaan, pesantren dan juga madrasah – sebagai lembaga yang merepresentasikan pesantren – tetap mengalami dinamika yang kompleks. Kurikulum madrasah yang semula memuat 70% materi agama dan sisanya materi umum dituntut untuk melakukan perubahan dengan kurikulum yang minimal memuat 70% materi umum. Meskipun pada akhirnya tuntutan tersebut tetap dipenuhi, pada dasarnya pengembangan

yang dilakukan ini diawali dengan dilema yang mendalam.¹⁶⁴ Pesantren dan juga madrasah, yang notabene adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan pengetahuan keagamaan an sich diharuskan untuk memasukkan pengetahuan umum yang bahkan pernah dihindarinya. Dilema yang menyelimuti tersebut antara mempertahankan identitas kesejarahan sebagai lembaga pencetak ulama dan faqih (orang yang menguasai hukum fiqh) atau mengikuti tuntutan modernisasi dengan memasukkan pendidikan non-keagamaan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.

Tidak sampai disitu saja, pengelolaan madrasah yang awalnya berada dibawah naungan hukum Departmen Agama hendak dipindahkan kewenangan pengelolaannya kepada Kementerian P&K melalui Kepres No. 34 Tahun 1972 tentang penyatuan payung semua lembaga pendidikan dibawah naungan kementrian P&K. Keputusan Presiden (Kepres) tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Inpres No. 15/1974 agar Kepres No. 34 Tahun 1972 segera direalisasikan.¹⁶⁵ Langkah yang diambil oleh pemerintah waktu itu kemungkinan besar dilakukan dengan maksud untuk meredakan anggapan dikotomik di kalangan masyarakat antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Namun secara kelembagaan yang menjadi korban dalam upaya tersebut adalah madrasah. Upaya penyatuan pengelolaan tersebut direspon dengan penolakan terutama dari para pendukung lembaga pendidikan tradisional yang khawatir madrasah akan kehilangan karakter dan keterikatan dengan pesantren. Problematika dan dinamika tersebut kemudian diselesaikan dengan lahirnya SKB tiga menteri tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah” pada tahun 1975. SKB tersebut sebagai tindak lanjut dari Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang intinya bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab Menteri Agama dan statusnya setara dengan sekolah-sekolah umum sesuai tingkatannya.¹⁶⁶

219. ¹⁶⁴ Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto Modernisasi...* hlm.

¹⁶⁵ Maksum, *Madrasah...* hlm. 146-147.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 149.

Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi dalam dunia pesantren, satu poin penting yang dapat ditemukan adalah bahwa di Indonesia, proses modernisasi pendidikan Islam yang terjadi tidak serta merta mengusir dan menghilangkan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan madrasah. Di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti di Malaysia, lembaga pendidikan Islam sejenis pondok pesantren pada akhirnya kehilangan eksistensinya karena tidak mampu mengakomodir tuntutan modernisasi dengan mengkombinasikan intelektualisme dan mistisisme. Berbeda dengan di Indonesia, pondok pesantren tetap bertahan karena mampu mengakomodir dan mengkombinasikan keduanya.¹⁶⁷ Diantara salah satu buktinya adalah banyak bermunculannya madrasah yang lahir dari pesantren tradisional yang mulai berkenan memasukkan materi-materi umum meskipun hanya dengan prosentase 30% dan sisanya tetap dengan materi keagamaan.

Madrasah-madrasah yang lahir dari pesantren tradisional tersebut pada prosesnya juga harus menyesuaikan lagi dengan tuntutan-tuntutan modernisasi. Dimulai pada tahun 70-an, madrasah-madrasah ini dituntut untuk menerapkan kurikulum pemerintah dengan keharusan menambah prosentase materi-materi umum menjadi 70%. Lukens-Bull menyebutkan bahwa langkah yang dilakukan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang merepresentasikan karakter pesantren dengan menerapkan kurikulum dari pemerintah yang memiliki prosentase 70% materi umum dan 30% materi agama merupakan sebuah strategi untuk menegosiasikan modernisasi dan globalisasi.¹⁶⁸ Langkah tersebut diambil selain sebagai konsekuensi lahirnya SKB tiga menteri agar suatu madrasah dapat memiliki status setara dengan sekolah umum setingkatnya, juga merupakan langkah untuk memastikan terakomodirnya dinamika perkembangan zaman berupa modernisasi dan globalisasi serta tetap kokohnya eksistensi pesantren ataupun madrasah sebagai penjaga moralitas

¹⁶⁷ Ronald Lukens-Bull, "Madrasah By Any Other Name Pondok, Pesantren, and Islamic School in Indonesia and Southeast Asian Region", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 04 Nomor 01, 2010, hlm. 4.

¹⁶⁸ Ronald Lukens-Bull, *A Peaceful Jihad*:....., hlm. 2005.

bangsa di tengah perkembangan zaman.

Proses modernisasi yang dilakukan dalam dunia pesantren ini pada satu sisi merupakan langkah fenomenal demi menjaga eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Melalui adaptasi yang dilakukan dengan mengikuti tuntutan zaman ini, pesantren tidak hanya tetap eksis, namun juga mampu berkembang pesat dengan pola pendidikan baru yang tercermin dalam bentuk sekolah/madrasah di dalamnya. Namun di sisi yang lain, pada perkembangannya, posisi sekolah/madrasah yang ada dalam lingkungan pesantren ini berdiri seakan mempunyai otonomi tersendiri dan terpisah dari sistem pesantren. Sehingga meskipun madrasah diklasifikasikan sebagai sekolah umum berciri khas Islam, kualitas output dari madrasah cenderung tidak maksimal dan dianggap serba tanggung. Sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, madrasah tidak mampu mencetak generasi yang berpengetahuan keagamaan mendalam, dan sebagai sebuah sekolah yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan umum, madrasah kurang mampu melahirkan generasi ilmunan yang unggul dalam bidang pengetahuan umum, dalam hal ini pengetahuan yang diajarkan masih cukup rendah dan kurang memadai.¹⁶⁹

Proses menegosiasikan modernitas dengan identitas yang dilakukan dalam dunia pesantren dengan lahirnya madrasah yang kemudian diikuti pula dengan penerapan kurikulum pemerintah dalam sistem madrasah merupakan salah satu cara agar masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan pesantren. Modernisasi disikapi oleh kalangan pesantren dengan berusaha tetap menampilkannya dengan tampilan yang Islami. Kombinasi dari pelatihan agama dan mengembangkan karakter di pesantren serta pendidikan umum di sekolah/madrasah diarahkan untuk menciptakan generasi yang dapat hidup dan berkompetisi di arena global namun dengan tetap memegang nilai-nilai luhur yang ada.¹⁷⁰ Upaya yang berjalan untuk memadu modernitas

169 Raharjo, "Madrasah Sebagai The Centre of Excellence", dalam Ismail, Dkk. (ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 227-228.

170 Ronald Lukens-Bull, "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a Globalizing Era", *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3, 2000, hlm. 42.

dalam dunia pesantren ini kemudian menjadi tren yang banyak diikuti oleh hampir sebagian besar pesantren yang ada. Sehingga hari ini hampir dapat dipastikan sebagian besar pesantren yang ada di Indonesia sudah memiliki sekolah/madrasah di dalamnya.

Kenyataan tersebut juga didukung dengan fakta bahwa hampir sebagian pesantren mengklasifikasikan dirinya sendiri dengan sebutan “terpadu”, atau menerapkan sistem terpadu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keinginan yang besar dari kalangan pesantren agar dilihat sebagai sebuah institusi yang seimbang antara pendidikan agama secara tradisional dan pendidikan modern sebagai sebuah kebutuhan.¹⁷¹ Namun terma “seimbang” dalam ungkapan tersebut pada kenyatannya hanya dipraktekkan dengan adanya sebuah institusi yang menggambarkan dan mewakili keduanya, pesantren dan sekolah/madrasah. Secara substansial, praktek pendidikan yang terjadi di dalamnya justru tidak mencerminkan demikian. Dengan kata lain, untuk tidak mengatakan kontradiktif, pola pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pesantren yang sekaligus terdapat sekolah/madrasah didalamnya hampir sebagian besar tidak sinergis-integratif. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sistem pendidikan yang terpisah antara sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan sekolah/madrasah tersebut. Pesantren memiliki dan umumnya memilih sistem pendidikan sendiri dengan sitem tradisionalnya, sedangkan sekolah/madrasah yang ada di lingkungan pesantren tersebut umumnya menerapkan sistem pendidikan dengan mengacu pada sistem pemerintah.

Secara historis, modernisasi pesantren dengan lahirnya madrasah merupakan upaya kalangan pesantren untuk mengakomodasi tantangan dan tuntutan zaman. Itulah sebabnya mengapa madrasah pada awal-awal pertumbuhannya di Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah pembaharuan dalam hal metode pengajaran dan penjenjangan. Madrasah sepenuhnya menjadi “bentuk baru” pendidikan pesantren dengan pola pengajaran yang berbeda namun tetap dengan konten atau materi yang sama. Dalam hal konten atau materi yang diajarkan, hanya

171 Ronald Lukens-Bull, “Madrasah....”, hlm. 11.

ada sangat sedikit perbedaan antara pesantren dan madrasah yaitu ditambahkan materi-materi baru akibat tuntutan dan kesadaran kalangan pesantren akan pentingnya materi-materi tersebut dalam rangka membangun sebuah negara-bangsa.

Pengaruh yang sangat kuat dari model persekolahan yang diterapkan Belanda serta tuntutan penyesuaian dari masyarakat untuk mengadakan pendidikan sebagaimana yang dijalankan Belanda sebenarnya tidak begitu berpengaruh bagi madrasah, terutama yang berada di lingkungan pesantren. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari konsistennya madrasah menerapkan kurikulum yang berisikan 60%-70% ilmu pengetahuan agama dan 30%-40% ilmu pengetahuan umum. Konsistensi tersebut terus mendapatkan ujian seiring berkembangnya waktu, namun setidaknya masih banyak yang tetap mampu bertahan dengan format tersebut setidaknya sampai menjelang berakhirnya orde baru. Sampai titik ini, hubungan yang kuat dan sinergis-integratif antara pesantren masih sangat kuat dengan memainkan peran yang saling melengkapi dan saling mendukung.

Pada perkembangan selanjutnya, secara perlahan banyak pesantren yang beralih fokus pada pendidikan model persekolahan dalam bungkus yang tetap islami, madrasah. Pergeseran ini secara perlahan membawa konsekuensi pada penurunan kualitas dan mutu keilmuan bidang agama di pesantren.¹⁷² Yang patut disayangkan kemudian adalah bahwa kecenderungan atau pergeseran fokus tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan madrasah yang dikelola, dimana umumnya madrasah tersebut secara umum juga memiliki mutu pendidikan non-keagamaan yang kurang baik. Hal tersebut diperparah lagi dengan belum adanya pengakuan legal tentang kesetaraan antara madrasah dan sekolah. Madrasah masih dianggap sebagai sistem persekolahan kelas dua setelah sekolah umum, disamping juga tidak mendapat dukungan dari pemerintah.

Pola hubungan sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah pada akhirnya menjadi kabur –untuk tidak mengatakan

¹⁷² Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga Tradisi di Tengah Tantangan*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), hlm. 79.

tidak ada— ketika kebijakan pengakuan kesetaraan madrasah telah terbit. Kebijakan tersebut, di satu sisi memberi angin segar bagi perkembangan madrasah dari sisi legalitas —meskipun realitasnya madrasah tetap dalam keterpurukan—, namun di sisi lain memberikan dampak yang tidak menyenangkan bagi pola hubungan sinergis-integratif pesantren dan madrasah. Hal ini dikarenakan melalui peraturan yang terbit tersebut, madrasah tidak bisa tidak harus menerapkan kurikulum yang rancang oleh pemerintah. Di pihak lain, perencanaan kurikulum tersebut hampir sama sekali tidak memperhatikan atau mempertimbangkan keberadaan pesantren serta madrasah/sekolah yang berada dan berbasis di pesantren.

Konsekuensi penerapan kurikulum nasional dalam madrasah menjadi suatu yang tidak dapat dihindari sehingga semua madrasah wajib menerapkan kurikulum dengan prosentase 70% ilmu pengetahuan umum dan sisanya ilmu pengetahuan agama. Madrasah kemudian diidentifikasi sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, namun sebagian memaknainya sebagai pelemahan eksistensi pendidikan Islam. Beberapa persoalan kemudian muncul terutama terkait dengan berkurangnya muatan materi pendidikan agama yang dianggap sebagai upaya pendangkalan pemahaman agama. Selain itu, pada posisi yang demikian madrasah dianggap sebagai institusi yang serba tanggung karena tidak bisa memproduksi pengetahuan agama maupun pengetahuan umum yang unggul dengan berbagai alasannya.¹⁷³

Sementara pengelolaan madrasah terus dilakukan dan didorong sampai pada pengakuan kesetaraan, pesantren tetap belum mendapat pengakuan yang legal dari pemerintah. Hubungan antara pesantren dan madrasah yang berbasis pesantren pun semakin tampak buram karena pengelolaannya yang perlahan beralih menjadi otonom. Madrasah dikelola dengan manajemen tersendiri dan umumnya lebih diutamakan dan diperhatikan untuk mengejar ketertinggalan dengan sekolah umum, sementara pesantren dikelola nyaris seadanya dan tidak

¹⁷³ Raharjo, "Madrasah...", hlm. 228.

terlalu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pesantren dan madrasah yang merupakan “anak” dari pesantren telah “berakhir”. Dua institusi ini berjalan sendiri-sendiri dengan tujuannya masing-masing yang orientasinya cenderung berbeda.

Modernisasi dalam pesantren yang pada akhirnya keluar dari ekspektasi awal tersebut sebenarnya telah menjadi kekhawatiran oleh banyak kalangan dan juga sudah diwanti-wanti oleh banyak pihak, termasuk Gus Dur. Gus Dur, sebagaimana dipaparkan oleh Shidiq, mengingatkan agar pembaharuan atau modernisasi dalam pesantren perlu adanya pencegahan terhadap kemungkinan munculnya intelektualisme yang dangkal. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif terhadap pembaharuan pesantren yang berhenti hanya dalam tataran teknis, yang terkesan hanya menempatkan santri sebagai ‘peradaban teknis’ dari pembangunan. Karenanya, pendidikan Islam harus dipahami secara komprehensif dan integratif.¹⁷⁴

Hampir di semua institusi pesantren yang di dalamnya ada madrasah/sekolah, sinergitas antara kedua lembaga tersebut dapat dikatakan tidak ada, atau setidaknya hanya terlihat di sebagian kecil aspek dan biasanya itupun tidak maksimal. Semisal sebagai penunjang untuk mendapatkan rekomendasi pendaftaran beasiswa santri berprestasi yang diadakan oleh Kemenag sehingga seseorang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selebihnya, sinergi institusi yang dapat memberikan pengaruh positif diantara keduanya tidak terlihat lagi.

Banyaknya penyelenggaraan madrasah baik MI, MTs, MA yang berada dalam naungan pesantren sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan satu mekanisme tersendiri guna menutupi kekurangan pelajaran dan pendidikan agama dalam kurikulum madrasah serta mengoptimalkan pembelajaran pelajaran umum. Seperti sering terlontar di tengah-tengah masyarakat, kurikulum madrasah sekarang ini sangat memungkinkan para siswanya mendapatkan ilmu pengetahuan

¹⁷⁴ Rohani Shidiq, *Gus Dur: Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 177.

agama yang jauh dari memadai serta pemahaman dan penghayatan Islam yang dangkal. Madrasah yang berada di bawah naungan pesantren memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menambah kekurangan ilmu pengetahuan agama atau justru memperolehnya hanya dari sistem pesantren melalui pengajian-pengajian kitab atau pembelajaran yang didesain lebih terstruktur di bawah bimbingan para kiai atau ustad yang kompeten. Selain itu, dengan tinggal di pondok pesantren, siswa madrasah dapat memperoleh bimbingan dan kesempatan menjalankan agama lebih intensif.¹⁷⁵

Mengingat dulunya sekolah/madrasah yang berada di lingkungan pesantren merupakan “kepanjangan tangan” dari pesantren, maka usaha untuk mensinergikan dan mengintegrasikan kembali sistem pendidikan yang ada di pesantren dan madrasah ke dalam satu sistem sinergis-integratif bukanlah suatu yang mustahil, meskipun juga tidak sepenuhnya mudah. Langkah tersebut dapat dianggap sebagai sebuah refleksi dan evaluasi terhadap modernisasi atau pembaharuan dalam sistem pesantren yang dahulu banyak dikampanyekan namun dalam prakteknya justru lepas kendali sehingga pesantren kehilangan perannya di madrasah dan madrasah kehilangan karakter keagamaan sebagai lembaga yang merepresentasikan pesantren. Proses modernisasi yang terjadi seolah hanya sebuah perpindahan dari satu titik ekstrim pendidikan (agama sentris) ke titik ekstrim pendidikan yang lain (hanya pengetahuan umum). Karenanya, refleksi dan evaluasi pembaharuan pesantren dengan menggagas pendidikan yang sinergis-integratif dirasa sangat perlu untuk kembali menempatkan pendidikan pada track yang benar dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya.

D. Mengapa Harus Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam?

Berbicara tentang lembaga pendidikan dalam diskursus pendidikan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan yang berkembang

¹⁷⁵ A. Malik Fajar, *Madrasah...*, hlm. 30.

dan mewarnai dunia pendidikan kita. Meski demikian, jika dilihat dari perspektif sejarah, lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia pada periode-periode awal dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren secara umum diyakini merupakan lembaga pendidikan indigeneous yang telah berurat-akar dalam budaya Nusantara, sedangkan sekolah dianggap sebagai model pendidikan warisan Belanda. Keduanya tetap bertahan dan berkembang sampai sekarang, dan proses diversifikasi kelembagaan dari dua jenis lembaga tersebut melahirkan adanya banyak pola pendidikan yang berjalan di Indonesia.

Tanpa bermaksud mereduksi keberadaan lembaga pendidikan yang bermacam-macam tersebut, apabila dilakukan generalisasi, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dapat dibedakan dalam dua arus besar, yaitu pola pendidikan pesantren dengan berbagai diversifikasinya dan pola persekolahan dengan berbagai bentuknya. Dua arus besar ini seringkali dihadap-hadapkan hingga menunjukkan perbedaan-perbedaan di antara keduanya, dan umumnya berujung pada demonstrasi keunggulan salah satu serta justifikasi kelemahan yang lain. Padahal sebagaimana juga telah menjadi pemahaman umum, dua pola pendidikan ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tidak dapat dielakkan. Sikap untuk mempertegas garis perbedaan di antara keduanya secara tidak langsung merupakan upaya melanggengkan dikotomi yang telah meracuni sistem pendidikan kita.¹⁷⁶ Karenanya, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah mencari titik temu di antara keduanya untuk menemukan format pendidikan yang sesuai dengan karakter kepribadian bangsa serta responsif terhadap perkembangan.

¹⁷⁶ Meski harus diakui bahwa dikotomi yang terjadi secara umum tidak hanya terjadi pada dunia pendidikan, melainkan sudah merasuk dalam setiap lini kehidupan umat muslim khususnya. Menurut Abdurrahman Mas'ud, secara historis dikotomi yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang cukup kompleks yang meliputi sikap mental umat yang dikotomis baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan serta tribalisme baru berupa fanatisme mazhab yang berlebihan. Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 122.

Dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia sudah sepatutnya menerapkan pendidikan yang dapat menunjang terbentuknya pribadi yang sempurna sebagai seorang muslim serta unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal pembangunan bangsa. Dari gambaran ideal arah pendidikan tersebut, jika dilihat dari satu sisi maka tidak bisa dilepaskan dari implementasi pendidikan Islam. Tanpa bermaksud mengesampingkan lembaga persekolahan, akan tetapi jika berbicara pendidikan Islam dalam konteks Indonesia, maka pesantren seharusnya tidak dapat dipisahkan. Artinya, bangunan sistem pendidikan Islam di Indonesia setidaknya harus mencakup sistem pesantren di dalamnya. Hal ini bukanlah suatu yang berlebihan mengingat peran besar yang dijalankan oleh pesantren selama ini.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan asli nusantara terbukti telah mampu melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks pembentukan muslim sejati misalnya, pesantren telah banyak memperlihatkan bukti keberhasilan dengan sistem pendidikan yang berjalan di dalamnya. Dalam sistem pendidikan pesantren, ajaran agama tidak hanya diajarkan sebagai sebuah pengetahuan, namun juga diharuskan adanya realisasi dalam bentuk ketaatan serta kesesuaian dalam pelaksanaannya. Yang demikian tersebut tidak atau belum dimiliki oleh lembaga pendidikan lain selain pesantren.

Ajaran agama merupakan suatu yang aplikatif dan bukan sebatas sebuah pengetahuan. Ia tidak cukup hanya diajarkan dan kemudian dinilai berdasarkan pengetahuan serta penguasaan seseorang tentang definisi-definisi, rukun-rukun ataupun hukum-hukum yang ada dalam ajaran tersebut. Tolok ukurnya adalah perwujudannya atau implementasinya dalam perilaku sehari-hari. Nilai dari pengetahuan tentang ajaran agama tersebut terletak pada pengamalan atau aplikasi dalam kehidupan seseorang. Dalam diskursus teori pembelajaran, ajaran agama yang dibreakdown ke dalam kurikulum pembelajaran agama tidak hanya cukup sampai dimensi kognitif. Dalam khazanah Islam, dikenal istilah al

ilmu bila ‘amalin ka asy-syajaru bila tsamarin yang menunjukkan keharusan dalam menjalankan suatu ilmu yang diketahui. Maka dari itu dibutuhkan komponen pendidikan yang dapat mendukung seseorang untuk menerapkan dan mengaplikasikan apa yang telah diketahuinya tersebut. Komponen tersebut dimaksudkan agar ajaran agama yang telah diketahui dan dikuasai melalui proses pendidikan dapat diamalkan dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Esensi pendidikan Islam adalah terdapatnya unsur iman, ilmu dan amal dalam totalitas teori dan praktek suatu pendidikan.¹⁷⁷ Suatu kegiatan atau lembaga bisa dikategorikan sebagai “pendidikan Islam” manakala di dalamnya di kembangkan secara harmonis ketiga unsur tersebut. Sajauh ini, lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang secara eksplisit menggambarkan ketiganya barangkali hanya pesantren. Lebih dari itu, dalam rangka pembentukan karakter sebagaimana yang booming di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu karakter yang Islami, terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mewujudkan karakter tersebut yang meliputi *moral acting* dengan cara habituasi (pembiasaan) dan pembudayaan, *moral knowing*, *moral feeling and loving*, serta *moral modeling*.¹⁷⁸ Semua rukun ini tidak berlebihan jika dikatakan telah tersedia dan berjalan dalam mekanisme pendidikan pesantren.

Selain itu, jika ditelaah dari tinjauan filosofis edukatif modern, sebagaimana disebutkan Djauhari, sistem pendidikan pesantren memiliki beberapa keunggulan kompetitif dibandingkan sistem pendidikan lainnya. keunggulan tersebut diantaranya berupa:¹⁷⁹

1. Orientasi pendidikan pesantren tertuju pada pendidikan berbasis masyarakat (community based education);
2. Keunggulan visi pendidikan pesantren dalam

¹⁷⁷ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam; Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 80.

¹⁷⁸ Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*, (Yogyakarta: Pascasarjana FITK, 2018), hlm. 285.

¹⁷⁹ Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum Terselesaikan*, (Jakarta: TAJ Publishing, 2008), hlm. 81-83.

mengimplementasikan fungsi ibadah kepada Allah;

3. Misi ganda menyiapkan SDM berkualitas imaniyah, ilmiah dan amaliyah serta menyiapkan kader pemimpin yang memahami agama;
4. Sejak dini telah menekankan pentingnya niat tulus karena Allah dalam mencari ilmu;
5. Arah pendidikan yang tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal kemasyarakatan;
6. Orientasi ilmu pada kebermanfaatan bukan sekedar content oriented.
7. Fungsi pemimpin pesantren yang tidak hanya sebagai leader, tetapi juga *moral force* bagi lingkungan pesantren; dan
8. Mengedepankan kerja pendidikan, pengasuhan dan pembudayaan dengan prinsip keteladanan dan pendampingan yang lebih dari sekedar pengajaran yang bersifat verbal dan retorik.

Pendapat lain menyebutkan, sistem pendidikan yang berjalan di pesantren jika dibandingkan dengan pendidikan formal secara keseluruhan menunjukkan beberapa kelebihan, diantaranya sistem pemondokan yang memungkinkan kiai melakukan tuntutan dan pengawasan kepada santri secara langsung, hubungan personal (keakraban) yang terbangun antara santri dan kiai memungkinkan pendidikan yang kondusif, sistem pendidikan yang menunjang kemandirian dan kesederhanaan serta pendidikan yang murah dan terjangkau.¹⁸⁰ Singkatnya, dalam hal urusan pembinaan moral khususnya, pesantren lebih unggul dan lebih bisa diandalkan dibandingkan lembaga pendidikan formal. Moral yang terpuji sebagai cerminan keberagamaan seorang muslim secara umum lebih mudah terbentuk dengan sistem pendidikan di pesantren. Meski begitu, bukan berarti pesantren sepenuhnya merupakan lembaga yang tanpa kekurangan. Kritik-kritik yang diarahkan kepada pesantren sebagian besar

¹⁸⁰ Rohani Shidiq, *Gus Dur...*, hlm. 163. Lihat juga Agus Sunaryo, *Identitas Pesantren Vis a Vis Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), hlm. 38.

sampai hari ini masih relevan seperti pola kepemimpinan kiai, metodologi yang digunakan dalam pengajaran yang dirasa tidak efisien dan lain-lain.¹⁸¹

Selain memainkan fungsi didaktis dalam hal pendidikan serta penanaman nilai dan moral, lembaga pendidikan pesantren secara umum juga memiliki banyak peran lain. Misalnya saja semangat perjuangan pesantren yang secara tidak langsung mencerminkan semangat menjaga kesatuan NKRI, desiminasi Islam yang ramah dan toleran serta desiminasi budaya damai pesantren dalam masyarakat. aspek-aspek ini sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan mengapa revitalisasi sistem dan karakter pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam perlu dilakukan.

Lembaga pendidikan Islam yang telah ada di Indonesia seperti pesantren, madrasah dan lainnya sebenarnya memainkan peranan vital dan merupakan unsur penting dalam menciptakan keberislaman masyarakat muslim Indonesia yang ramah, toleran dan inklusif. Pola keberislaman yang demikian itu sesungguhnya telah tertanam dalam diri masyarakat muslim Indonesia. Namun belakangan muncul berbagai aliran dan paham yang secara perlahan merubah karakter keberislaman masyarakat muslim Indonesia yang inklusif menjadi eksklusif, yang ramah menjadi keras dan lain sebagainya. Hal ini berpotensi besar menyulut api konflik dan perpecahan antar sesama anak bangsa yang membahayakan keutuhan NKRI.

Ideologi transnasional yang berkembang menembus batas-batas wilayah telah masuk juga di Indonesia. Ideologi ini umumnya disebut dengan ideologi salafi dan ideologi syiah. Dengan masuknya ideologi transnasional ini, maka upaya penyebarannya doktrin ideologi tersebut pasti akan terjadi. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari banyak bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berideologi salafi. Lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh pengikut

¹⁸¹ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kririk Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hlm. 63-72.

ideologi ini mulai berkembang pesat di Indonesia.¹⁸² Jika ideologi transnasional dapat masuk dan berkembang dengan subur di Indonesia serta dapat mempengaruhi masyarakat muslim Indonesia, maka dapat dikatakan ideologi tersebut mampu mencapai kemenangan. Hal tersebut akan berpengaruh pada cara keberislaman muslim Indonesia secara umum, karena sebagaimana kita ketahui, paham-paham transnasional memiliki prinsip yang berbeda dengan cara keberislaman muslim Indonesia pada umumnya dan cenderung bertolak belakang.¹⁸³

Dengan karakter keberislaman yang berbeda, munculnya lembaga pendidikan transnasional akan banyak mempengaruhi dan berpotensi merubah karakter keberislaman masyarakat muslim Indonesia mengalahkan pengaruh pesantren. Jika sudah demikian, maka peran pesantren dalam menciptakan masyarakat muslim yang ramah, toleran dan eksklusif akan tergeser dengan ideologi baru tersebut. Disinilah peran pesantren dituntut untuk tampil dalam upaya menanggulangi paham-paham yang mengarah pada gerakan radikalisme. Pesantren harus tampil kembali sebagai ujung tombak penyebaran Islam yang berkarakter ramah, toleran dan inklusif sebagaimana masyarakat muslim Indonesia selama ini dikenal.¹⁸⁴

Dalam perjuangannya menyebarkan Islam yang ramah dan wasathiyah tersebut, penguatan dan massifikasi pendidikan pesantren perlu digaungkan mengingat penyebaran lembaga-lembaga pendidikan Islam salafi yang dipersepsikan “radikal” terus meluas. Pesantren-pesantren terutama yang berhaluan ahlussunnah wal jama’ah yang bijak dalam mengakomodasi tradisi lokal sebagaimana yang berkembang di Indonesia sebagai sebuah lembaga indigeneous perlu dihidupkan kembali perannya, terutama dalam menanggulangi kemunculan-kemunculan

182 Noorhaidi Hasan, “Salafi Madrasahs and Islamic Radicalism in Post-New Order Indonesia, dalam Kamaruzzaman Bustam-Ahmad dan Patrick Jory (Ed), *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia*, (Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan, 2011), hlm. 97.

183 Ali Muhtarom, *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia*, (yogyakarta: Zahir Publishing, 2019), hlm. 154.

184 Jamal Ma'mur Asmani, *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 209.

gerakan yang mengarah pada radikalisme. Karena sebagaimana yang telah terbukti selama ini, kalangan pesantren tradisional ini memiliki keseriusan dalam mendukung perdamaian, resolusi konflik dan penjagaan atas kehidupan pluralitas dalam perbedaan etnis dan agama.¹⁸⁵

E. Konsep Sinergi Pesantren dan Madrasah Sebagai Model Alternatif Pendidikan Islam Indonesia

Problem dan dilema pendidikan Islam Indonesia yang terjadi sampai hari ini adalah tidak atau sulit terpenuhi dan terealisasinya idealisme serta harapan dari tujuan pendidikan Islam, yaitu terwujudnya manusia yang kamil sebagai ‘abdullah (hamba Allah Swt) dan manusia yang kompeten sebagai khalifatullah (wakil Allah Swt di muka bumi). Tidak terwujudnya idealisme tujuan pendidikan Islam tersebut bahkan disinyalir telah terjadi sejak Indonesia berdiri yang tergambarkan dari sejarah dinamika dan tarik ulur dalam hal kebijakan pendidikan. Terwujudnya tujuan pendidikan Islam di Indonesia ini menghendaki dan dapat digambarkan dengan lahirnya manusia, yang dari perspektif keilmuan menguasai baik pengetahuan agama untuk menjalankan peran dan kewajibannya sebagai hamba serta pengetahuan umum (pengetahuan alam) untuk memajukan dan menjalankan peran sebagai khalifah.

Realitas yang terjadi hari ini adalah penguasaan parsial terhadap apa yang disebut dengan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan alam. Hal itu tampaknya telah menjadi sesuatu yang umum, dimana jika seseorang menguasai ilmu pengetahuan alam maka umumnya ia kurang memadai dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan agama. Begitu pula sebaliknya, banyak orang yang telah menguasai dan mumpuni dalam hal ilmu pengetahuan agama, namun penguasaan dan kemampuannya terkait dengan ilmu pengetahuan alam umumnya masih kurang. Meski menggeneralisir persoalan tersebut hanya dalam satu gambaran saja barangkali merupakan suatu yang

¹⁸⁵ Badrus Sholeh, “Antara Konflik dan Perdamaian: Peran Pesantren”, dalam Badrus Sholeh (Ed), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 91.

kurang tepat, namun pada kenyataannya gambaran tersebut bisa jadi merupakan gambaran yang paling mendekati dengan realitas yang ada.

Jika dilihat dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, terdapat setidaknya tiga lembaga pendidikan, yaitu sekolah, madrasah dan pesantren. Masing-masing dari ketiganya tentu memiliki kelebihan, disamping juga pasti memiliki kelemahan. Pesantren umumnya dianggap unggul dalam bidang ilmu-ilmu agama dan aplikasinya sehari-hari, namun lemah di bidang ilmu-ilmu umum. Sedangkan sekolah umumnya lemah di bidang ilmu-ilmu agama, namun lebih unggul di bidang penguasaan ilmu alam atau ilmu umum dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya. Madrasah pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi dan menggabungkan dua keunggulan dua lembaga pendidikan sebelumnya sekaligus menutupi kelemahan-kelemahan keduanya. Namun pada kenyataannya, secara umum ekspektasi yang sempurna dan ideal tersebut tidak mampu diwujudkan.¹⁸⁶

Pendidikan madrasah yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia nyatanya tidak mampu berbicara banyak. Bahkan di sinyalir output keluaran madrasah kurang mumpuni jika dihadapkan pada persoalan-persoalan agama serta tidak matang dalam hal penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Hal ini pada prosesnya mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan madrasah seperti Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan, Madrasah Model, Madrasah Unggulan, Madrasah Terpadu serta Madrasah Tsanawiyah Terbuka.¹⁸⁷ Madrasah-madrasah ini didirikan dengan berbagai latar belakang, maksud dan tujuan yang berbeda-beda, seperti MAPK yang didirikan berdasarkan kenyataan bahwa lulusan madrasah dari segi basic competence agamanya dinilai terlalu lemah. Sayangnya, inovasi-inovasi

¹⁸⁶ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistimologi dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 202-203.

¹⁸⁷ Ahmad Zayadi, Dkk., *Desain Pengembangan Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 7-10.

seperti ini hanya berlaku secara parsial karna penerapannya tidak menyeluruh pada semua madrasah sehingga format madrasah secara umum masih seperti sebelumnya.

Kenyataan lulusan madrasah yang dianggap serba tanggung tersebut jika dianalisis dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:¹⁸⁸

1. Pengembangan madrasah masih bersifat tambal sulam. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pendirian MAPK sebagai respon terhadap lemahnya penguasaan ilmu keagamaan siswa, adanya program keterampilan sebagai respon terhadap tingginya lulusan madrasah yang tidak dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi serta madrasah unggulan sebagai langkah penyelamatan. Meski program-program baru tersebut banyak manfaatnya bagi proses pembangunan madrasah, tapi langkah tersebut tampaknya tidak didasari dengan konsep yang terencana dan matang;
2. Kurikulum madrasah yang belum fokus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya materi yang diajarkan sementara waktu tidak memadai. Misalnya saja mata pelajaran agama di madrasah yang jumlahnya terpaat cukup banyak, namun waktu yang disediakan umumnya tidak terlalu berbeda. Selain itu dalam kurikulum madrasah masih ada duplikasi materi yang diajarkan berulang-ulang pada mata pelajaran yang berbeda dan juga pada tingkat yang berbeda;
3. Akibat dari kurikulum yang belum fokus tersebut (bahan terlalu berat dan tumpang tindih), maka proses pendidikan yang terjadi di madrasah tidak sesuai dengan visi dan misi pendidikan madrasah;
4. Ketiadaan cetak biru pengembangan madrasah. Pengembangan yang terjadi di madrasah umumnya hanya merupakan respon reflektif terhadap satu persoalan tertentu. Hal ini menjadikan pengembangan madrasah tidak memiliki arah yang jelas dan komprehensif.

Persoalan dan dilema yang demikian ini akan tampak

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

lebih memprihatinkan bagi madrasah-madrasah yang secara kelembagaan tergabung dengan pesantren atau satu atap “yayasan” dengan pesantren. Madrasah identik dengan pendidikan Islam dengan sentuhan modernisasinya yang umumnya tetap diidentikkan dengan domain ilmu agama, sedangkan pesantren sedari awal dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang khusus menekankan pengetahuan dan pengamalan ilmu-ilmu agama. Menjadi ironi apabila dengan berbagai keunggulan gabungan dari dua institusi tersebut, output lulusannya tidak mumpuni dalam persoalan agama. Sebetulnya, dari gabungan dua institusi tersebut ada peluang besar untuk melakukan reformasi dalam tubuh pendidikan Islam di Indonesia.

Lahir dan munculnya madrasah atau sekolah dalam sistem pendidikan pesantren semula dianggap sebagai solusi paling realistis bagi upaya mewujudkan perubahan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak hanya di bidang pengetahuan agama, tetapi juga unggul dalam bidang pengetahuan alam serta skillfull dalam bidang penerapan teknologi. Dengan menggabungkan keunggulan atau aspek-aspek yang menonjol dari lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan sekolah disinyalir akan mejadi jalan keluar bagi dilema keilmuan yang sedang melanda masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan dan terutama dianggap tidak mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung pada waktu itu. Dengan digabungnya dua keunggulan dari dua institusi pendidikan tersebut –pesantren dan sekolah– maka secara otomatis akan melahirkan output sumber daya manusia Indonesia yang ulama’ yang ilmuwan atau ilmuwan yang ulama’, untuk menggambarkan seseorang yang menguasai kompetensi keilmuan agama dan kompetensi keilmuan umum. Model pendidikan yang demikian itu kemudian digambarkan atau direpresentasikan dengan lahirnya madrasah dalam sistem pendidikan pesantren.

Penggambaran madrasah atau sekolah dengan sedemikian rupa tersebut memang bukanlah sebuah kekeliruan. Pada masa-

masa dimana gencar dikampanyekan pendirian madrasah dalam pesantren, tujuannya memang dimaksudkan untuk keperluan yang sesuai dengan kebutuhan zaman pada waktu itu. Dengan segala kondisi yang ada pada waktu itu, dimana lembaga pendidikan yang ada dan dapat diakses masyarakat luas hanyalah pesantren, dan karena model pendidikan yang berjalan dalam sistem pesantren dirasa tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang ada, maka keluarlah ide untuk mendirikan atau mendiversifikasikan lembaga pesantren tersebut dalam bentuk persekolahan yang masih mempresentasikan nilai-nilai pesantren. Maka kemudian lahirlah madrasah dalam sistem pesantren dan pada perkembangannya banyak diikuti oleh pesantren-pesantren yang lain, selain karena adanya dorongan dari pemerintah pada waktu itu.

Namun kemudian, seiring berjalannya waktu dan dinamika yang menyertai di setiap zamannya, pendidikan madrasah atau sekolah yang ada dalam sistem pesantren secara perlahan ‘terpisah’ dari sistem awalnya sehingga hari ini dapat dikatakan bahwa madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan pesantren umumnya ‘terpisah’ baik secara kelembagaan maupun tata kelolanya dengan pesantren. Pesantren dan madrasah/sekolah menjadi domain masing-masing yang pengelolaannya dilakukan oleh aktor-aktor yang berbeda. Dalam hal ini, modernisasi pesantren yang terus berlangsung dengan cepat mengakibatkan efek samping yang tidak ringan, yaitu disorientasi kurikulum pesantren, antara konsisten memegang tradisi, kreatif mengadopsi perubahan atau kombinasi keduanya yang nyatanya tidak menampkakkan kesuksesannya.¹⁸⁹

Hal tersebut tentu menjadikan cita-cita awal dirintisnya madrasah dalam sistem pendidikan pesantren secara perlahan menjadi pudar. Memang benar dengan adanya madrasah aspek seperti kurikulum, relevansi pendidikan serta pengelolaan pendidikan yang lebih terstruktur dan terencana lebih baik dari pada dalam sistem pesantren. Namun barangkali justru ada yang

189 Jamal Ma'mur Asmani, *Peran Pesantren...*, hlm. xi.

terlewatkan atau tertinggal dari proses transformasi pendidikan tersebut, yaitu substansi atau prinsip dasar pesantren untuk mengajarkan dan melatih siswa atau santri dalam penguasaan ilmu dan nilai-nilai Islam yang justru tidak terakomodasi dengan baik atau tidak terlihat dari institusi modern hasil pembaharuan pesantren. Dengan kata lain, madrasah telah kehilangan orientasi dan akar sejarahnya yang keadaan tersebut justru berperan pada semakin menajamnya dualisme pemaknaan pendidikan.¹⁹⁰

Realitas yang demikian tersebut tentu memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian agar proses perjalanan pendidikan Islam di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Perlu adanya refleksi dan evaluasi terhadap proses modernisasi atau pembaharuan sistem pendidikan Islam di pesantren yang terjadi khususnya pada pertengahan abad ke-20. Refleksi dan evaluasi tersebut berfungsi untuk melihat kembali semangat dan arah modernisasi pendidikan yang dulu direncanakan dan diharapkan, apakah sudah sesuai dengan pencapaiannya hari ini atau justru terjadi ketidaksesuaian akibat keluar dari track yang telah direncanakan. Menurut hemat peneliti, proses modernisasi yang terjadi dalam sistem pendidikan pesantren telah mengalami pergeseran dari tujuan, harapan dan perencanaan awal. Itu terjadi bukan merupakan sebuah kesengajaan, namun akibat dari berbagai dinamika yang berkembang dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Dinamika perkembangan yang menuntun pada pola yang tidak sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah ini terjadi di hampir semua tempat. Misalnya saja, proses modernisasi atau perubahan dengan melahirkan madrasah atau sekolah yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung. Meski jika dilihat jenis pendidikan yang dipraktekkan cukup beragam, namun di dalamnya terdapat sistem pengelolaan pendidikan yang cenderung mendua, tidak sinergis-integratif. Sistem tersebut tampak dalam praktek pendidikan

¹⁹⁰ Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah...*, hlm. 23.

yang terjadi pada pesantren yang sekaligus juga tempat tinggal bagi santri yang sekaligus mengikuti program pendidikan formal pada SD, SMP ataupun SMA. Sekolah formal yang ada tersebut secara keseluruhan menerapkan kurikulum nasional, tentu dengan muatan mata pelajaran agama di dalamnya. Sedangkan di luar jam sekolah formal, siswa yang sekaligus juga menjadi santri di asrama pesantren juga mendapatkan pengajaran selayaknya pembelajaran pada pesantren umumnya.¹⁹¹

Pola pendidikan yang demikian tersebut umumnya dipraktekkan hampir di setiap pesantren yang juga mengadakan pendidikan formal sekolah maupun madrasah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, hampir semua pesantren yang cukup besar juga mengadakan sistem pendidikan formal, baik sekolah ataupun madrasah.¹⁹² Umumnya pesantren-pesantren ini mengklasifikasikan sistem pendidikan yang mereka selenggarakan dengan label integratif ataupun terpadu. Bagaimanapun, pelabelan integratif ataupun terpadu tersebut merupakan bagian dari "marketing product" untuk menarik minat masyarakat luas, meskipun pelabelan tersebut juga tidak sepenuhnya salah ataupun nihil dalam prakteknya. Setidaknya, label integratif atau terpadu tersebut menggambarkan dari penyelenggaraan pendidikan formal dimana siswanya sekaligus diharuskan menginap atau tinggal di pondok pesantren. Dengan

191 Nur Effendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan Masa Depan*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 199.

192 Beberapa di antaranya misalnya, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak yang selain menerapkan pendidikan tradisional pesantren dan madrasah diniyah serta Ma'had Aly, juga menyelenggarakan pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum, Madrasah Aliyah Ali Maksum dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ali Maksum (www.krpyak.org); Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang selain menyelenggarakan sistem pesantren, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfidz serta Ma'had Aly, juga menyelenggarakan pendidikan formal berupa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, SMP Sains Alqur'an, Madrasah Aliyah dan SMA Sains Alqur'an (www.ppwahidhasyim.com); Pondok Pesantren As-Salafiyah yang selain menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pesantren tradisional dan Madrasah Diniyah, juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti Madrasah Tranawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (www.as-salafiyah.com); serta beberapa pondok pesantren lain di Yogyakarta.

pola pendidikan yang demikian, maka label integratif ataupun terpadu dianggap telah cukup terwakili walaupun dalam lingkup yang sangat kecil.

Dalam pandangan peneliti, pola-pola pendidikan gabungan antara sistem pesantren dan sistem sekolah formal seperti di atas tidak sepenuhnya menggambarkan suatu yang integratif atau terpadu, apalagi sinergis. Meski penyempurnaan-penyempurnaan tentu juga dilakukan, namun secara garis besar terdapat pola hubungan yang menghendaki atau bahkan mengharuskan sistem pesantren dan sistem sekolah formal tidak dapat menyatu dalam satu konsep dan sistem pendidikan yang sinergis-integratif. Dengan kata lain, walaupun secara dhahir baik sistem pesantren maupun sistem pendidikan formal tampak menyatu, namun secara substansial dua institusi ini memiliki “jiwa” atau “ruh” masing-masing. Sistem pendidikan pesantren tetap dengan “ruh”nya sebagai lembaga tradisional dan sistem pendidikan formal yang konsisten dengan “ruh”nya untuk memenuhi tuntutan formalitas.

Pada kenyataannya, telah banyak pesantren yang menyelenggarakan pola pendidikan terpadu sebagaimana konsepsi di atas. Namun tidak berlebihan jika dikatakan secara umum sampai saat ini belum ada pesantren dengan pola pendidikan terpadu tersebut yang bagus dalam bidang pendidikan ilmu umum sekaligus bagus dalam bidang pendidikan ilmu agama. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan pesantren dengan konsepsi ini hanyalah merupakan asrama tempat siswa menginap, atau bahkan mungkin lebih kepada sekolah berasrama (boarding school).¹⁹³

Hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa persepsi masyarakat tentang lembaga pendidikan menunjukkan adanya garis perbedaan antara lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan formal baik sekolah atau madrasah. Persepsi tersebut bagaimanapun akan berimplikasi pada tetap

¹⁹³ Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren...*, hlm. 133-134.

kuatnya stigma antara lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum. Konsepsi dan labeling terpadu atau integratif pada gabungan dua lembaga tersebut tidak serta merta dapat menghilangkan stigma yang telah lama memenuhi dunia pendidikan kita. Ditambah lagi pola penyelenggaraan konsepsi lembaga terpadu tersebut yang masih belum sinergis antara satu dengan yang lainnya.

Tidak sinergisnya pengelolaan dua lembaga ini (pesantren dan madrasah) dapat dilihat terutama dari penerapan kurikulumnya. Meskipun dilabeli dengan sistem terpadu, penerapan kurikulum di dalamnya dijalankan masih dengan pola yang parsial, pesantren dengan kurikulumnya sendiri dan pendidikan formal dengan kurikulumnya sendiri. Di beberapa tempat bahkan menambahkan muatan kurikulum dengan mata pelajaran keagamaan pada sistem pendidikan formal dengan alasan-alasan tertentu. Padahal, kurikulum pendidikan madrasah umumnya sudah “over capacity” dibandingkan dengan kurikulum sekolah umum dengan jumlah mata pelajaran agama yang lebih banyak.

Adanya jumlah mata pelajaran agama yang lebih banyak dalam kurikulum nasional seharusnya diikuti dengan penambahan jam belajar bagi siswa madrasah antara 10-14 jam setiap minggunya. Sehingga, meskipun beban mata pelajaran pada madrasah lebih banyak, namun dengan tersedianya waktu belajar yang cukup, maka kualitas lulusan madrasah diprediksi akan lebih bagus di bidang keagamaannya dan mampu bersaing di bidang keilmuan umum.¹⁹⁴ Namun kenyataannya, jumlah jam pelajaran pada madrasah umumnya masih sama, dengan sedikit memangkas jatah jam pelajaran untuk materi pengetahuan umum. Ironisnya, di beberapa madrasah atau sekolah yang berbasis di pesantren, alokasi waktu pembelajaran yang sudah tidak berpihak pada siswa tersebut masih harus ditambah dengan

¹⁹⁴ Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 24.

beberapa jenis mata pelajaran, seperti kitab kuning dan lain-lain. Hal ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pembelajaran pada semua mata pelajaran dan khususnya pada materi-materi ilmu alam.

Di sisi lain, sebagaimana disebut di atas, pola pengelolaan dua lembaga ini umumnya masih mengedepankan “ruh”nya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari keharusan madrasah atau sekolah (termasuk yang berbasis di pesantren) untuk meyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum nasional secara menyeluruh. Artinya, pendidikan agama dalam kurikulum nasional (yang bahkan di beberapa tempat masih diberi tambahan) harus diterapkan secara mutlak karena terkait dengan berbagai aspek yang menggambarkan formalisme. Sementara itu, dalam sistem pesantren umumnya juga diajarkan materi-materi keagamaan yang hampir sama atau bahkan lebih tinggi muatan kontennya. Hal ini menurut peneliti merupakan bentuk tumpang-tindih kurikulum dalam konsepsi lembaga terpadu/integratif yang membuang-buang waktu. Menurut hemat peneliti, tumpang-tindih kurikulum yang membuang-buang waktu ini seharusnya bisa diefektifkan dengan pola pendidikan yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah/sekolah, sehingga penguasaan akan pengetahuan agama maupun pengetahuan umum dapat lebih dimaksimalkan.

Misalnya saja dalam kurikulum yang sekarang berlaku, Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran fikih pada kelas tujuh (VII) Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang meliputi materi tentang hadas dan najis serta cara menyucikannya, ketentuan shalat lima waktu, waktu-waktu shalat lima waktu, ketentuan azan dan iqamah, ketentuan shalat berjamaah, ketentuan sujud sahwi serta tata cara berzikir dan berdoa setelah shalat.¹⁹⁵ Dalam diskursus keilmuan pesantren, materi-materi yang menjadi muatan pendidikan agama di

¹⁹⁵ Lihat dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, hal. 140.

madrasah tersebut merupakan materi-materi dasar yang diajarkan bahkan dalam pembelajaran yang cukup basic. Selain menjadi materi yang diajarkan, implementasi atau pelaksanaan materi-materi tersebut dalam level perilaku lebih ditekankan, terutama dengan mekanisme yang berjalan dalam sistem pesantren yang didukung dengan lingkungan yang kondusif untuk mengamalkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Yang terjadi kemudian adalah materi-materi tersebut tetap diajarkan di madrasah dan “merampas” waktu belajar siswa untuk mempelajari hal-hal yang lain hanya demi formalitas pelaksanaan kurikulum dan penilaian melalui ujian tulis.

Secara lebih terperinci, berikut muatan kurikulum berupa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran agama (al-Qur’ an dan fikih) baik di madrasah (MTs-MA) atau di sekolah (SMP-SMA) pada tiap jenjangnya:¹⁹⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁹⁶ *Ibid.* Lihat juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fikih pada jenjang Tsanawiyah (MTs):

Level Smt	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
I	- Memahami hadas dan najis dan tata cara menyucikannya - Memahami ketentuan shalat lima waktu - Memahami waktu-waktu shalat lima waktu - Memahami ketentuan azan dan iqamah - Menganalisis ketentuan shalat berjamaah - Mengetahui ketentuan sujud sahwi - Memahami tatacara berzikir dan berdoa setelah shalat	- Memahami ketentuan sujud syukur - Memahami ketentuan sujud tilawah - Menganalisis ketentuan ibadah puasa - Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat	- Memahami ketentuan menyembelih binatang - Memahami ketentuan qurban dan aqiqah - Memahami ketentuan jual beli dan qirad - Menganalisis larangan riba
II	- Memahami	- Memahami	- Memahami

	ketentuan shalat Jum'at - Memahami ketentuan shalat jamak dan qasar - Memahami kaifiat shalat dalam berbagai keadaan - Memahami shalat sunah muakkad dan gairu muakkad	tata cara melaksanakan haji dan umrah - Memahami ketentuan sedekah, hibah dan hadiah - Menganalisis ketentuan halal, haram makanan dan minuman	ketentuan pinjam meminjam - Memahami ketentuan utang piutang - Menganalisis ketentuan gadai - Menjelaskan ketentuan upah - Memahami ketentuan pengurusan jenazah - Memahami ketentuan waris.
--	---	--	---

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- Kompetensi Dasar mata pelajaran Alqur'an pada jenjang Tsanawiyah (Mills):

Level Smt	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
I	- Memahami kedudukan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia - Memahami isi kandungan	- Memahami ketentuan hukum bacaan <i>mad</i> 'iwad, <i>mad</i> layyin, dan <i>mad</i> 'arid <i>lissukun</i> dalam al-	- Memahami ketentuan hukum <i>mad silah</i> , <i>mad badal</i> , <i>mad tamkin</i> , dan <i>mad farqi</i> dalam Q.S. al-Qari'ah, Q.S.

Q.S al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq, dab al-Ikhlās tentang tauhid dalam konsep Islam - Memahami keterkaitan isi kandungan hadis dengan iman riwayat Ali bin Abi Talib dari Ibnu Majah dan riwayat Muslim dari Umar bin Khatthab dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah - Hadis tentang ibadah yang diterima Allah hadis riwayat Al-Bazzar dari Adh-Dhahlaq dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah dalam fenomena kehidupan dan akibatnya	Qur'an QS- QS pendek pilihan - Memahami isi kandungan Q.S. al-Quraisy dan Q.S. al-Insyirah tentang ketentuan rezeki dari Allah - Memahami isi kandungan Q.S. al-Kautsar dan Q.S. al-Ma'un tentang kepedulian sosial dan isi kandungan hadis tentang perilaku tolong-menolong riwayat Al-Bukhori dari Abdullah Ibnu Umar dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis	al-Zalzalāh dan pada QS- QS pendek pilihan - Memahami isi kandungan Q.S. al-Qari'ah, Q.S. al-Zalzalāh tentang fenomena alam dalam kehidupan - Memahami ketertarikan isi kandungan hadis riwayat at-Tarmizi riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad, riwayat Al-Bazzar tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya
--	---	--

		riwayat Muslim tentang mencintai anak yatim riwayat Al-Bukhori dari Sahl bin Saad san hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah dalam fenomena kehidupan dan akibatnya	
II	- Memahami ketentuan hukum bacaan Qalqalah dalam Q.S. al-Bayyinah, al-Kafirun, dan Al-Qur'an surat-surat pendek pilihan - Memahami isi kandungan Q.S. al-Kafirun, Q.S. al-Bayyinah tentang toleransi dan membangun kehidupan	- Memahami ketentuan hukum bacaan lam dan ra dalam Q.S. al-Humazah, Q.S. at-Takasur dan QS-QS lain dalam al-Qur'an - Memahami isi kandungan Q.S. al-Humazah dan Q.S. at-Takasur tentang sifat	- Memahami ketentuan hukum <i>mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffa harfi</i> dalam Al-Qur'an - Memahami isi kandungan Q.S. al-'Asr dan Q.S. al-'Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu

	umat beragama dan hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi Ibnu Hibban, Al-hakim, Al-baihaqi dari Ibnu Umar r.a. dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik - Memahami isi kandungan Q.S. al-Lahab dan Q.S an-Nasr tentang problrmatika dakwah	cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki - Memahami isi kandungan hadis tentang perilaku keseimbangan di dunia dan akhirat Ibnu Asakir dari Anas dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awwam	- Memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Umar tentang perilaku menghargai waktu dan hadis riwayat Ibnu majah dari Anas bin Malik tentang menuntut ilmu.
--	---	---	---

➤ Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fikik pada jenjang Aliyah (MA):

Level Smt	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
I	- Memahami konsep fikih dalam Islam - Menganalisis tata cara	- Menelaah ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya	- Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan (khilafah)

	pengurusan jenazah dan hikmahnya - Menelaah ketentuan Islam tentang zakat, undang-undang pengelolaan zakat dan hikmahnya - Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umrah, Undang-Undang penyelenggaraan haji dan umrah beserta hikmahnya - Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya	- Menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya - Memahami hukum Islam tentang bughot dan hikmahnya - Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya	- Memahami konsep jihad dalam Islam - Mengidentifikasi sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf - Menjelaskan pengertian, fungsi dan kedudukan ijtihad - Memahami konsep hukum syar'i dalam Islam
II	- Memahami ketentuan Islam tentang kepemilikan dan akad - Menelaah ketentuan Islam tentang	- Menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam, ketentuan perkawinan menurut perundang-	- Memahami amr dan nahi - Memahami lafal 'am dan khass - Memahami takhsis dan mukhasis - Menjelaskan

	perekonomian Islam - Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah - Memahami ketentuan Islam tentang wakalah dan sulhu - Memahami ketentuan Islam tentang daman dan kafalah - Menganalisis hukum riba, bank dan asuransi	undangan dan hikmahnya - Menganalisis ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam	mujmal dan mubayyan - Memahami muradif fan musytarak - Memahami mutlaw dan muqayyad - Memahami zahir dan ta'wil - Memahami mantuq dan mafhum
--	--	---	---

➤ Kompetensi Dasar mata pelajaran Alqur'an pada jenjang Aliyah (MA):

Level I Smt	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
I	- Memahami pengertian al-Qur'an menurut para ulama'	- Menganalisis larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji yang	- Memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang pola hidup

	- Memahami bukti keautentikan al-Qur'an - Memahami tujuan dan fungsi al-Qur'an - Memahami pokok-pokok isi al-Qur'an - Memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah dan Khalifah di bumi pada QS. al-Mu'minin: 12-14, QS an-Nahl: 78, QS. al-Baqarah: 30-32, dan QS. az-Zariyat: 56	terdapat pada QS. al-Isra: 32, dan QS. an-Nur: 2 dan hadis riwayat al-Bukhari dari abu Hurairah - Memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan pada QS. al-Kafirun: 6, QS. Yunus: 40-41, QS. al-Kahfi: 29, QS. al-Hujurat: 10-13 - Memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan nya pada QS. at-Taubah: 122, QS. al-Mujadilah: 11 dan hadis riwayat Ibnu Majah dari	sederhana dan perintah menyantuni para duafa pada QS. al-Furqan: 67, QS. al-Isra: 26-27,29-30 dan hadis-hadis yang berkaitan - Memahami ayat al-Qur'an dan hadis tentang ujian dan cobaan pada QS. al-baqarah: 155-157, QS. Ali 'Imran: 186 dan hadis-hadis yang berkaitan - memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup pada QS. ar-Rum: 41-42, QS. al-A'raf: 56-58 dan hadis-hadis yang berkaitan - menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan
--	--	--	---

		Anas bin Malik	hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat pada QS. al-‘Alaq: 1-5, QS. al-Baqarah: 164 dan hadis-hadis yang berkaitan.
II	- Memahami pengertian hadis, sunah, khabar dan atsar - Memahami unsur-unsur hadis - Mengidentifikasi macam-macam sunah dan fungsinya terhadap al-Qur’an - Memahami pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya - Memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang keikhlasan	- Mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat al-Qur’an dan hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat yang terdapat pada QS. at-Tahrim: 6, QS. Taha: 132, QS. al-An’am: 70, dll. - Mempresentasikan isi dan kandungan ayat Al-Qur’an dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan	- Memahami ayat al-Qur’an tentang kewajiban berdakwah yang terdapat pada QS. an-Nahl: 125, QS. asy-Syu’ara’: 214-216 serta hadis-hadis yang berkaitan - Memahami ayat-ayat al-Qur’an dan hadis tentang amar ma’ruf nahi munkar pada QS. Ali Imran: 104 serta hadis-hadis yang berkaitan

	dalam beribadah pada QS al-An'am:162-163, QS. al-Bayyinah: 5 dan hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah r.a.	QS. al-Baqarah: 148, QS. al-Fatir: 32, QS. an-Nahl: 97 dan hadis yang sesuai. - Mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat Al-Qur'an dan hadis tentang etos kerja pribadi muslim. QS. al-Jumu'ah: 9-11, QS. al-Qashash: 17 dan hadis yang berkaitan - Mempresentasikan isi dan kandungan ayat al-Qur'an dan hadis tentang makanan yang halal dan baik pada QS. al-Baqarah: 168-169, al-Baqarah: 172-173 dan hadis yang berkaitan	- Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi pada QS. Ali Imran: 159, QS. asy-Syu'ara': 38 serta hadis-hadis yang berkaitan - Memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang jujur dan adil yang terdapat pada QS. al-Maidah: 8-10, QS. at-Taubah: 119 serta hadis-hadis yang berkaitan
--	---	---	---

➤ Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Level Smt	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
I - II	- Memahami makna Q.S. al-Mujadilah: 11, Q.S. ar-Rahman: 33 dan Hadis terkait tentang menuntut ilmu - Memahami makna Q.S. an-Nisa: 146 Q.S. al-Baqarah: 153, dan Q.S. Ali Imran: 134 serta Hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf - Memahami makna al-Asma'ul Husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami' dan al-Bashir - Memahami makna iman kepada	- Memahami Q.S. al-Furqan: 63, Q.S. al-Isra: 26-27 dan Hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana - Memahami Q.S. an-Nahl: 114 dan Hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari - Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Swt. - Memahami makna beriman kepada Rasul Allah Swt. - Memahami	- Memahami Q.S. az-Zumar: 53, Q.S. an-Najm: 39-42, Q.S. Ali Imran tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta hadis terkait - Memahami Q.S. al-Hujurat: 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan Hadis terkait. - Memahami makna iman kepada Hari Akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan-Nya - Memahami

malaikat berdasarkan dalil naqli - Memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah - Memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama - Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syari'at Islam - Memahami ketentuan salat berjamaah - Memahami ketentuan salat Jumat - Memahami ketentuan salat jamak qasar - Memahami sejarah perjuangan	bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran - Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil - Memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru - Memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama - Memahami tata cara salat sunah berjamaah dan munfarid - Memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah - Memahami tata cara puasa wajib dan sunah	makna iman kepada Qadha dan Qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaan-Nya - Memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari - Memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru - Memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu - Memahami ketentuan zakat - Memahami ketentuan ibadah haji dan umrah - Memahami ketentuan penyembelihan
--	--	---

	Nabi Muhammad saw. periode Makkah - Memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad saw periode Madinah - Memahami sejarah perjuangan dan kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun	- Memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadis - Memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah - Memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah	hewan dalam Islam - Memahami ketentuan qurban dan aqiqah - Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara - Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara
--	--	--	---

- Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Level I Smt	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
I - II	- Menganalisis Q.S. al-Hujurat: 10 dan 12 serta Hadis tentang kontrol diri	- Menganalisis makna Q.S. al-Maidah: 48, Q.S. an-Nisa: 59, dan Q.S. at-	- Menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. Ali Imran: 190-191 dan Q.S. Ali Imran: 159, serta

(<i>mujahadah an-nafs</i>), prasangka baik (<i>husnuzzan</i>), dan persaudaraan (<i>ukhuwah</i>) - Menganalisis Q.S. al-Isra: 32, dan Q.S. an-Nur: 2 serta Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina - Menganalisis makna <i>al-Asma'u al-Husna</i>: <i>al-Karim</i>, <i>al-Mu'min</i>, <i>al-Wakil</i>, <i>al-Matin</i>, <i>al-Jami'</i>, <i>al-'Adl</i>, dan <i>al-Akhir</i> - Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt. - Menganalisis ketentuan berpakaian	Taubah: 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja - Menganalisis makna Q.S. Yunus: 40-41 dan Q.S. al-Maidah: 32, serta Hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan - Menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt. - Menganalisis makna iman kepada rasul-rasul Allah Swt. - Menganalisis makna syaja'ah (berani	hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis - Menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. luqman: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah: 83, serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia - Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir - Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qadha dan qadar - Menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan
---	---	---

sesuai syariat Islam - Menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari - Menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan, dan menyampaikan kepada sesama - Menganalisis kedudukan al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam - Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat - Menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. di Makkah	membela kebenaran) dalam kehidupan sehari-hari - Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru - Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah - Menganalisis pelaksanaan khutbah, tablig, dan dakwah - Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam - Menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan - Menelaah perkembangan Islam pada	sehari-hari yang berkembang di masyarakat - Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam - Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam - Menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia - Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia - Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia - Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran
---	--	--

- Menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah	masa modern (1800-sekrang)	peradaban Islam di dunia
---	----------------------------	--------------------------

Berdasarkan gambaran secara umum kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diajarkan baik di madrasah maupun di sekolah pada tingkat menengah pertama/Tsanawiyah maupun tingkat atas/Aliyah tersebut di atas, dapat kita lihat cakupan materi keagamaan yang diajarkan baik di madrasah maupun di sekolah. Jika dibandingkan dengan materi yang diajarkan di madrasah diniyah atau di pesantren dengan sistem pengajian kitab kuningnya, maka sesungguhnya materi-materi keagamaan yang diajarkan di madrasah atau di sekolah tersebut telah tercover sepenuhnya dalam pengajian kitab kuning. Sebagai contoh kecil perbandingan, misalnya dalam materi fikih di madrasah mulai dari kelas tujuh sampai kelas sembilan, konten materi yang diajarkan sebetulnya sudah secara keseluruhan tercakup dalam kitab fikih yang barangkali merupakan kitab dasar dan hampir diajarkan di pesantren secara menyeluruh, yaitu kitab fath al-qarib dengan berbagai derivasinya. Jika dilihat lebih detail, konten bab atau materi yang ada di dalam kitab tersebut dari awal sampai akhir telah meliputi pembahasan tentang bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, muamalah, faraid dan wasiat, pernikahan (munakahat), kriminalitas (jinayat), hudud, jihad, makanan, kompetisi, sumpah, pengadilan dan persaksian serta kemerdekaan budak.¹⁹⁷ Dalam kitab tersebut bahkan dapat dikatakan pembahasannya lebih lengkap dan lebih dalam. Selain itu, pada tingkat yang lebih tinggi, masih terdapat berbagai banyak kitab yang penjelasannya lebih mendetail serta terdapat kitab-kitab yang menunjang

¹⁹⁷ Ibnu Qosim al-Ghozziy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Karya Thoha Putra).

pemahaman fikih di pesantren seperti kitab kaidah fikih maupun kitab kaidah ushul fikih. Hal yang demikian tersebut berlaku tidak hanya pada materi fikih saja, melainkan pada semua jenis materi yang diajarkan.

Jika melihat perbandingan tersebut, maka sesungguhnya pengulangan materi yang diajarkan di sekolah dan di pesantren dapat dikatakan merupakan sebuah proses yang membuang-buang waktu. Dari sisi keilmuan, siswa atau santri tidak mendapatkan pengetahuan yang lebih dan cenderung berkutat pada pembahasan yang sama. Di sisi lain, pengulangan tersebut juga membawa konsekuensi beban jam belajarnya yang semakin panjang. Padahal jika dilihat dari perspektif ilmu pendidikan, apa yang terjadi di pesantren justru tidak hanya terpaku pada aspek kognitif, tetapi juga ada penekanan pada aspek afektif dan psikomotorik.

Hal-hal yang demikian tersebut nyatanya memang terjadi di lingkungan pesantren yang di dalamnya terdapat madrasah atau sekolah. Misalnya saja program pembelajaran agama yang dalam lingkungan pesantren lazim disebut dengan pengajian kitab kuning, beberapa pesantren (dan mungkin secara umum tidak jauh berbeda dengan pesantren-pesantren lain) telah mengajarkan kitab-kitab yang secara level keilmuan telah mencakup hampir keseluruhan konten pembelajaran agama di madrasah atau sekolah umum. Seperti misalnya, program pengajian kitab kuning yang berlangsung di pesantren As-Salafiyyah Mlangi yang dibagi ke dalam tiga kelompok kelas dengan kitab pegangan yang berlainan:¹⁹⁸

1. Kelas Ula mempelajari kitab Tartil Al-Qur'an, Jurumiyah, Tajwid, Aqidatul Awam, Hidayatu Shibyan, Washoya, Durratul Bahiyyah, Alala, Taysirul Khalaq, dll;
2. Kelas Wustha menggunakan kitab Imriti, Sharaf Amtsilah, Qawaidful I'rab, Taqrib, Aqidatul Islamiyah, Jawahirul Kalamiyah, dan Ta'lim Muta'alim;
3. Kelas 'Ulya I mempelajari kitab Alfiyah (awal), Fathul

Mu'in (Awal), Fathul Wahab (Awal), dan Durotun Nasihin. Sedangkan 'Ulya II mempelajari Fathul Muin (Tsani), Alfiyah (Tsani), Ibnu Aqil Syarah Alfiyah, Shahih Bukhori, Mahalli, Tafsir Jalalain dan Ihya Ulumiddin.

Jika dilihat dari substansi keilmuan, mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan di dalam madrasah diniyah yang ada di pesantren ini umumnya telah melebihi level dan cakupan materi yang diajarkan di sekolah formal. Kalaupun ada aspek yang perlu mendapat penekanan dan perhatian adalah metode pembelajaran yang lebih efektif serta manajemen dan pengelolaan yang lebih tertata rapi. Kenyataan bahwa di sekolah formal masih diajarkan materi-materi agama yang terkadang bahkan lebih rendah levelnya dan lebih dangkal pembahasannya karena memenuhi tuntutan formalitas pengimplementasian kurikulum nasional menurut hemat peneliti merupakan sebuah pemborosan waktu.

Realitas yang menunjukkan jumlah mata pelajaran agama di madrasah yang lebih banyak dan besimpulikasi pada tersitanya jumlah jam belajar siswa untuk menekuni materi-materi umum barangkali merupakan salah satu sebab tidak majunya bidang-bidang ilmu umum di madrasah. Dalam konteks ini, kita harus membedakan madrasah yang berada dalam lingkungan pesantren dan madrasah yang tidak berada dalam lingkungan pesantren. Hal ini karena madrasah atau bahkan sekolah yang berada di lingkungan pesantren memiliki nilai lebih pada pembelajaran-pembelajaran diniyah yang bisa atau harus dijalani siswa dalam sistem pesantren atau madrasah diniyah. Sehingga adanya pengulangan pembahasan tentang materi pembelajaran agama di sekolah formal memiliki peluang untuk ditiadakan, diganti dengan sistem yang sinergis-integratif antara sekolah formal dengan pesantren dan madrasah diniyah.

Madrasah atau sekolah yang dari sisi kelembagaan terintegrasi secara terbatas dengan pesantren memiliki peluang untuk mensinkronkan program-program pendidikan yang dimiliki. Dengan adanya pesantren, peluang siswa sekolah atau madrasah untuk mendapat pelajaran agama yang lebih dalam dan luas terbuka lebar, begitu pula kesempatannya untuk menseriusi

pengetahuan alam di sekolah. Dengan sistem pembelajaran agama yang ada di pesantren, maka sesungguhnya tidak perlu lagi ada pembelajaran agama di sekolah, tentu apabila konsep pendidikan yang integratif-sinergis telah terwujud. Jangan sampai keberadaan pesantren dianggap hanya sebagai aspek atau komponen penunjang bagi pelaksanaan pendidikan sekolah formal baik itu madrasah atau sekolah umum yang berada di lingkungan pesantren.

Peluang dan kesempatan untuk menciptakan pendidikan non-dikotomik –dalam artian adanya penekanan yang sama antara ilmu umum dan ilmu agama– sangat terbuka lebar dalam integrasi kelembagaan sekolah/madrasah dan pesantren. Melalui lembaga integrasi tersebut, peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang sama baiknya antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga akan berpengaruh pada kualitas kehidupannya di masa yang akan datang. Pesantren memiliki keunggulan sistem dalam urusan pendidikan agama yang tidak dimiliki oleh sekolah atau madrasah. Sedangkan sekolah atau madrasah biasanya cenderung mengejar penguasaan ilmu alamnya, meski kadang madrasah cukup jauh tertinggal. Dengan memanfaatkan keunggulan keduanya melalui pembangunan sistem yang sinergis-integratif, maka diharapkan kualitas output lulusannya benar-benar menjadi manusia seluruhnya, seorang muslim dan hamba yang kamil serta seorang khalifah Allah yang mumpuni.

Konseptualisasi sistem yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah menuntut adanya rekonstruksi sistem pendidikan secara komprehensif. Rekonstruksi tersebut harus dilakukan dalam kerangka manajemen pendidikan yang efektif, mulai dari pola pengelolaan, kurikulum, sarana dan prasarana serta penilaian. Semua harus dilakukan dalam kerangka manajemen yang integral, menyatu serta dengan ruh atau semangat yang universal. Ini harus dilakukan karena selama ini yang menjadikan kedua lembaga pendidikan ini (madrasah dan pesantren) tidak sinergis adalah pola manajemen yang terpisah, parsial dan berjalan dengan “ruh”nya masing-masing.

Secara lebih detail pada level konseptual, rekonstruksi

sistem pendidikan yang sinergis-integratif tersebut dapat dilihat pada pemaparan berikut:

1. Manajemen Pengelolaan

Pertama-tama yang patut menjadi perhatian adalah sistem pengelolaan. Selama ini, pengelolaan dua lembaga ini cenderung terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masing-masing lembaga memiliki “ruh” sendiri dan memiliki arah perjuangan sendiri. Meskipun ada aspek-aspek yang bersinggungan, namun pengelolaannya cenderung dengan semangat dan tata cara yang berlainan. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan konsekuensi dari pola pengelolaan pendidikan di Indonesia yang tidak terpadu. Di level kementerian misalnya, pendidikan berada di bawah payung dua kementerian, kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama. Adanya dua pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ini secara tidak langsung sebenarnya mempertegas garis perbedaan pendidikan dengan basis umum dan basis agama. Kalaupun dikatakan pesantren dan madrasah sama-sama berada di bawah naungan kementerian agama, tidak terpadunya pola pengelolaannya tetap dapat dilihat dari adanya direktorat pada masing-masing dua lembaga tersebut. Namun demikian, yang senyatanya menjadi persoalan pada pembahasan disini adalah pola pengelolaan yang tidak terpadu antara madrasah dan pesantren para level operasional-teknis.

Hampir di setiap pesantren yang ada lembaga formal di dalamnya, pengelolaan pendidikan diantara keduanya dilakukan secara terpisah atau setidaknya menunjukkan sesuatu yang tidak sinkron. Hal ini dipengaruhi oleh adanya ruh atau semangat yang memunculkan anggapan berbeda terkait dengan tujuan kedua lembaga ini. Pengelolaan secara profesional umumnya hanya diterapkan pada lembaga formal, sedang pesantren dikelola ala kadarnya. Di banyak tempat, lembaga pendidikan formal mendapat prioritas yang lebih tinggi sedangkan pesantren terkadang hanya dianggap sebagai pelengkap saja tanpa ada keterkaitan dengan sistem

pendidikan yang berjalan di lembaga formal.

Model pengelolaan yang semacam ini kiranya perlu diperbaiki dan dikembangkan kearah yang lebih baik. Terlebih lagi jika dilihat dari perspektif sejarah, pesantren dan madrasah pada dasarnya mempunyai keterkaitan yang erat serta memiliki tujuan yang sama. Pengelolaan yang terpadu yang mencerminkan semangat sinergis-integratif antar keduanya diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan seimbang. Hal ini dapat tercapai apabila pengelolaan kedua lembaga ini berada dalam satu konsep yang integral, tidak ada pembeda-bedaan antara pesantren dan madrasah baik dari segi prioritas, tujuan serta ruh atau semangat pengelolaannya. Dengan kata lain, pengelolaan pesantren dan madrasah harus berada dalam satu framework, dilihat sebagai gabungan institusi yang integral dan mempunyai tujuan yang sama.

Pada level operasionalnya, lembaga integral ini bisa dipimpin oleh satu atau lebih pemimpin, atau satu pemimpin dengan manajer di masing-masing lembaga. Namun yang perlu ditekankan adalah, keduanya harus berjalan secara bersama, dengan semangat yang sama serta satu tujuan yang sama. Dengan begitu, sistem pendidikan yang terwujud adalah sistem yang seimbang dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pendidikan dengan sistem sekolah berjalan dan dengan sistem pesantren atau madin juga berjalan dalam kerangka konseptual yang utuh. Tidak ada lagi rasa iri dan kecemburuan karna salah satunya menjadi prioritas dan yang lain terabaikan. Tidak ada lagi salah satu diantara keduanya harus mengikuti ritme salah satu yang lainnya, keduanya berjalan dengan ritme yang sama dan sinergis.

2. Kurikulum

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurikulum lembaga terpadu ini. Untuk mewujudkan sistem yang sinergis-integratif, maka kurikulum yang diterapkan harus juga merupakan satu kesatuan yang dijalankan

berdasarkan kesatuan tujuan integral. Adapun yang terjadi selama ini adalah sekolah formal berjalan dengan kurikulumnya sendiri (kurikulum nasional) dan pendidikan di pesantren berjalan dengan kurikulumnya sendiri. Bahkan seringkali terjadi adanya “pemaksaan” kurikulum pesantren pada kurikulum sekolah formal hanya untuk mendapatkan perhatian dan antusias peserta didik karena juga menjadi aspek yang dinilai untuk menentukan hasil akhir. Selain itu dari sisi konten sebagaimana dipaparkan sebelumnya, khususnya dalam hal materi agama, terjadi tumpang tindih antara kurikulum di pesantren dan kurikulum di sekolah formal.

Perencanaan kurikulum yang integratif dan mutualis antara lembaga pesantren dan madrasah harusnya diarahkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tumpang tindih materi pembelajaran yang ada di dalam sistem pendidikan tersebut. Sebagai sebuah sistem pendidikan yang integral, tumpang-tindih kurikulum – khususnya kurikulum agama – antara di pesantren dan di madrasah harusnya dapat diminimalisir untuk kemudian diefektifkan agar tidak ada pembuangan waktu yang sia-sia. Pengefektifan kurikulum agama tersebut dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan penguasaan siswa terhadap kurikulum atau materi yang lain, khususnya pada pengetahuan alam dan teknologi. Dengan begitu, siswa atau santri dapat belajar dengan maksimal materi pembelajaran yang ada, baik pada pengetahuan umum maupun pengetahuan agama.

Perencanaan kurikulum tersebut secara tidak langsung menghendaki adanya “pemisahan” domain ajar dalam pesantren atau madrasah. Kata pemisahan tersebut dipakai hanya sebagai penjelas terhadap apa yang harus dimasukkan dalam domain madrasah dan apa yang harus dimasukkan dalam domain pesantren sebagai sebuah institusi yang integral. Pesantren sebagai sebuah lembaga yang telah terbukti secara nyata dan menyakinkan dalam

melahirkan generasi-generasi yang mumpuni dalam urusan agama sepatutnya diberikan tanggung jawab untuk mengelola domain agama dalam kurikulum integral tersebut. Sedangkan madrasah, sebagai institusi yang dari awalnya memang didesain untuk memberikan pengetahuan umum, diamanatkan untuk mengelola domain pengetahuan umum tanpa harus ikut merepotkan diri dan menghabiskan waktu untuk mengelola domain agama yang telah dipegang oleh pesantren. Dengan begitu, proses pembelajaran integratif yang sinergis dan mutualis antara pesantren dan madrasah akan tercipta dengan harmonis.

Sejauh ini, di banyak madrasah yang berbasis pada pesantren, pengelolaan pendidikan agama cenderung tumpang-tindih dimana pembelajaran agama yang secara jelas menjadi domain dari pesantren, juga diajarkan di madrasah. Hal ini tentunya merupakan sebuah pemborosan waktu karna selain adanya sebuah pengulangan, materi agama antara dua institusi tersebut umumnya memiliki tingkatan yang berbeda. Dan sayangnya, umumnya pembelajaran agama yang dilakukan di madrasah hanya mengulang apa yang telah diajarkan di pesantren. Bahkan apa yang diajarkan di pesantren telah jauh lebih tinggi tingkatannya dari pada yang diajarkan di madrasah. Hal ini menjadi peluang bagi pengefektifan dan optimalisasi pembelajaran agama.

Dengan implementasi kurikulum integral yang sinergis, maka tumpang tindih sebagaimana yang terjadi selama ini akan dapat dihilangkan. Namun begitu, perencanaan kurikulum ini harus benar-benar mencerminkan suatu yang menyatu serta penekanan yang seimbang. Kurikulum tersebut harus berjalan bersama, kurikulum pembelajaran materi umum tidak bisa diterapkan jika kurikulum pembelajaran materi agama tidak dijalankan, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya pemisahan domain seperti dijelaskan sebelumnya, maka implementasi kurikulum integral ini seharusnya tidak mustahil untuk dijalankan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pada

pembelajaran dipesantren yang harus lebih ditingkatkan mutunya baik melalui peng-upgrade-an metode pengajaran, stratifikasi kelas dan materi serta penilaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian pada sekolah formal. Jika dirasa perlu, dapat pula materi-materi keagamaan yang diajarkan di pesantren disesuaikan dengan tema-tema yang dianggap perlu dan lebih bermanfaat.

3. Evaluasi dan Penilaian

Di antara aspek yang ikut menentukan dalam konsepsi pendidikan yang sinergis-integratif dalam gabungan lembaga pesantren dan madrasah sebagai lembaga yang integral ini adalah sistem evaluasi dan penilaian. Sebagaimana yang diketahui bahwa selama ini evaluasi dan penilaian dari kedua lembaga ini yang berjalan secara parsial dan terpisah memiliki implikasi yang berbeda. Madrasah sebagai lembaga formal menerapkan evaluasi dan penilaian yang ketat karena memiliki daya tekan pada kebergunaan hasil penilaian pada masa yang akan datang. Sedangkan pesantren yang merupakan lembaga nonformal umumnya menerapkan sistem evaluasi dan penilaian dengan lebih longgar atau bahkan tanpa keduanya karena tidak ada pengaruhnya atau terkadang dianggap tidak terlalu bermanfaat. Bahkan pesantren-pesantren yang menerapkan evaluasi dan penilaian yang ketat pun, hasilnya secara formal juga tidak terlalu diakui. Akhirnya, hasil evaluasi dan penilaian tersebut hanyalah berupa searik kertas yang tidak terlalu bermanfaat bagi kehidupan pemiliknya.

Hal itu secara tidak langsung berdampak pada semangat belajar peserta didik untuk mengejar formalitas ijazah dan sedikit mengabaikan yang tidak memiliki nilai formal. Dalam kasus madrasah atau sekolah, peserta didik dan juga pengajar sama-sama memberikan prioritas yang tinggi pada Mapel-Mapel yang menjadi materi ujian nasional dan mengabaikan materi yang tidak di-ujian nasional-kan, termasuk Mapel-Mapel agama. Formalisme-formalisme yang seperti ini sayangnya sudah menjangkiti kehidupan

secara umum dan nyaris tidak dapat dibendung. Namun demikian, meski selama ini penentuan kelulusan didasarkan pada nilai ujian mata pelajaran yang di-ujikan, menurut pandangan peneliti lembaga pendidikan tertentu dapat menentukan atau melakukan improvisasi pada syarat-syarat kelulusan seorang peserta didik. Di sinilah peluang lembaga integral dalam konsepsi peneliti untuk melakukan evaluasi dan penilaian pembelajaran.

Jika membendung arus formalisme hampir mustahil untuk dilakukan, maka bukanlah sebuah kesalahan jika sebuah lembaga pendidikan menciptakan konsepsi-konsepsi untuk mengimbangi formalisme tersebut. Konsepsi tersebut maksudnya adalah membuat kebijakan-kebijakan di tingkat lembaga terkait dengan syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh seorang peserta didik selain dari hasil nilai ujian nasional. Dengan demikian, implementasi dan penekakan penerapan kurikulum pun dapat dilakukan secara seimbang pada lembaga integral tersebut.

Evaluasi dan penilaian pada lembaga integral ini dapat bervariasi bentuknya, terutama terkait dengan materi-materi agama. Evaluasi dan penilaian yang selama ini umumnya hanya dapat mengakomodasi aspek kognitif saja, dapat dikembangkan hingga mampu mengakomodasi aspek afeksi dan psikomotor. Dalam lembaga integral, hal ini tentu sangat memungkinkan karena selama ini konsep tersebut telah berjalan. Kalaupun perlu adanya penyempurnaan, maka penyempurnaan itu dapat dilakukan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan yang terprogram dan teratur.

Konsepsi evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan proporsional ini juga sekaligus menggambarkan gubungan yang saling melengkapi antara sistem madrasah dan sistem pesantren. Prosentase penilaian yang diberikan harus sama sehingga dua-duanya memiliki pengaruh sama terhadap kelulusan serta memiliki daya tekan yang sama pula. Jika sudah demikian, maka tidak ada lagi peserta didik maupun guru yang mengabaikan atau

menyepelkan mata pelajaran tertentu. Hasil paling akhir yang diharapkan adalah terciptanya output pendidikan yang seimbang dalam penguasaan ilmu pengetahuan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, sehingga mimpi untuk memiliki seorang ulama yang ilmunan dan ilmunan yang ulama dalam jumlah yang besar dapat benar-benar terwujud.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan uraian penjelasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang sinergitas kelembagaan antara pesantren dan madrasah yang ada di dalam lingkungan pesantren sebagai satu kesatuan integral lembaga pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konseptualisasi format ^{satu} model pendidikan Islam alternatif dalam bentuk kelembagaan yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah mengisyaratkan perlunya evaluasi dan rekonstruksi ulang proses modernisasi yang berjalan di lingkungan pesantren. Kenyataan bahwa banyak madrasah yang berbasis di pesantren sejujurnya memiliki peluang besar untuk diperbaiki dan disempurnakan sistem pendidikannya. Oleh karenanya, upaya untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih efektif dapat dimulai dari mengusahakan sistem yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah. Secara terbatas, aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam konsepsi lembaga pendidikan Islam yang sinergis-integratif ini meliputi: 1) manajemen pengelolaan, yaitu dengan menjadikan pesantren-madrasah sebagai satu kesatuan integral lembaga pendidikan Islam yang saling berhubungan dan terikat satu sama lain; 2) implementasi kurikulum, yaitu dengan menerapkan satu kurikulum integral yang pelaksanaannya meliputi pesantren dan madrasah; serta 3) evaluasi dan penilaian, yaitu dengan membuat satu sistem penilaian yang integral dan menyeluruh untuk mengukur kemampuan serta sebagai syarat kelulusan peserta didik.

B. SARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang ideal, tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan sikap yang fleksibel dan terbuka dalam menerima masukan-masukan konstruktif bagi sistem pendidikan yang telah ada. Selain itu, kemauan untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan turut berperan dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang ideal dan efektif. Berbagai pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan juga harus berani memenuhi tanggung jawabnya serta berperan dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka kiranya perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara pendidikan Islam pesantren dan madrasah, khususnya pada level operasional-teknis, hendaknya pengelolaan pendidikan Islam dijalankan sebagai satu sistem integral yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Pengelolaan yang parsial terhadap dua institusi ini nyatanya telah menampakkan sisi-sisi kekurangan dari berbagai sudut pandang. Penyelenggaraan sistem pendidikan Islam yang sinergis-integratif dapat dijadikan sebagai solusi terhadap persoalan tersebut mengingat berbagai keunggulan dan kekurangan lembaga pesantren dan madrasah.
2. Kepada Dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam pesantren dan madrasah, hendaknya dualisme pendidikan di Indonesia terus dicarikan upaya pemecahan masalahnya. Dalam lingkup yang sangat kecil, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan pesantren dan madrasah yang terintegrasi dalam satu lingkungan. Menjadikan dua institusi pendidikan yang awalnya memiliki keterkaitan erat untuk kembali menjadi institusi integral yang sinergis-integratif merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi stigma negatif dualisme sistem pendidikan. Untuk memperlancar implementasi konsep

tersebut, kiranya diperlukan sebuah kebijakan khusus agar para penyelenggara pendidikan integral ini memiliki landasan legal-yuridis sehingga hambatan-hambatan yang sifatnya teknis, birokratif atau berhubungan dengan legalitas dapat diatasi.

3. Kepada masyarakat muslim Indonesia secara umum, bahwasannya membangun peradaban Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan memuja-muja keberhasilan dan kegemilangan masa lalu. Semua harus dimulai dari pendidikan yang efektif dan optimal serta seimbang. Sebagai hamba Allah, kita sudah selayaknya memenuhi tanggung jawab kita untuk melakukan ibadah yang didasari dengan ilmu yang ditanamkan sejak kecil. Begitu juga peran kita sebagai khalifah Allah, yang harus kita penuhi dengan dasar keilmuan untuk memakmurkan bumi Allah. Karena manusia diciptakan dengan dibekali dua tanggung jawab tersebut, maka upaya untuk pemenuhan tanggung jawab tersebut harus dilakukan dengan seimbang, atau setidaknya proporsional. Implikasinya, pendidikan yang harus diterima atau dijalani oleh seorang muslim harus mempunyai penekanan yang seimbang terhadap dua komponen tersebut, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang seimbang tersebut kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1987, *Sejarah dan Masyarakat: Lintas Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Ghozziy, Ibnu Qosim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Karya Thoha Putra.
- Ali, Moh., 1987, *Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi*, Bandung: Bumi Aksara.
- Alimansyah, Iman, 2015, "Manajemen Integrasi Kurikulum (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- al-Naquist al-Attas, Muhammad, 1992, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hajdar Bagir, Bandung : Penerbit Mizan.
- Amrizal, 2011, "Pembaharuan Pendidikan Pesantren dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Sosial Budaya*, Volume 8 No.02.
- Anwar, Ali, 2010, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Zainal, 2012, "Perkembangan Pesantren di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. IX No. 1.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmani, Jamal Ma'mur, 2016, *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Azra, Azyumardi, 2003, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, Jakarta: Logos.
- Baker, Anton, dan Achmad Charis Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Basyit, Abdul, 2017, "Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas", *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI No. 2.
- Bawani, Imam, 1993, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam; Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, Surabaya: Al-Ikhlash.

- Bustmam-Ahmad, Kamaruzzaman, dan Patrick Jory (Ed), 2011, *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia*, Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan.
- Covey, Stephen R., 1997, *The 7 Habits Of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif)*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Daulay, Haidar Purta, 2007, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Daulay, Haidar Putra, 2001, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Dawam, Ainurrofiq, dan Ahmad Ta'arifin, 2005, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Jakarta: Lista Fariska Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV, Jakarta: PT Gramedia.
- Dhofier, Zamakhsari, 2009, *Tradisi Pesantren; Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Dhofier, Zamakhsari, 2011, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: LP3ES.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, "Sejarah Pendidikan Islam", dalam www.pendis.kemenag.go.id.
- Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2004, *Direktori Pesantren*, Jakarta: Depag RI.
- Effendi, Nur, 2014, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Teras.
- Fajar, A. Malik, 1988, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan.
- Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodologi research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasbullah, 1996, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*

- Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail, Dkk. (ed), 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, Faisal, 1998, *Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Jakfar, Mohammad, 2015, "Inovasi Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Islam Bersistem Boarding School di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Jalaluddin, 2001, *Teologi Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Kholil, Muhammad, 2011, "Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia", *Jurnal Media Akademika*, Vol. 26 No. 3.
- Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah
- Langgung, Hasan, 1986, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Husna.
- Lukens-Bull, Ronald, 2000, "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a Globalizing Era", *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3.
- _____, 2005, *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*, New York: Palgrave MacMillan.
- _____, 2010, "Madrasah By Any Other Name Pondok, Pesantren, and Islamic School in Indonesia and Southeast Asian Region", *Jurnal of Indonesian Islam*, Volume 04 Nomor 01.
- Madjid, Nurcholish, 1997, Bandung : Mizan.
- _____, 2010, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Mahfudh, Muhammad Ahmad Sahal, 2011, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. VII Yogyakarta: LKiS.
- Maksum, 1999, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Maragustam, 2018, *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*, Yogyakarta: Pascasarjana FITK.

- Mas'ud, Abdurrahman, 2006, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS.
- Masyhud, M. Sulthon, Dkk., 2004, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka.
- Mu'tafi, Ali, 2014, "Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Indonesia; Telaah Kurikulum Pondok Pesantren, Menuju Arah Baru Pendidikan Islam di Era Globalisasi", *jurnal Al-Qalam* Vol.XIII.
- Muhaimin, 2006, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Muhammad, Husein, 2019, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak; Dinamika NU, Pesantren, Tradisi dan Realitas zamannya*, Yogyakarta: IRCISOD.
- Muhtarom, 2005, *Reproduksi Ulama di Era Global; Resistensi Tradisional Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtarom, Ali, 2019, *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Mutohar, Ahmad, dan Nurul Anam, 2013, *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashir, M. Ridlwan, 2010, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasir, Muhammad, 2015, "Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah di Asia" *Jurnal Pendidikan Islam Nadwa*, volume 9, Nomor 2.
- Nurhakim, Moh., 2011, "Imam Zarkasyi dan Pembaharuan Pesantren: Rekonstruksi Aspek Kurikulum, Manajemen, dan Etika Pendidikan", *Jurnal Progresiva* Vol. 5, No. 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- Pohan, Rusdi, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-rijal Institut.
- Qomar, Mujamil, 2005, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga.
- Riyanto, Waryani Fajar, 2013, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga; Sebuah Interpretasi dan Aplikasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rohani, 2014, "Dinamisasi Pendidikan Pesantren; Studi Pemikiran Modernisasi Pondok Pesantren KH. Abdurrahman Wahid", *Jurnal Al-Qalam*, volume XIII.
- Rosyada, Dede, 2017, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Depok: Kencana.
- Sahidin, 2015, "Pembaharuan Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Saridjo, Marwan, 1982, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bhakti.
- , 2011, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Bogor: Al Manar Press.
- Shidiq, Rohani, 2015, *Gus Dur: Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sholeh, Badrus, (Ed), 2007, *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, 2014, "Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren", *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna*, Volume 18 No.1.
- Solichin, Mohammad Muchlis, 2012, "Rekonstruksi Pendidikan Pesantren Sebagai Character Building Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern", *Jurnal Karsa*, Vol. 20 No. 1.
- Steenbrink, Karel A., 1994, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.
- Sulasm, Siti, 2009, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi", *Jurnal Ekuitas*, Volume 13, Nomor 2.

- Sunaryo, Agus, 2017, *Identitas Pesantren Vis a Vis Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Supriadin, 2014, "Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah", *Jurnal El-HiKMAH*, Volume 8 Nomor 2.
- Sutrisno, 2006, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistimologi dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwito, 2005, *Sejarah Sosisal Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Tidjani Djauhari, Mohammad, 2008, *Masa Depan Pesantren, Agenda yang Belum terselesaikan*, Jakarta: TAJ Publishing.
- Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003.
- Usman, Husaini, 2013, *Manajemen, TeoriPraktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, Abdurrahman, Dkk., 1995, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES.
- Wahid, Salahuddin, 2016, *Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga Tradisi di Tengah Tantangan*, Malang: UIN Malang Press.
- Yasmadi, 2002, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta : Ciputat Press.
- Yunus, Mahmud, 1995, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. IV, Mutiara Sumber widya.
- Zayadi, Ahmad, Dkk., 2005, *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Zuhairini, Dkk., 2009, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu I H. H. Kalibawang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp. (0274) 898 444 Psw. 1401 - 2324, Fax (0274) 908 444 Psw. 2001
<http://library.uii.ac.id> e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No. : 1147/12424-Perpus/10/Dz-Perpus/V/2019

Assalamu alaikum warrahmatullahi

Assalamu alaikum warrahmatullahi

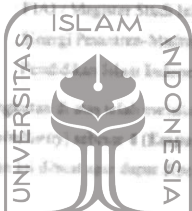
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Anas Maghlian
Nomor Mahasiswa	: 19912083
Dosen Pembimbing	: Dr. Ahmad Darmasaji, M.Pd.
Fakultas / Prodi	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Pendidikan Matematika
Judul Karya Ilmiah	: Strategi Penanaman-Matematis Di Era Modern Sebagai Model Alternatif dalam Pembelajaran Matematika

Karya ilmiah yang bersangkutan telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 4 (empat) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sebenarnya.

Wassalamu alaikum warrahmatullahi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 26 Juni 2019

SINERGI PESANTREN-MADRASAH DI ERA MODERN SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA



PRIMARY SOURCES

1	spmsleman.files.wordpress.com	2%
2	miftahudin@barbas.wordpress.com	1%
3	repository.uinjkt.ac.id	1%
4	docplayer.info	1%
5	ditjenpp.kemendiknas.go.id	1%



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mediun: gsmc

Universitas Islam Indonesia

Daftar Riwayat Hidup



Biodata Diri	
Nama	Amin Maghfuri
Jenis Kelamin	Laki-laki
Status Pernikahan	Belum menikah
Tempat, tanggal lahir	Grobogan, 7 Maret 1993
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa
Alamat asal	Dusun Tawang Desa Jambon Rt/Rw 04/08 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
Alamat sekarang	Jl. Kaliurang Km. 9, Dayu Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Sleman DIY
Telp. HP	085740448201
Email	aminmaghfuri@yahoo.com, maghfuri7393@gmail.com

Riwayat Pendidikan			
Pendidikan Formal			
1	Program Pascasarjana Magister Studi Islam Konsentrasi	2015-2019	

	Pendidikan Islam Universitas Islam Indonesia	
2	Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	2011-2015
3	Madrasah Aliyah Syaroful Millah Pedurungan Semarang	2008-2011
4	Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Jambon Pulokulon	2005-2008
5	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jambon Pulokulon	1999-2005
6	Raudlatul Athfal Miftahul Huda Jambon Pulokulon	1998-1999
Pendidikan Non-formal		
1	Madrasah Diniyah Miftahul Huda Jambon Pulokulon	2001-2008
2	Pondok Pesantren Syaroful Millah Pedurungan Semarang	2008-2011
3	Pesantren Miftahul Jannah Klabanan Ngaglik	2011-2013

UNIVERSITAS

ISLAM

Pengalaman Organisasi

PP IPNU	Anggota Departemen Kajian Pendidikan	2019-2021
PW IPNU DIY	Koordinator Departemen Dakwah dan Kepesantrenan	2016-2018
PC IPNU Sleman	Ketua 1	2015-2017
DPD KNPI Sleman	Anggota Bidang Kajian dan Wawasan	2013-2015
OSIS	Ketua	2009-2011
ASSAFFA	Koordinator Minat dan Bakat	2012-2013
Kamagayo	Anggota	2012-2015